

E-Book_Post_Islamisme_1.pdf

by

Submission date: 08-Jun-2022 11:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 1852712314

File name: E-Book_Post_Islamisme_1.pdf (1.37M)

Word count: 49190

Character count: 310749

PARTAI POLITIK ISLAM DI ERA POST-ISLAMISME
(Studi Perbandingan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP))

Dr. Saidin Ernas, M.Si
Gema Putra Rumalutur, S.IP, M.Kesos

LP2M IAIN Ambon

PARTAI POLITIK ISLAM DI ERA POST-ISLAMISME

(Studi Perbandingan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dan Adaalet ve Kalkinma Partisi (AKP))

Penulis :

Dr. Saidin Ernas, M.Si
Gema Putra Rumalutur, S.IP, M.Kesos

ISBN: 978-602-5501-26-5

Editor: Dr. Moh. Rahanjantel, M.Th.I
Penyunting: Tim LP2M IAIN Ambon
Desain Sampul dan Tata Letak: SDesign

Diterbitkan oleh:

LP2M IAIN Ambon

Jl. H. Tarmidzi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon 97128

Telp. (0911) 344816

Handpone 081311111529

Faks. (0911) 344315

e-mail: Lp2miainambon16@gmail.com

publikasilp2miainambon@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2018

8

Hak cipta yang dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Kembalinya partai politik Islam dalam praktik politik kontemporer, merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diamati. Ada partai politik yang berhasil memperoleh dukungan maksimal dari rakyat dan menguasai panggung kekuasaan politik di negara-negara muslim, namun ada yang hanya mampu bertahan sebagai partai papan tengah dan tidak sedikit pula yang muncul kemudian tenggelam karena berbagai sebab yang kompleks. Meminjam pandangan Asif Bayat (2013), eksistensi partai politik Islam kontemporer akan sangat ditentukan oleh rumusan ideologi politik seperti apa yang hendak diperjuangkan, dan kemampuan elit partai Islam menyesuaikan gagasan politik ideologis dengan tantangan dan perubahan social yang terus terjadi dalam masyarakat.

Dalam bukunya yang berjudul *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, Asif Bayat menyebut dinamika adaptatif itu sebagai sebuah fenomena Pos-Islamisme, sebuah terminologi baru yang diperkenalkan Bayat untuk mencermati partai politik Islam atau gerakan politik Islam yang mampu menyesuaikan langgam ideologi politik Islam (Islamisme), dengan tantangan-tantangan baru yang terus terjadi. Partai Politik yang bertahan dalam pandangan Bayat, adalah yang meninggalkan gagasan politik teokrasi, mampu berdialog dengan realitas, dan beradaptasi dengan perkembangan baru demokrasi dan modernisasi.

Meskipun Asif membangun kerangka teorinya berdasarkan temuan-temuan penelitian yang mendalam terhadap dinamika politik di Iran dan Mesir, namun bagi kami tim penulis buku ini, konteks Indonesia dan Turki justru jauh lebih menjanjikan bagi apa yang disebut Bayat sebagai fenomena Pos-Islamis ketimbang kedua negara Muslim tersebut. Itulah mengapa ²i dalam buku ini, tim penulis mengajukan fenomena transformative Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki, sebagai objek penelitian yang dapat dianalisis dalam konteks Pos-Islamisme. Sehingga buku ini diharapkan bisa menjawab beberapa pertanyaan kunci, seperti apakah kedua partai Islam tersebut mewakili apa yang digambarkan Bayat sebagai Pos-Islamis? Lalu mengapa ada aksentuasi yang berbeda di antara keduanya, dan mengapa pula AKP di Turki bisa tampil sebagai pemenang dan menjadi penguasa, sedangkan PKS di Indonesia, hingga

saat ini, masih terus berjuang untuk merebut suara mayoritas rakyat Indonesia.

Penulisan buku ini tentu tidak akan bisa dilaksanakan dengan sukses hingga tersaji di hadapan pembaca, tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenan kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan. Meskipun kami sangat menyadari bahwa ucapan terimakasih tentu belumlah sebanding dengan semua kebajikan dan ketulusan yang telah kami terima, selama proses penelitian dan penulisan buku ini.

Buku ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari hasil penelitian yang dibiayai melalui Hiba Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon Tahun 2018. Berkenaan dengan itu, kami ingin menyampaikan terimakasih kepada Rektor IAIN Ambon Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag, yang telah menetapkan kami sebagai salah satu penerima bantuan penelitian pada Cluster Penelitian Nasional 2018. Pak Rektor juga telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan observasi lapangan hingga ke Turki, sebuah perjalanan ilmiah yang menghasilkan berbagai pengalaman intelektual yang akan sulit untuk dilupakan. Trimakasih juga kepada pimpinan dan staf di LP2M, yang telah mensupport pelaksanaan penelitian hingga penulisan buku ini dengan alokasi anggaran proses administrasi yang lancar dan berbagai kebutuhan teknis lainnya. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para reviewer dan tim penilai yang telah banyak memberikan masukan konseptual terhadap naskah proposal penelitian dan juga naskah awal dari buku ini. Demikian juga para kolega sesama dosen di IAIN Ambon, Prof. Abdul Khalik Latuconsina, Dr. Mohdar Yanlua, Dr. Ismail DP, Dr. Ismail Tuanany, DR. Abdul Manaf Tubaka, Dr. Abubakar Kabakoran, Dr. Abidin Wakano, Dr. Subair Abdullah, Syafin Soulissa, M.Si, Bang Zainal Sandia, Sadam Husein dan Fachrul (Adi) Kaplale, serta semua sahabat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka telah menjadi partner debat yang hebat tentang tema ini dan memberi berbagai masukan konstruktif dalam berbagai perjumpaan informal di IAIN Ambon, hingga akhirnya naskah buku ini kami beranikan untuk dipublikasikan.

Ucapan terimakasih yang tulus juga harus kami sampaikan kepada semua sahabat dan kenalan yang telah menjadi informan, baik di Indonesia maupun di Turki. Mereka telah memberi kesempatan wawancara yang sangat bersahabat dan terbuka, selama proses

penelitian. Beberapa sahabat di Turki seperti Nona Rukiye, Tuan Ufuq, Tuan Mustafa, Tuan Abdullah, serta teman-teman mahasiswa Indonesia di Turki seperti Roni Adi Wiryawan (Universitas Sakarya) yang telah banyak membantu. Demikian juga kepada para pengurus DPP PKS di Jakarta dan Maluku serta Pengurus AKP di Kota Sakarya, Kota Istanbul dan Ibukota Ankara Turki yang telah menerima kami dengan tangan terbuka dalam berbagai kegiatan wawancara dan observasi lapangan.

Akhirnya kami berharap buku ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis sebagai masukan bagi penguatan partai politik Islam yang lebih konstruktif bagi pembangunan demokrasi dan pemberdayaan umat. Sebagai sebuah karya ilmiah, tentu kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif dari khalayak pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Ambon, Oktober 2018
Tim Peneliti

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I	PENDAHULUAN	
A	Fenomena Ideologi Politik Islam	1
B	Masalah dan Metode Pembahasan	10
BAB II	KERANGKA TEORITIK IDEOLOGI POLITIK ISLAM	
A	Menelusuri Kajian Ideologi dan Partai Politik Islam	16
B	Diskursus Teori tentang Ideologi Politik Islam	22
C	Post-Islamisme dan Artikulasi Ideologi Politik Islam	36
BAB III	GERAKAN ISLAM TRANS-NASIONAL DAN DAN KONTEKS PERKEMBANGAN POLITIK INDONESIA DAN TURKI	
A	Angin Demokrasi di Negara-negara Muslim	44
B	Fenomena Gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya di Indonesia dan Turki	57
BAB IV	PKS DAN AKP DALAM DINAMIKA POLITIK IDEOLOGI DI INDONESIA DAN TURKI	
A	Lahirnya PKS; Dari Gerakan Dakwah ke Panggung Politik	70
1.	Situasi Politik di Indonesia sebelum Reformasi tahun 1998	70
2.	Gerakan Tarbiyah dan Tumbuhnya Islamisme di Kampus	74
3.	Gerakan Reformasi dan Lahirnya PKS	78
B	Konsolidasi Ideologi Politik Islam dan Munculnya AKP di Turki	91
1.	Situasi di Turki Sebelumnya Lahirnya Partai Politik Islam	94
2.	Gerakan Dakwah <i>Milli Görüş</i> (MG) atau Pandangan Kebangsaan	98
3.	Dinamika politik di Turki dan Lahirnya AKP	104
BAB V	PERBANDINGAN PKS DAN AKP SEBAGAI FENOMENA POS-ISLAMISME	
A	PKS dan AKP; Serupa Tetapi Berbeda	115
B	Transformasi Ideologi; Dari Islamis Menuju Pos-Islamis	119
B	Perbandingan Sistem Organisasi dan Pergerakan	135

C	Perbedaan Basis Massa; <i>Middle Class</i> versus <i>Middle Class Plus</i>	147
D	Aspek Kepemimpinan; Kolektif versus Kharismatik	153
E	Fenomena PKS dan AKP dalam Pemilu	161
BAB VI	CATATAN PENUTUP	172
	Daftar Pustaka	178
	Tentang Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

Perdebatan mengenai makna penting ideologi dalam kehidupan partai politik masih terus menjadi tema penting, bahkan di era ketika peran ideologi sudah dianggap sebagai gagasan usang dan tidak relevan lagi, dilindas oleh pragmatisme dalam arena politik moderen. Itulah mengapa, ketika Daniel Bell (1960) menyelesaikan bukunya yang berjudul “*The End of Ideology*,” terjadi kontroversi yang meluas di berbagai kalangan tentang makna penting ideologi dalam kehidupan politik.¹ Hal ini semakin mengemuka ketika Francis Fukuyama yang muncul di era 1990-an mendukung gagasan Bell dan menghadirkan analisis yang lebih tajam dalam bukunya *The End of History and The Last Man*.² Fukuyama dengan yakin menyebut ideologi-ideologi dunia akan segera sekarat dan berakhir di tengah kemenangan demokrasi dan kapitalisme global yang semakin ekspansif. Banyak ilmuan sosial yang mendukung pandangan Fukuyama, sebab menyaksikan pada akhir abad 21, angin demokrasi dan kapitalisme global menyapu hampir semua negara, dan menjadikan demokrasi dan liberalisme-kapitalisme sebagai ideologi utama yang tak tertandingi.

A. Fenomena Ideologi Politik Islam

Kemenangan kapitalisme di berbagai negara di dunia memang sempat diwarnai proses deideologisasi partai politik yang terjadi secara masif, sehingga ideologi-ideologi global seperti sosialisme, komunisme, otoritarianisme, dan bahkan ideologi politik Islam (Islamisme) semakin tertekan dan tidak populer. Oliver Roy (1996) yang mendokumentasikan

¹ Daniel Bell, *The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas in The Fifties*, (USA; The Free Press, 2001)

² Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, (New York: Free Pres, 2006)

fenomena tersebut dalam bukunya *The Failure of Political Islam*, menyebut dua hal sebagai kekalahan politik Islam (Islamisme). *Pertama*, modernisasi yang massif telah mendorong pragmatisme yang memudahkan makna penting ideologi politik Islam.³ *Kedua*, gerakan represif yang dilakukan rezim penguasa di berbagai negara Muslim terhadap kekuatan politik Islam, berimplikasi pada melemahnya konsolidasi partai politik Islam yang semakin tercerai-berai, melemah, dan tidak mampu mengartikulasikan gagasan ideologi politiknya secara terbuka dan maksimal.

Namun memasuki awal abad 21, dunia menyaksikan sebuah perubahan dramatis dan mencengangkan yang bertentangan dengan prediksi beberapa ilmuwan yang menyatakan ideologi politik Islam telah mati. Diawali dengan menguatnya fundamentalisme Islam yang diusung beberapa gerakan politik Islam di, hingga munculnya fenomena *Arab Spring* (Musim Semi Arab) yang menumbangkan sejumlah rezim otoriter di Timur Tengah dan membuka jalan bagi ekspresi politik Islam. Hal ini justru memperlihatkan semangat kembalinya ideologi politik Islam kedalam kehidupan politik praktis.⁴ Bahkan bukan itu saja, di beberapa negara Islam, partai politik yang mengusung ideologi politik Islam menemukan ruang aksentuasi dan diterima sebagai kekuatan populer yang menguasai panggung politik nasional. Meskipun fenomena ini belum berlaku secara general di mayoritas negara-negara Islam di seluruh dunia.

Kembalinya partai politik Islam dalam praktik politik menghasilkan dinamika dan respons yang beragam. Ada yang berhasil memperoleh dukungan maksimal dari rakyat dan menguasai panggung kekuasaan politik di negara-negara muslim, ada juga yang hanya mampu bertahan sebagai

³ Oliver Roy, *The Failure of Political Islam* (terj. *Gagalnya Islam Politik*). (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1996)

⁴ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes*, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

partai papan tengah dan tidak sedikit pula yang muncul kemudian tenggelam. Meminjam Asif Bayat (2013), eksistensi partai politik Islam kontemporer sangat ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan gagasan politik ideologis tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan social dalam masyarakat. Asif Bayat menyebut dinamika adaptatif itu sebagai sebuah fenomena *post-Islamism*,⁵ yakni suatu situasi dimana partai politik Islam dan gerakan politik Islam berusaha menyesuaikan ideologi politik Islam (Islamisme) yang mereka anut kedalam langgam politik dan perubahan yang terjadi di masing-masing negara. Partai Politik dengan Ideologi politik Islam yang bertahan dalam pandangan Asif Bayat, adalah yang mampu berdialog dengan realitas, beradaptasi dengan perkembangan baru demokrasi kontemporer. Partai Islam yang kaku dan eksklusif akan tenggelam, sejalan dengan berlalunya momentum politik. Seperti yang terjadi dengan gerakan Islam Ikwatul Muslimin di Mesir, yang sempat mengambil keuntungan dari momentum *Arab Spring*, mengambil alih kekuasaan dari rezim otoriter Husni Mubarak yang berhasil digulingkan, namun kemudian harus dikalahkan oleh rezim militer setempat. Selain Mesir, kita juga bisa menyaksikan dinamika politik yang berbeda yang di dua negara Islam terkemuka; Indonesia dan Turki.

Reformasi di Indonesia telah membuka ruang pada menguatnya praktik politik ideologis yang sempat “mati suri” selama era kekuasaan otoriter Orde Baru.⁶ Memanfaatkan liberalisme politik di era reformasi, partai politik berbasis ideologi Islam tumbuh bagai “cendawan” di musim hujan. Paling tidak ada 12 Partai berasaskan Islam yang mengikuti pemilu tahun 1999, antara lain yang mendapatkan kursi di DPR pada saat itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai

⁵Asif Bayat, *Post-Islamism: The Changin Faces of Political Islam*. (New York: Oxford University Press, 2013)

⁶ Affan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006), h. 27

Keadilan (PK), Partai Nahdatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan lain-lain.⁷ Disamping partai yang berasaskan Islam, di Indonesia pada saat itu, ada juga partai yang bebasiskan massa Islam, yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional ((PAN). Kedua partai yang disebut terakhir ini, massa pendukungnya terutama berasal dari para anggota dan simpatisan yang berasal dari organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muahammadiyah.⁸ Walaupun tidak seluruh anggota kedua organisasi Islam tersebut menjadi anggota kedua partai itu. Dan fakta membuktikan bahwa dalam kontestasi pemilu pasca reformasi di Indonesia, salah satu dari deretan partai berasaskan Islam yang tetap bertahan dan mendapatkan dukungan electoral yang cukup signifikan adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Imdadun Rahmat (2008) yang pernah meneliti tentang ideologi politik PKS dan menulis buku “*Ideologi Politik PKS, dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*”, menyebut PKS sebagai keajaiban politik Indonesia.⁹ Betapa tidak, hanya satu tahun setelah ia dideklarasikan (Agustus 1998), partai yang semula bernama Partai Keadilan (PK) itu telah berhasil mengikuti pemilu 1999 dan menjaring sebanyak 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari keseluruhan jumlah suara dan menempatkan 7 wakilnya di DPR. Dalam pemilu 2004, PKS mampu meningkatkan suaranya secara signifikan menjadi 8.325.020 suara atau 7,34% suara sah dan mendudukan 45 orang wakilnya di DPR. Bahkan mantan presiden partai ini, Hidayat Nurwahid, terpilih sebagai ketua MPR Periode 2004-2009. Di Pemilu 2009,

⁷ Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, *Mengapa Partai Islam, Mengapa Kalah* (Catatan Editor), dalam Deliar Noer, (et.al) *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alvabet, 1999), h. iii

⁸ Deliar Noer, (et.al.), *Mengapa Partai Islam Kalah*, h. iv

⁹ M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. (Yogyakarta: LKiS, 2008), h. 1

PKS masih bertahan dengan suara 8.204.946 atau 7,8% suara sah dan pada pemilu 2014 PKS memperoleh 8.480.204 atau setara, 6,79%.¹⁰

PKS didirikan oleh para aktifis dakwah kampus (pada awalnya bernama Partai Keadilan), mereka melihat peluang untuk mendirikan partai politik di tahun 1997 setelah sebelumnya secara tertutup melakukan berbagai aktivitas dakwah melalui jaringan tarbiyah di kampus-kampus, sebagai reaksi atas tersumbatnya semangat keislaman dalam partai politik praktis di Indonesia. Secara ideologis, PKS adalah partai Islam yang mengadopsi ajaran-ajaran Hasan Al-Banna dan beberapa pemikir Timur Tengah lainnya.¹¹ PKS memang berhasil mengambil tempat penting dalam setiap pemilu di Indonesia, namun perolehan suaranya hanya mampu menempatkannya sebagai partai menengah yang tidak mampu menguasai suara mayoritas. Sebaliknya partai politik yang mengusung ideologi nasionalis seperti Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), Partai Golkar, dan belakangan Partai Demokrat dan Partai Gerindra yang justru mendominasi kekuasaan politik di Indonesia.

Tersendatnya mobilitas PKS dan partai politik Islam di Indonesia, tentu mengundang beragam analisis. Ada yang mengaitkannya dengan keberhasilan depolitisasi ideologi politik Islam selama masa represif kekuasaan Orde Baru, yang berhasil “menjinakkan” umat Islam dari gerakan politik praktis, sehingga memicu sekularisasi politik yang memisahkan kehidupan keagamaan dengan politik.¹² Proses “penjinakan ini” telah “membonsai” kekuatan politik Islam sehingga dari waktu ke waktu terus

¹⁰Data ini dapat dilihat pada https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera#Perolehan_suara. Diakses 7 Oktober 2017.

¹¹Al-Banna adalah seorang tokoh Spiritual Mesir yang mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin (IM) pada 1928 dan mempengaruhi berbagai gerakan politik Islam di seluruh dunia.

¹² Bachttiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta; Paramadina. 1996), h. 12

mengalami penurunan ekspektasi dan dukungan dari kalangan pemilih muslim. Dalam analisis ini, negara secara terus menerus memperkuat wacana bahwa Islam dan politik tidaklah sebangun (*compatible*), sehingga kewajiban keagamaan tidak lantas mewajibkan umat Islam atas pilihan politik pada partai Islam ataupun simbol politik Islam. Selain itu, ada juga ilmuwan yang menyebut karakter politik Islam di Indonesia memang tidak menyediakan ruang bagi berkembangnya politik Islam ideologis. Dalam pandangan ini disebutkan bahwa meskipun kedudukan umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan memiliki komitmen keagamaan yang cukup tinggi (*religious*), namun kultur politik Islam di Indonesia tidak memberi ruang bagi menguatnya tatanan politik agama. Justru pengaruh Islam menguat pada ranah kebudayaan dan sistem nilai masyarakat Indonesia.¹³ Analisis seperti ini biasanya merujuk pada temuan-temuan antropologi politik yang dikembangkan oleh Clefort Geertz, pada tahun 1980-an, yang menyebut kategorisasi politik Islam di Indonesia dapat dibagi kedalam tiga aliran, Priyayi, Santri dan Abangan.¹⁴ Saiful Mujani yang juga menganalisis fenomena kekalahan tersebut, menyebut kekalahan telak partai Islam merupakan bentuk kegagalan elit politik Islam Indonesia dalam memahami karakter politik Islam Indonesia plural.¹⁵

Berbeda dengan Indonesia, di Turki yang menganut ideologi sekuler yang dibangun oleh Bapak Turki Moderen Mustafa Kemal Attaturk dan diperkuat oleh rezim militer Turki selama beberapa dekade,¹⁶ justru melahirkan kekuatan partai politik baru yang mengusung spirit ideologi politik Islam. Diawali dengan Partai Refah yang didirikan oleh tokoh

¹³ Zuly Qodir, *Islam Liberal*, (Yogyakarta : PT.LkiS Printing Cemerlang, 2010), h. 161

¹⁴ Cleefort Gerrtz, *Agama Jawa (terj.)* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996)

¹⁵ Saiful Mujani menyebut hal itu sebagai *Imagine Islam*, yaitu suatu Islam yang dibayangkan, semacam mitologi mayoritas yang tidak berkaitan langsung dengan ekspresi politik yang tunggal. Lihat Saiful Mujani, Mengapa "Partai Islam Kalah," dalam Deliar Noer (et.al) *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 195-197

¹⁶ Lihat Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Moderen*. (Jakarta: Djambatan, 1996)

gerakan Islam Turki Nechmetin Erbakan. Erbakan bahkan berhasil memenangkan pemilu dan tampil sebagai Perdana Menteri Turki. Namun kekuatan militer Turki yang tidak suka dengan perkembangan ideologi politik Islam, membubarkan Partai Refah dan menahan Erbakan. Pasca Partai Refah justru muncul Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) yang biasa disebut Partai Keadilan dan Pembangunan yang didirikan oleh dua politisi terkemuka yang juga merupakan murid ideologis Erbakan, yakni Recep Tayyip Erdogan dan Abdullah Gull pada 14 Agustus 2001.¹⁷ Berbeda dengan gurunya (Erbakan), generasi baru politik Islam Turki ini justru mengembangkan gagasan ideologi politik Islam yang lebih inklusif. Duet Erdogan dan Abdullah Gull pun berhasil membawa AKP tampil sebagai kekuatan politik paling dominan di Turki selama hampir dua dekade terakhir, dan secara fundamental banyak mengubah lanskap politik dan keagamaan di Turki.

Erdogan dan AKP mampu mempertahankan kekuasaannya, secara berkelanjutan, sejak pemilu tahun 2002, ketika AKP memenangkan pemilu parlemen secara mayoritas (34%). Disusul pemilu 2007, AKP berhasil lagi mempertahankan dukungan politik secara luas dari rakyat Turki, dan memenangkan pemilu dengan suara mayoritas di parlemen (47%). Kemenangan ini mengantarkan Erdogan sebagai Perdana Menteri Turki dan Abdullah Gull sebagai Presiden Turki.¹⁸ Kemudian, pemilu 2011, AKP memenangkan suara mayoritas, hampir 50 persen (326 kursi) parlemen. Meskipun AKP gagal memenuhi target dua pertiga (367) suara di parlemen, yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan konstitusi Turki secara unilateral. Tetapi, kemampuan Erdogan dan AKP mempertahankan

¹⁷ Rafiullah Azmi, "The Rise of the AKP: A Challenge before Turki", dalam *Islam and The Modern Age*. Vol. 33 (April 2002), h. 95-104

¹⁸ Rafiullah Azmi, *ibid*, h. 95

kekuasaan selama satu dekade itu, merupakan prestasi politik yang luar biasa.

Pada tahun 2016 lalu, sekelompok kekuatan militer di Turki yang tidak suka pada rezim Erdogan, melakukan kudeta militer terhadap Erdogan dan AKP, namun rakyat Turki melakukan perlawanan dan berhasil menggagalkan kudeta tersebut. Pasca Kudeta posisi Partai AKP sebagai Partai Islam di Turki justru semakin kuat, dan berhasil memenangkan referendum dengan suara mayoritas untuk mengubah sistem presidensial di Turki.¹⁹ Dan pada tahun 2018 yang lalu AKP berhasil meraih suara mayoritas 42,4%, dan semakin mengukuhkan pemimpin AKP Recep Toyyib Erdogan yang berhasil memenangkan pemilihan Presiden Turki dengan suara mayoritas 52,73%.²⁰ Dewasa ini Erdogan bukan saja menjadi Presiden Turki yang paling dominan setelah era Kemal Attaturk, namun perlahan tapi pasti ia berhasil menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh politik Islam paling terkemuka di dunia.

Meskipun secara ideologis, AKP di Turki hanya mengadaptasi ideologi politik Islam secara eksplisit dalam pandangan politik partai, tetapi AKP telah menjadi tempat berkumpulnya aktivis-aktivis Islam Turki dan melahirkan gerakan politik Islam yang lebih modern dalam keseluruhan praktiknya. AKP dan Erdogan secara eksplisit tidak mengganti sekularisme yang menjadi ideologi negara Turki sejak Kemal Attaturk, namun secara perlahan dan pasti membangun kehidupan negara yang lebih Islami. Beberapa kebijakan populis seperti penguatan lembaga pendidikan agama, dukungan pada penggunaan hijab di ruang public, hingga perhatian yang

¹⁹ Francesco F Milan, *Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Attempt*, The RUSI Journal, 161:4, 2016, 28-32, <http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2016.1228291>, diakses tanggal 4 Oktober 2017.

²⁰ Lihat berita pemilu Turki 2018 sebagaimana dipublikasi Berita On-Line Tarbiyah, "Hasil pemilu Turki 2018; Erdogan Menang, AKP Unggul", <http://www.tarbiyah.net/2018/06/hasil-pemilu-turki-2018.html>, (diakses 10 Oktober 2018)

mengemuka pada isu-isu Islam internasional seperti Palestina dan Rohingya telah mentahbiskan AKP dan Erdogan sebagai kekuatan politik Islam yang diakui global. Artikulasi ideology politik yang dikombinasikan dengan berbagai kebijakan populis yang dimainkan Erdogan dan AKP memungkinkan mereka tetap mendapat dukungan kuat dari rakyat Turki pada semua basis massa, dan menghindarkan gesekan dan konfrontasi terbuka dengan militer Turki yang dikenal kuat dalam mempertahankan ideology sekuler. Turki mengalami apa yang oleh Asif Bayat disebut sebagai Post-Islamist, yakni artikulasi ideology politik Islam yang lentur dan mampu bernegosiasi dan berkompromi dengan dinamika dan perubahan social dalam masyarakat.

Perkembangan ideologi politik Islam yang berbeda di Indonesia dan Turki bisa menjadi bahan untuk memahami dan membandingkan berbagai dinamika yang terkait dengan perkembangan ideologi politik di dua Negara Islam yang sangat berpengaruh ini. Mengapa partai-partai Islam di Indonesia seperti PKS tidak mampu merebut suara pemilih muslim, meskipun umat Islam adalah kelompok yang mayoritas di Indonesia. Sedangkan AKP di Turki justru berhasil meraih dukungan masyarakatnya secara signifikan. Selain factor-faktor internal yang beragam dan kompleks, hal ini bisa dijelaskan dengan menganalisis pemahaman ideologi politik Islam itu sendiri yang mungkin memiliki konteks, tafsir dan artikulasi praksis yang berbeda di Indonesia dan Turki. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika di kedua Negara Muslim ini bisa membantu memahami banyak hal terkait dengan ideologi partai politik di dunia Islam lainnya, termasuk untuk membaca berbagai gerakan politik yang mengusung ideolog politik Islam yang sedang berjuang mencari tempat dalam masyarakat Muslim di berbagai Negara.

Sebut saja misalnya Hizbullah di Lebanon²¹, Hamas dan Fatah di Palestina, FIS di Al-Jazair, Islamic Action Front di Yordania,²² PAS di Malaysia,²³ atau MILF di Mindanao Philipina²⁴. Kajian tentang ideologi politik Islam, diharapkan dapat membantu para pengusung ideologi politik Islam untuk membangun perspektif ideologis yang lebih kontekstual, yang hendak dikembangkan sebagai bagian dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Islam. Selain juga untuk memastikan bahwa bangunan ideologi politik Islam tidak jatuh kedalam jebakan fundamentalisme, ekstremisme, bahkan terorisme yang menjadi tantangan Islam dewasa ini.

B. Masalah dan Metode Pembahasan

Sejauh ini telah ada banyak studi tentang perkembangan PKS dan PKP, namun hanya sedikit yang mencoba melakukan studi komparatif di antara keduanya, dan sejauh yang penulis ketahui jauh lebih sedikit lagi yang mencoba mengkaji sistem ideologi politik Islam yang dibangun PKS dan AKP dan bagaimana keduanya mengartikulasikan perspektif ideologi politik yang dianutnya itu dalam medan politik yang menantang. Dalam konteks itulah penelitian ini mencoba melakukan analisis dengan memanfaatkan pendekatan politik perbandingan (*comparative politic aproach*) untuk mencermati bagaimana PKS dan AKP memahami Islam sebagai sebuah ideologi politik, dan menerapkannya dalam kehidupan politik di Indonesia dan Turki yang terus berubah. Adaptasi terhadap gagasan-gagasan teoritik

²¹ Assaf Kfoury, "Hizb Allah and Lebanese State", dalam Joel Beinin and Joe Stork (ed.), *Political Islam Essays From Middle East Report*. (New York: I.B. Taurus Publisher, 1997), h.

²² Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu dan Dimensi Konflik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

²³ Syed Serajul Islam, *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia* (Singapore: Thomson Learning, 2005)

²⁴ Kit Collier, "The Philippines", dalam Greg Fealy and Virginia Hooker (ed.), *Voice of Islam in Southeast Asia A Contemporary Sourcebook* (Singapore: Insatitute of Southeast Asian Studies, 2006)

Post-Islamis yang dikembangkan Asif Bayat (2013) dalam penelitian panjangnya di Mesir dan Iran, diharapkan dapat membantu kajian ini untuk menganalisis perkembangan ideologi politik Islam di kedua negara, apakah berkembang dalam ideologi politik Islam klasik, atau dalam konteks Islamisme yang cenderung fundamentalis atau sebuah fenomena baru yang berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi di dunia Islam.

Berdasarkan gambaran di tersebut, maka segera tampak bahwa ideologi politik Islam yang dikembangkan di berbagai negara muslim memiliki karakter dan praktik yang beragam. Ada yang mengembangkan secara formal dalam bentuk Islamisme, dan ada juga yang mengkompromikan dengan berbagai dinamika internal yang berbeda-beda. Transformasi dari Islamism ke pandangan ideologi Islam yang lebih terbuka itulah yang tampaknya diperlihatkan oleh PKS dan AKP dalam lanskap politik di Indonesia dan Turki.

Oleh sebab itu, masalah utama yang diangkat dalam buku ini adalah tentang bagaimana perbandingan ideologi politik Islam yang dikembangkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). Selanjutnya untuk mengkaji hal tersebut maka ada beberapa hal pokok yang hendak dibahas. *Pertama*, proses konstruksi ideologi politik Islam yang dikembangkan oleh PKS di Indonesia dan AKP di Turki. *Kedua*, artikulasi ideologi politik dalam kehidupan politik, dimana AKP di Turki berhasil meraih dukungan suara mayoritas, sedangkan PKS di Indonesia masih terus gagal meraih dukungan mayoritas Muslim. *Ketiga*, konteks perbandingan PKS dan AKP dalam persepektif pos-islamisme yang menjadi tema sentral dalam buku ini.

Studi tentang dinamika ideologi politik Islam di kalangan PKS dan AKP yang diangkat dalam buku ini diharapkan dapat memberi dua manfaat sekaligus, baik secara teortis dan konseptual maupun secara praksis.

Pertama, secara teoritis, penelitian ini melakukan refleksi kritis terhadap konstruksi ideology politik Islam yang menjadi *worldview* partai politik di dunia Islam dewasa ini. Terutama terkait dengan teorisasi partai politik Islam yang terus berubah seiring dinamika social, ekonomi dan politik di masing-masing negara Islam. Dari pandangan politik Islam klasik yang bersifat teokrasi, maupun pandangan Islamisme yang melihat negara Islam sebagai jalan perjuangan, hingga pos-islamisme yang memperlihatkan kelenturan Islam dalam dialognya dengan perubahan.

Kedua, secara praksis buku ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para pelaku atau aktivis politik Islam, maupun para pemimpin partai politik Islam untuk merumuskan kembali ideology politik Islam yang selama ini diperjuangkan. Apakah konsepsi ideologi politik Islam tersebut sudah mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan ideal dan praktis dari negara dan masyarakat Islam di era modern ini. Dengan begitu eksistensi partai politik Islam memiliki aksentuasi yang berbeda dengan partai politik dengan basis ideology lain, dan tetap dirasakan kehadiran dan manfaatnya dalam masyarakat.

Buku ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi perbandingan (*comparative study*). Objek yang hendak dikaji adalah sistem ideologi dan aksi-aksi politik PKS dan AKP dalam lingkup sistem politik yang dinamis di Indonesia dan Turki. Kedua partai politik tersebut dipilih karena disebut-sebut mewakili genre baru politik Islam dunia yang mulai bertransformasi dari pandangan-pandangan Islamis ke Pos-Islamis. Sebagaimana diprediksi oleh beberapa peneliti seperti Antonio Bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason (2008) dan Asif Bayat (2013) sendiri. Kedua partai politik Islam tersebut dianggap berhasil memperoleh

dukungan umat Islam, bahkan seperti AKP di Turki berhasil tampil sebagai penguasa dalam beberapa periode.

Sumber data dalam buku ini dikumpulkan dari observasi langsung di Indonesia dan di Turki selama bulan Agustus hingga Oktober 2018, terutama di 3 kota utama, yakni Ibu Kota Negara Ankara, Kota Istanbul dan Kota Sakarya. Observasi tersebut untuk mengamati secara langsung dinamika politik dan kemasyarakatan, serta bagaimana agenda-agenda ideologis partai didesiminasi kedalam kehidupan politik. Data primer juga diperoleh dari proses wawancara dengan para informan, dan kajian pustaka terhadap berbagai dokumen partai dan literature yang memuat tentang pandangan ideologi PKS dan AKP. Sedangkan sumber data sekunder adalah informasi di media masa, atau laporan-laporan penelitin lain yang memiliki relevansi dengan kajian ini. Termasuk juga buku-buku utama yang menjelaskan tentang perkembangan AKP dan PKS dalam kontestasi politik di Indonesia dan Turki.

Analisis data di dalam buku ini mengandalkan model analisis deskriptif interaktif²⁵, dan analisis perbandingan politik (*politic comparative*) yang biasa dikenal dalam studi-studi politik.²⁶ *Pertama*, metode tematis yang dimulai dengan menelaah data-data yang telah dikumpulkan dalam penelitian dan dikelompokkan secara tematis sesuai topic-topik yang menjadi pertanyaan utama dalam penelitian. Terutama yang terkait dengan ideologi, gerakan politik, dan dinamika yang terjadi di antara keduanya. *Kedua*, metode eksternalisasi, yakni mengkaji kaitan data dengan konteks eksternal, seperti lingkungan social, politik, ekonomi dan budaya di masing-masing negara yang menunjukkan adaptasi kreatif tertentu dari partai politik Islam. Pada

²⁵G.R. Lono Lastoro Simatupang, *Metode, teori dan Teknik Penelitian*, (Sleman; Pustaka Widayatama, 2006), 115-116

²⁶Ronald H Chilcote, *Teori Perbandingan Politik: Penelurusan Paradigma*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 7

bagian ini akan dianalisis bagaimana artikulasi ideologi politik Islam yang dilakukan PKS di Indonesia dan AKP di Turki. *Ketiga*, dilanjutkan dengan metode interpretative, metode ini digunakan pada bagian akhir untuk melihat makna yang telah didapatkan dari data-data yang dikumpulkan selama penelitian dan dihubungkan dengan perspektif post-Islamisme yang digunakan sebagai *grand theory* dalam kajian ini. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diinventarisir, dikelompokkan sesuai pertanyaan-pertanyaan kemudian dideskripsikan dalam tulisan, sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

IDEOLOGI POLITIK ISLAM

Kajian tentang ideologi Partai Politik akan selalu menjadi tema yang menarik, meskipun Daniel Bell (2001) beberapa tahun yang lalu pernah menyatakan bahwa ideologi tidak lagi menarik dan akan segera berakhir (*the end of ideology*).²⁷ Apalagi kajian-kajian tentang ideologi politik Islam dewasa ini menjadi daya tarik baru, setelah penyebaran revivalisme dan fundamentalis Islam dari Timur Tengah ke berbagai negara Muslim di berbagai belahan dunia.²⁸

Pembahasan tentang ideologi politik Islam yang diangkat dalam buku ini tentu bukan merupakan kajian yang baru, sebab hal ini telah dilakukan oleh banyak ilmuwan dan peneliti, yang menghasilkan sejumlah teori dan publikasi ilmiah yang telah dikenal luas. Masing-masing mencoba melihat bagaimana partai politik membangun ideologi dan gerakan politik praktisnya. Termasuk juga hasil-hasil penelitian yang secara spesifik mencoba memahami partai politik Islam di Indonesia dan di Turki. Hal ini penting dipelajari dalam konteks kajian post-Islamisme yang hendak dibicarakan dalam buku ini, untuk mendudukan posisi ideologis partai politik Islam dalam konteks kontemporer. Apalagi teori-teori Islamisme sebagaimana dikembangkan Bassam Tibi (2008) dan teoritis sejenisnya, dianggap sudah tidak memadai untuk menjelaskan beberapa perkembangan terbaru yang semakin dinamis.²⁹ Pada bagian ini, akan dikemukakan

²⁷ Lihat tulisan Daniel Bell, *The And of Ideology; On The Exhaustion of Political Ideas in the Fifties*, (New York: Free Press, 2001)

²⁸ M. Imdadudin Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Air Langga, 2005)

²⁹ Greg Fealy misalnya mengkritik cara pandang Bassam Tibi dan para peneliti seilirannya, seperti yang partai Islamis dan non-Islamis. Partai Islamis selalu distigmatisasi negative

berbagai kajian terdahulu yang pernah dilakukan, baik konstruksi teori ideologi politik Islam hingga kajian post-Islamisme yang menjadi latar dari buku ini, yang secara spesifik menjadikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) sebagai objek kajian.

A. Menelusuri Kajian Ideologi dan Partai Politik Islam

Sebagai pengantar terhadap gagasan-gagasan yang hendak dikembangkan, maka akan diperlihatkan hubungan kajian ini dengan berbagai kajian serupa yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya, serta factor-faktor yang membedakannya dan bagaimana kajian ini merumuskan sudut pandang tertentu yang hendak ditekankan sebagai focus dalam kajian ini.

Salah satu hasil penelitian penting yang dilakukan tentang perkembangan ideologi politik di Indonesia dan Turki bisa dijumpai pada kajian Muhammad Nasih (2013), yang dilakukan sebagai bagian dari disertasi doctoral di Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Nasih menulis tentang “Dinamika Islam dan Nasionalisme di Indonesia dan Turki,” dan menunjukkan bahwa kontestasi yang berbeda antara Islam dan nasionalisme di Indonesia Turki telah melahirkan wajah ideologi Islam yang berbeda di kedua negara. Penelitian Nasih menemukan bahwa dinamika antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia terjadi dalam organisasi-organisasi masyarakat sipil, partai-partai politik, dan lembaga-lembaga negara/pemerintahan. Dinamika di dalam salah satu institusi berpengaruh kepada yang lain. Karakter nasionalisme Turki awalnya dibangun berdasarkan prinsip sekularisme laicisme. Namun selanjutnya

dan berbahaya bagi pembangunan demokrasi. Padahal bagi Greg Fealy, hal itu perlu diteliti lebih lanjut sebab ada juga partai Islamis yang tidak sedikit memberi kontribusi bagi pembangunan demokrasi di negara-negara Islam. Lihat pengantar Greg Fealy dalam Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012)

terjadi konvergensi antara keduanya tanpa mengubah konstitusi negara dan melahirkan paradigma baru nasionalisme dengan karakter sekularisme non-laicisme dalam praktik. Bentuk konvergensi antara Islam dan nasionalisme di Turki memang belum stabil karena sikap politik kalangan Islam belum didasarkan pada landasan teologis (*theological statement*), melainkan karena pertimbangan-pertimbangan politik (*political statement*) untuk menghindari tekanan kekuatan pro-sekularisme. Sedangkan karakter nasionalisme di Indonesia adalah nasionalisme-religius, karena konstitusi dan dasar negara (Pancasila) secara tegas memberikan ruang yang cukup lapang kepada agama. Hanya saja, praktik politik represif rezim Orde Baru dalam periode politik dekade 1980-an terhadap kalangan Islam menghidupkan paradigma politik yang mendikotomikan antara Islam dengan nasionalisme. Umat Islam dicurigai memiliki cita-cita untuk mengembalikan Islam sebagai dasar formal dalam praktik politik-kenegaraan. Tekanan rezim menyebabkan sebagian kalangan Islam mengkonstruksi pandangan teologis baru tentang konvergensi antara Islam dan nasionalisme yang berpengaruh kepada penerimaan mayoritas kalangan politik Islam di Indonesia kepada Pancasila berdasarkan pada pandangan teologis (*theological statement*), bukan sekedar politis (*political statement*).³⁰

Dalam konteks ideologi partai politik Islam, bisa ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Muhtadi (2012) dengan judul “Dilema PKS; Suara dan Syariah”. Burhanudin mencoba membedah gerakan PKS yang terjebak di dalam situasi tetap mempertahankan ideologi politik Islam atau harus realistis menerima bahwa hal tersebut hanya membuat mereka eksklusif dan tidak memiliki dampak elektoraal yang signifikan. Burhanudin menemukan bahwa PKS bukan partai politik yang

³⁰ Muhammad Nasih, *Dinamika Islam dan Nasionalisme di Turki dan Indonesia*, (Disertasi Doktorat di Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013)

mengartikulasikan ideologi agenda-agenda politiknya melalui prosedur kelembagaan dan politik konvensional, tetapi juga bertindak sebagai organisasi gerakan social yang sangat aktif melakukan aksi-aksi politik. PKS mampu memanfaatkan kesempatan politik demokratis untuk memasukkan agenda-agenda politik Islamis, memobilisasi sumber daya politik dalam aksi-aksi lapangan yang menyedot perhatian public, dan terlibat dalam merespon isu-isu politik Islam baik nasional maupun internasional.³¹ Hal ini persis dengan dugaan post-Islamisme yang dikembangkan Asrif bayat. Namun studi Burhanudin hanya focus pada PKS dan tidak membandingkan dengan Partai Politik Islam di negara lainnya.

Penelitian tentang ideologi politik PKS juga pernah dilakukan oleh intelektual muda NU, M. Imdadun Rahmat (2008) dengan judul *“Ideologi PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen”*. Menurut Imdadun transformasi PKS dari gerakan tarbiyah hingga berhasil menjadi Partai politik yang berkompetisi dalam sistem politik demokratis, merupakan suatu proses yang menarik. Ideologi PKS yang awalnya berbahaya karena mengimpor gagasan-gagasan Islamis dari Ihwanul Muslimin, justru menemukan jalan “tengah” antara Islam dan demokrasi setelah melibatkan diri dalam praktik politik demokrasi.³² Kajian Imdadun Rahmat memberi pencerahan tentang pentingnya membuka jalan pada kekuatan-kekuatan politik konservatif untuk masuk ke sistem politik demokratis, agar secara perlahan dapat beradaptasi. Hal ini yang tidak terjadi dengan kekuatan politik seperti Hizbut Tahrir yang hingga saat ini tetap berdiri di luar jalur kepartaian sehingga tidak berkesempatan menguji gagasan ideologi mereka dalam sistem politik demokratis. Namun demikian, secara umum kajian Imdadun bersifat deskriptif dan kurang memberikan analisis tentang

³¹ Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah*, (Jakarta: KPG, 2012)

³² Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2008)

bagaimana ideologi Islam politik yang diusung PKS diartikulasikan dalam politik praksis di Indonesia. Seperti upaya PKS untuk meraih konstituen yang lebih besar dengan memperluas basis ideologi politik dan lain sebagainya.

Adapun hasil penelitian dan publikasi tentang *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) juga sudah banyak dilakukan. Misalnya hasil kajian yang diedit oleh Birol Yesialda dan Barry Rubin dengan judul "*Islamization of Turki Under AKP Rule*". Penelitian tersebut mendeskripsikan upaya-upaya transformasi politik Islam di Turki selama kekuasaan Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP). AKP berhasil membangun keislaman di Turki dengan mengkreasikan nilai-nilai keislaman dengan ideologi sekuler yang dianut oleh Turki. Pada kenyataannya apa yang dilakukan AKP adalah sebuah upaya eksplisit untuk memperkuat kekuatan politik Islam tanpa harus bergesekan dengan militer.³³ Menurut catatan Alfian Alfian (2014), kemampuan AKP menjaga hubungan yang terus harmonis dengan Militer Turki merupakan salah satu keberhasilan besar partai tersebut dalam merawat kekuasaan politiknya selama beberapa dekade.³⁴ Kajian lain tentang AKP juga bisa dibaca dalam *The Rise of Political Islam in Turkey*, karya Anggel Rabasa dan Stephen Larrabee (2008).³⁵ Dalam buku yang terkenal tersebut bisa dilihat akar-akar ideologi partai politik Islam dalam sejarah Turki Moderen, hingga melahirkan fenomena AKP yang terus menguasai panggung politik Turki hingga saat ini.

Studi yang juga menarik tentang perkembangan ideologi politik Islam di Turki adalah penelitian yang dilakukan oleh Bora Kanra dan dipublikasi

³³ Birol Yesialda dan Barry Rubin, *Islamization of Turki Under AKP Rule*. (New York: Routledge 2012)

³⁴ Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki, Pergeseran Politik dan terpinggirnya Niliter Pasca AKP*, (Jakarta: Penjuru Ilmu Sejati, 2014)

³⁵ Anggel Rabasa dan Stephen Larrabee, *The Rise of Political Islam in Turkey*. (USA: RANDS Cooperation, 2008)

pada tahun 2016 dengan judul “*Islam, Democracy and Dialogue in Turkey; Deliberation in Devided Society*”. Kanra menyebut keberhasilan AKP dalam panggung politik Turki adalah kombinasi dari kemampuan mendialogkan ide-ide Islam dengan dinamika politik masyarakat Turki; misalnya antara Islam dan Kemalisme atau antara Islam dan sekularisme. Keberhasilan itu membuat AKP tidak dilihat sebagai ancaman bagi sekularisme Turki dan diterima dalam dinamika politik di Turki, yang secara umum masih menempatkan kelompok sekuler dan militer sebagai kekuatan yang sangat hegemonik.³⁶ Hal ini juga yang telah dibicarakan Muhammad Nasih, tentang pergulatan sekularisme dan Islam dalam membentuk nasionalisme Turki sebagaimana yang telah diungkapkan di awal. Meskipun selama beberapa dekade kekuatan nasionalis yang berideologi Kemalis-sekuler berkuasa di Turki, namun Islam tidak bisa dihilangkan begitu saja. Dalam kenyataannya militer dan kekuatan nasionalis Turki dipaksa mengakomodasi kekuatan politik Islam dalam dua dekade terakhir. Dan fakta pun membuktikan kekuatan politik Islam yang diwakili AKP akhirnya berhasil memegang kendali kekuasaan.

Secara konseptual studi Sitaresmi Sulistyawati Soekanto (2013) dengan judul “*Strategi Pemenangan Pemilu: AKP di Turki dan PKS di Indonesia,*” memiliki banyak irisan dan persinggungan dengan penelitian ini. Sitaresmi juga menyinggung tentang ideologi politik Islam dan gagasan Pos-Islamisme Asif Bayat, namun analisis atas ideologi Post-Islamis hanya menjadi satu bagian kecil dari proses pemenangan AKP dan PKS. Studi Sitaresmi lebih focus pada model kampanye **pemenangan pemilu AKP di Turki dan PKS di Indonesia**. Padahal **studi** ideologi menjadi sesuatu yang penting dalam mencermati perkembangan partai politik Islam, untuk

³⁶ Bora Kanra, *Islam, Democracy and Dialogue in Turkey; Deliberation in Devided Society* (NewYork: Rouledge, 2016).

merumuskan ideologi politik macam apa yang dibutuhkan partai politik dalam dinamika masyarakat muslim kontemporer. Meskipun demikian, penelitian ini menjadikan riset pendahuluan yang dilakukan Sitaresmi Sulistyawati dan berbagai penelitian terdahulu sebagai basis analisis, untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana PKS dan AKP mengartikulasikan ideologi politiknya dalam kehidupan politik, baik pada konteks kebijakan bernegara maupun dalam memenuhi tuntutan keislaman.³⁷

Deskripsi atas berbagai kajian dan publikasi yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa studi tentang ideologi partai politik Islam dan AKP bukan merupakan sesuatu yang baru. Bahkan beberapa hasil penelitian dan publikasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan kajian ini. Namun hal substantial yang sedikit berbeda dari kajian dalam buku ini adalah pilihan analisis pada gagasan post-Islamisme yang dikembangkan Asif Bayat. Buku ini akan melihat bagaimana PKS dan AKP membangun ideologi politik Islam yang diusungnya, baik eksplisit maupun implisit dan Secara praktis mengartikulasikan dalam dinamika politik di masing-masing negara. Kerangka teoritik post-Islamisme yang ditawarkan Asif Bayat, akan digunakan untuk melihat bagaimana pandangan Islam politik ketika diperhadapkan dan dialogkan dengan realitas politik di sebuah negara. Mengapa AKP berhasil melakukan dengan baik dalam *lanskap* politik sekuler di Turki, sedangkan PKS di Indonesia seakan menghadapi dilemma politik antara kebutuhan ideologis dan kebutuhan electoral (suara) yang tidak mudah. Kajian terhadap fenomena ini diharapkan dapat melahirkan suatu konsepsi pengetahuan tentang ideologi politik Islam di era masyarakat modern ini.

³⁷ Sitaresmi S. Soekanto. *Strategi Pemenangan Pemilu: AKP di Turki dan PKS di Indonesia*. (Disertasi pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012), h. 32

B. Diskursus Teori tentang Ideologi Politik Islam

Studi tentang partai-partai Islamis di berbagai negara Muslim telah banyak memperoleh perhatian para intelektual selama dua dekad terakhir. Isu partai politik Islam yang mengusung ideologi politik Islam atau Islamisme, telah mengundang perdebatan yang cukup panjang, terutama di tengah transformasi social dan politik yang dialami oleh masyarakat Islam. Sebagaimana yang telah diungkap di pendahuluan kajian ini, perhatian tentang ideologi politik Islam semakin mengemuka ketika terjadi gerakan reformasi di Indonesia dan fenomena *Arab Spring* di Timur Tengah, peristiwa tersebut mengangkat kembali debat lama tentang Islam dan politik, bagaimana konstruksi ideologi politik Islam dan beragam pertanyaan mendasar lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir para ahli politik Islam mencoba mengemukakan sejumlah kerangka teoritik untuk menjelaskan fenomena politik Islam kontemporer yang terus bertaransformasi dari pemikiran dan ideologi politik *Islamic State* ke *Nation State* dan bentuk-bentuk lain yang semakin kompleks. Salah satu yang cukup menarik adalah pandangan Asif Bayat tentang apa yang disebutnya sebagai *Post-Islamism*. Studi Bayat yang cukup lama terhadap berbagai gerak perubahan social di Iran dan Mesir, telah mendorongnya pada satu kesimpulan teoritis tentang mengemukanya fenomena baru politik Islam. Namun sebelum sampai pada penjelasan tentang aspek-aspek penting teorisasi *Post-Islamism*, ada baiknya akan dijelaskan bagaimana gambaran ideologi politik Islam, hingga Asif Bayat menawarkan analisisnya.

Bagi banyak ilmuan, agama adalah instrument ilahiah untuk memahami dunia,³⁸ sedangkan Islam merupakan salah satu agama yang paling relevan dengan premis ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam

³⁸ Robert N. Bellah, "Islamic Tradition and Problem of Modernization," dalam Robert N. Bellah, *Beyond Beliafe: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1991), h. 146

yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang “hadir dimana-mana” (*omnipresencei*). Menurut Fazlur Rahman, pandangan ini adalah bentuk pengakuan bahwa kehadiran Islam memberikan “panduan moral yang benar bagi tindakan manusia.”³⁹ Berdasarkan pandangan ini, umat Islam percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total. Penubuhannya dinyatakan dalam *Syari’ah* (hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Muslim melangkah lebih jauh dari itu: mereka menekankan bahwa “Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan.”⁴⁰ Hal ini mendorong kaum Muslim kontemporer ingin mendasarkan seluruh kerangka kehidupan social, ekonomi dan politik pada ajaran Islam secara eksklusif, tanpa menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kendala-kendala yang akan muncul dalam praktiknya.

Pandangan holistik Islam sebagaimana diungkap di atas, mempunyai beberapa implikasi. Salah satu diantaranya pandangan ini telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang literal dan sempit, yang hanya menekankan dimensi “luar” (*exterior*)-nya. Dan sebagaimana dibahas Bahtiar Efendi (1998), kecenderungan seperti ini telah dikembangkan sedemikian jauh sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi “kontekstual” dan “dalam” (*interior*) dari prinsip-prinsip Islam. Karena itu apa yang tersirat di balik “penampilan-penampilan tekstualnya,” hampir-hampir terabaikan, jika bukan terlupakan maknanya.⁴¹ Sebagai contoh, memahami *Syari’ah* sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu haal, sementara memahaminya secara benar adalah hal yang lain. Bahkan dalam konteks bagaimana *Syari’ah* harus dipahami inilah, sebagaimana dilihat Fazlur Rahman banyak sekali

³⁹ Fazlur Rahman, “Islam”, dalam Bahtiar Eefendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 7

⁴⁰ Bahtiar Eefendi, *Islam dan Negara*, h. 7

⁴¹ Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara*, h. 11

menimbulkan persoalan dan perbedaan.⁴² Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum Muslim terhadap *Syari'ah*. Situasi sosiologis, cultural, dan intelektual, atau apa yang disebut Arokoun sebagai “estetika penerimaan” (*aesthetics of reception*), sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman.⁴³ Munculnya berbagai mazhab fiqh, kalam (teologi), dan filsafat Islam, misalnya, menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Islam itu multi-interpretatif. Watak multiinterpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah.

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari kondisi dari sejarah Islam yang multi-interpretatif semaca ini. Pada sisi lain, hampir setiap Muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multi-interpretatif itu, maka tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, beberapa bahkan saling bertentangan, mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.⁴⁴

Menurut Bachtiar Eefendi, dewasa ini ada dua spectrum pemikiran politik Islam yang berbeda. Meski sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek kehidupan, namun terdapat penafsiran yang jauh berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan modern. Pada ujung satu spectrum, beberapa kalangan Muslim berpendapat

⁴² Fazlur Rahman, dalam Bachtiar Eefendi, *Islam dan Negara*, h. 101

⁴³ Mohammad Arkoun, “The Concept of Authority in Islamic Thought,” dalam T.W. Arnold (ed.), *The Preaching of Islam: A History of Propagation of The Muslim Faith*, (New York: AMS Press, 194), h. 58

⁴⁴ Hal ini bisa dilihat dalam berbagai literature sejak periode klasik, abad pertengahan, dan kontemporer. Lihat W. Montgomery Watt, *Islam Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960), Munawir Syazali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), dan masih banyak lagi yang lain .

⁶ bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa *Syari'ah* harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada ditangan Tuhan, bahwa negara tentang negara bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep *ummah* (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, dan bahwa sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus modern dewasa ini.

⁶ Pada ujung spectrum yang lain, beberapa kalangan Muslim yang lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau sistem politik) yang harus dijalankan oleh *ummah*.”⁴⁵

Dalam kata-kata Muhammad Iamara, seorang pemikir Muslim Mesir,

“Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim, Karen logika tentang kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia (untuk memikirkannya), dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan agama ini.”⁴⁶

Menurut aliran pemikiran ini, bahkan istilah negara (*dawlah*) pun tidak dapat ditemukan di dalam al-Qur'an. Meskipun terdapat berbagai ungkapan dalam al-Qur'an yang merujuk atau seolah-olah merujuk pada kekuasaan politik dan otoritas, akan tetapi ungkapan-ungkapan ini hanya bersifat incidental dan tidak memiliki pengaruh bagi teori politik. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa pendapat seperti ini juga mengakui bahwa al-Qur'an mengandung, “nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etismengenai aktivitas social dan politik umat manusia.” Ajaran-ajaran

⁶ ⁴⁵ Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam as the Basis of State: A Study of Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, (Disertasi Doktor di Universitas Chicago, 1983), h. 23

⁴⁶ Muhammad Iamarah, *Al-Islam wa al-Sultah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Thaqifah al-Jadidah, 1997), h. 76-77. Dikutip dari Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara*, h. 13

ini mencakup prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.”⁴⁷ Untuk itu bagi kalangan yang berpendapat demikian, sepanjang negara perbegang pada prinsip-prinsip seperti itu, maka mekanisme yang diterapkannya adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan kata lain, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertian yang formal dan ideologis adalah tidak begitu penting.⁴⁸

6 Model teoritis politik Islam yang pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas, merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealism politik Islam. Kecenderungan seperti ini ditandai dengan keinginan untuk menerapkan *Syari'ah* secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini memiliki potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modern. Sebaliknya, aliran dan model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, dimana negara bangsa merupakan salah satu unsur utamanya.

Selain dua kategori yang tampak kontradiktif tersebut ada juga kategori teoritis yang membagi hubungan Islam dan negara dalam tiga kategori. Dalam tulisannya tentang usaha pencarian konsep negara dalam sejarah pemikiran politik Islam, Din Syamsuddin (1993) memunculkan tiga paradigma pemikiran dalam politik Islam.⁴⁹ Paradigma yang *pertama*,

6
⁴⁷ Ahmad Syafii Maarif, *Islam as the Basis of State*, h. 33

⁴⁸ Para pendukung pemikiran ini antara lain, pemikir Mesir Muhammad Husein Haikal, pemikir Pakistan Fazlur Rahman dan Qamarudin Khan, serta pemikir Indonesia seperti Nur Kholis Madjid.

⁴⁹ Din Syamsuddin, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Ulumul Qura'an No. 2 Vol. IV. Tahun 1993

disebut "paradigma integralistik" yang mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*scheiding van kerk en staat/al-din wal-daulah*) karena apa yang merupakan wilayah agama, juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Menurut pemikiran ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Illahi" (*divine sovereignty*), karenanya pendukung pemikiran ini menyakini bahwa kedaulatan yang sebenar-benarnya berasal dari Tuhan dan berada di "Tangan Tuhan". Kedaulatan Tuhan dilaksanakan oleh sebuah otoritas yang yang menjadi wakil Tuhan di dunia. Pemahaman ini misalnya dianut oleh kelompok Syi'ah yang kemudian diterapkan secara konseptual melalui konsep *wilayatul faqih* pasca revolusi yang dipimpin oleh seorang toko suci seperti Ayatullah. Kelompok Hizbut Tahrir yang menkampanyekan konsepsi "Khilafah" representasi kekuasaan Allah terhadap dunia Islam, dan kelompok fundamentalis Jama'at Islami di Pakistan sebagai juga mengusung paradigma integralistik ini. Paradigma integralistik mewakili cara pandang islamisme klasik yang menuntut model politik teokrasi, dimana Sultan, Khalifah, atau Raja adalah perwakilan Tuhan. Model ini mendekati spectrum formal legalistik, sebagaimana yang diperkenalkan Bahtiar Efendi sebelumnya.

Kedua, paradigma sekularistik yang mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, pandangan sekularistik menolak pendasaran negara kepada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu negara. Pandangan ini dimotori oleh Ali Abdurraziq dari Mesir pada tahun 1960-an dan diamalkan secara sungguh-sungguh oleh Mushtafa Kemal Attaturk ketika berkuasa di Turki pada dekade 20-an. Attaturk secara dramatis "memenjarakan" agama di ruang-ruang privat dan mengatur secara ketat simbol-simbol keagamaan dalam politik. Negara Turki moderen menjelma menjadi negara sekuler, untuk menegaskan mimpi-mimpi

Attaturk mengejarkan ketertinggalan Turki dari dunia Barat yang semakin moderen. Turki mencoba meniru pandangan serupa yang sudah lama berkembang di dunia barat, pasca konflik berkepanjangan antara agama dan negara di masa-masa abad kegelapan. Sekularisme menandai perkembangan Eropa moderen, dalam melahirkan sejumlah negara bangsa. Dalam kajian politik Islam, terdapat Ali Abdur Razik yang mendukung paaradigma sekularistik ini. Menurut Ali Abdur Razik, bila kita mengkaji secara rasionall Al-Qur'an maka tidak ada perintah yang jelas tentang perlu mendirikan sebuah kekuasaan politik atas nama agama. Otoritas agama dan negara (politik) perlu dipisahkan (sekuler) agar negara diatur atas dasar rasionalitas dan kepentingan publik.⁵⁰

Menurut Peter L. Berger berarti “sebuah proses dimana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan.”⁵¹ Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Eropaselain Perancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja dan sebagainya. Bahkan sebagaimana dikatakan Alfred Stepan kini

⁵⁰ Lihat Ali 'Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushulul al-Hukm*, terj. M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002), h. 77-94.

⁵¹ Lihat Gergely Rosta, *Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe*, dalam [alamhttp://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm](http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm).

3 masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja (established church) dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, Yunani dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia).⁵²

Sekularisasi politik juga terjadi dalam konteks modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara Muslim. Dalam kaitan dengan hal ini Donald Eugen Smith beberapa dekade lalu mengatakan, bahwa sebenarnya sekularisasi politik dan pelibatan agama dalam politik ini berjalan secara simultan. Namun menurut dia, sekularisasi ini betul-betul merupakan proses yang lebih mendasar, dan hal ini lambat laun akan melenyapkan fenomena partai politik dan ideologi keagamaan.⁵³ Sekularisasi politik dalam hal-hal tertentu dan tingkat tertentu memang terjadi di negara-negara Muslim, seperti pembentukan lembaga-lembaga negara modern sebagai perwujudan sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan keagamaan, pembentukan partai-partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan sebagainya. Bahkan proses sekularisasi secara terbatas juga terjadi di negara-negara agama (religious states), yang mengintegrasikan agama dan negara seperti Arab Saudi dan Iran, dengan melegislasi aturan-aturan operasional tertentu yang awalnya berasal dari negara-negara Barat sekuler, seperti peraturan hukum tentang perdagangan internasional, imigrasi, dan sebagainya.

Namun dalam kenyataannya, umat Islam tetap memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meski negara itu telah melakukan modernisasi dan sekularisasi politik bersamaan dengan proses globalisasi. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam

3
⁵² Alfred Stepan, *The World's Religious Systems and Democracy: Crafting The "Twin Tolerations"*, dalam [https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project Manager - Constitution Process - Governance.EML/](https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project%20Manager%20-%20Constitution%20Process%20-%20Governance.EML/), h. 6-7.

⁵³ Donald Eugen Smith, *Religion and Political Development* (Boston: Little Brown and Company, 1970), h. 124.

3 itu sendiri, yang tidak hanya merupakan sistem teologis, tetapi juga cara hidup yang berisi standar etika moral dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan negara. Islam tidak membedakan sepenuhnya antara hal-hal sakral dan profan, sehingga Muslim yang taat menolak pemisahan antara agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi yang terjadi di negara-negara Muslim umumnya tidak sampai menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Bahkan adopsi sistem sekuler, seperti sistem demokrasi dan penegakan hak asasi manusia, dalam banyak hal dilakukan dengan pemberian legitimasi keagamaan melalui ijtihad dan penyesuaian-penyesuaian tertentu.⁵⁴ Tanpa legitimasi ini, ide-ide atau “sistem sekuler” itu tidak akan mendapat dukungan sepenuhnya dari warga yang mayoritas beragama Islam. Ijtihad ini merupakan bagian dari modernisasi pemahaman keagamaan (modernisme Islam) agar ajaran-ajaran Islam tetap kompatibel dengan perkembangan masyarakat modern tanpa menyalahi ajaran-ajaran Islam yang bersifat mendasar dan absolut (qath’i).

Menguatnya kembali orientasi keagamaan dan penolakan terhadap sekularisme telah menjadi fenomena di seluruh dunia Islam sejak akhir dasawarsa 1970-an, terutama karena semakin tingginya tingkat pendidikan umat Islam sehingga memunculkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang karakteristik ajaran Islam yang memang tidak memisahkan antara agama dan negara. Bahkan sejak dasawarsa 1980-an, kebangkitan agama dalam bentuk desekularisasi politik dan sosial cukup nampak di negara ini sebagai tandingan (counter) terhadap proses sekularisasi politik tersebut.⁵⁵

3
⁵⁴ Tentang legitimasi keagamaan terhadap demokrasi, misalny, lihat Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-1993*, (Hamburg: Abera Verlag, 397).

⁵⁵ Hal ini bisa disaksikan di Turki, sebuah negara Muslim yang telah menerapkan sekularisme sebagai ideologi negara se3 tahun 1924. Namun sejak dua dasawarsa lalu, umat Islam Turki dengan berbagai cara berupaya memiliki kembali orientasi keagamaan, meski militer dengan cara keras dan represif melakukan pembentengan terhadap ideologi sekularisme dari “rongrongan” agama.

³ Kecenderungan desekularisasi ini ternyata tidak hanya terjadi dunia Islam, tetapi juga di banyak negara di dunia, termasuk di Amerika Serikat, karena manusia tetap membutuhkan nilai-nilai spiritual, meski mereka hidup dalam masyarakat modern yang menjunjung rasionalitas. Karena kenyataan itulah sosiolog terkemuka, Peter L. Berger pada akhir dasawarsa 1990-an menolak teori “secularization”, dan sebaliknya mengemukakan teori “desecularization of the world”. Hal ini terjadi karena dalam kenyataannya proses sekularisasi itu menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan tandingan sekularisasi yang kuat (powerful movements of counter-secularization).[9] Jadi teori ini merupakan revisi terhadap teorinya sendiri tentang sekularisasi yang dikemukakan pada akhir dasawarsa 1960-an.[10] Hanya saja, perlu dibedakan antara desekularisasi dalam konteks negara (politik) dan desekularisasi dalam kehidupan masyarakat. Di negara-negara Barat fenomena desekularisasi ini umumnya terjadi dalam konteks kehidupan masyarakat, sementara negara masih tetap mendukung sekularisme, walaupun sebagian warga menuntut penghapusan sekularisme.

Ketiga, paradigma simbiotik yang mengajukan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan secara timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama karena dengan agama, negara mengumpulkan legitimasi dan otoritas untuk melangkah dalam bimbingan etika dan moral. Dalam negara yang menganut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara (politik) merupakan sebuah hubungan yang saling mempengaruhi, saling mengisi bahkan juga saling mengkoptasi.⁵⁶ Masyhuri Abdullah menyebut paradigm simbiotik sebagai model *intersectional* atau persinggungan antara agama dan negara. Dalam

⁵⁶ Bachttiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta; Paramadina. 1996)

konteks ini ³ eksistensi agama dalam kehidupan bernegara (politik) diwujudkan terutama dalam bentuk pengakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama.⁵⁷

Pemikir Pakistan Mohammad Iqbal, pernah mencoba memperjelas ideologi politik Islam dengan membedakan antara “Politik Islam” dengan “Islam Politik”. Politik Islam adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan dengan berporos pada nilai-nilai keadilan yang universal. Artinya perjuangan politik Islam tidak selalu harus berbentuk partai politik atau harus menggunakan simbol politik Islam. Pandangan ini mirip dengan gagasan *Islam Yes, Politik Islam No* yang pernah digagas oleh intelektual Islam Indonesia Nurkholis Madjid (1999),⁵⁸ yang pernah mengkritik kelompok Islam politik yang suka menggunakan simbol-simbol Islam untuk kepentingan meraih kekuasaan, yang sejatinya menjauhkan Islam dari nilai-nilai universal yang terkandung didalamnya.⁵⁹ Dalam perspektif “Islam politik” kekuasaan politik diperlukan untuk menjamin berjalannya nilai-nilai ideal Islam dalam politik. Maka penting bagi umat Islam untuk menguasai sistem kekuasaan politik, bahkan membangun negara berdasarkan ideologi Islam untuk memastikan pemberlakuan system Islam (*syariah*) dijalankan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa,

⁵⁷ Masykuri Abdullah, “Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi,” dalam *Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 13 No. 2, Juli 2013, h. 247-25.

⁵⁸ Nurkholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi* (Cet I). (Jakarta: Paramadina, 1999)

⁵⁹ Pemikiran Muhammad Iqbal bisa dibaca dalam tulisan Iqbal Singh Sevea, *The Political Philosophy of Muhammad Iqbal; Islam and Nationalism in Late Colonial India*. (Cambridge University Pres)

bernegara dan bermasyarakat. Penggunaan istilah politik Islam dan Islam politik tersebut tampak membingungkan dalam kehidupan politik praksis, juga dalam kajian politik. Sebab politik Islam maupun Islam politik yang sengaja dibedakan itu, merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Namun dalam prosesnya juga tidak jarang menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana Politik Model Islam.⁶⁰

Pada perkembangan lebih lanjut Islam politik lebih sering disebut sebagai “Islamisme.” Secara konseptual, istilah Islamisme sendiri merupakan “deskripsi Barat” yang mencoba menjelaskan tentang bentuk-bentuk aktivisme Islam yang muncul pada seperempat awal abad ke-20.⁶¹ Dalam pemaknaannya, Islamisme dicirikan oleh empat hal: *pertama*, mengusung kebangkitan Islam sebagai basis reformasi masyarakat; *kedua*, memahami Islam sebagai ideologi; *ketiga*, memiliki tujuan mendirikan sistem Islami atau negara Islam (*al-nizham al-Islami*); *keempat*, sistem politik negara adalah penerapan syariah (berdasar pada hukum Islam) atau dalam bahasa yang lain adalah upaya formalisasi syariah dalam kehidupan bernegara.⁶²

Oleh Hasan Al-Banna, gerakan Islam yang selalu berpandangan bahwa Islam adalah bagian integral dalam politik atau negara disebut dengan “Islamiyyah” (Islamiyah). Para Islamiyah disebut “Islamiyyun”, sedangkan

⁶⁰Nasiwan, *Geliat Islam dalam Pentas Politik Indonesia Kontemporer, Kalimantan Barat: Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat (LP SER, 2003)*, h. 101

⁶¹ Oliver Roy (1994), *op.cit.*, h. 15, tercatat sudah menggunakan istilah “Islamisme” untuk menyebut gerakan Islam yang berorientasi pada perubahan dasar umat Islam dan perilaku dan pandangan politik yang tujuannya adalah memberlakukan syariat Islam sebagai dasar negara.

⁶²Lihat Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. “Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey”. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, *PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki* (Jakarta, Komunitas Bambu), h. 5.

11 pengikut Islamisme disebut “Islamis”. Islamiyah dalam makna mutakhir (kontemporer) sebagaimana diperkenalkan para sarjana Barat yang mempelajari Islam dan fenomena gerakan-gerakan fundamentalisme Islam, sepadan dengan istilah atau konsep “Islamisme” (Islamism). Sejak itu, konsep Islamisme digunakan untuk mengidentifikasi fenomena gerakan Islam kontemporer yang memandang Islam sebagai ideologi politik, termasuk yang membawa kecenderungan neo-fundamentalisme yang sangat peduli pada syariat Islam.⁶³ Gerakan-gerakan fundamentalis bahkan radikal dan melahirkan aksi-aksi kekerasan dalam bentuk terorisme, memiliki koneksi ideologi yang kuat dengan Islamisme, meskipun dalam artikulasinya tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan.

11 Dalam pandangan lain, Islamisme diartikan sebagai sebuah keyakinan bahwa Islam memiliki seperangkat norma atau ajaran yang komprehensif dan unggul, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk ketertiban atauran sosial.⁶⁴ Dimanapun kaum Islamis berusaha mengganti aturan sosial-politik yang ada dengan norma atau ajaran yang didasarkan tafsir tertentu atas ajaran Islam. Usaha-usaha tersebut bisa ditempuh melalui aksi-aksi atau gerakan damai ataupun kekerasan tergantung oleh sistem nilai yang diyakini oleh aktor-aktor gerakan Islamis tersebut. Lebih lanjut, Islamisme (orientasi politik Islamis) merupakan sesuatu yang krusial dalam mendefinisikan sejauhmana seorang muslim di anggap Islamis atau tidak. Beberapa ahli tentang masyarakat muslim, seperti Lewis dan Gellner, ataupun sarjana ilmu politik, seperti Huntington dan Kedourie, mencoba membuktikan bahwa Islamisme merupakan hal universal bagi kaum Muslim. Salah satu cara untuk mengukur kadar Islamisme adalah dengan melacak

⁶³ Hal yang sama juga bisa dibaca dalam ulasan Syahrul Karim dan Samsu Udabi Mamat, *Islamisme dan Demokratisasi di Indonesia Pasca-Reformasi: Analisis Sosio Politik*, Jurnal Sulesana Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012.

⁶⁴ Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS*, h. 48

¹¹ bagaimana para ideolog Islamis mendefinisikan Islam sebagai Ideologi sosial politik. Maka dalam pandangan Antonio Bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason (2008), ¹¹ tujuan akhir Islamisme itu sendiri adalah pendirian negara atau sistem Islam.⁶⁵ Meskipun demikian, gerakan Islamisme itu sendiri tidaklah monolitik. Ada beberapa faksi di dalam Islamisme, tapi tujuannya sama, yakni mendirikan negara Islam, atau setidaknya sistem yang berdasarkan ideologi Islam.

Intelektual Muslim lainnya seperti Bassam Tibi (2012), mengembangkan pandangan Islamisme untuk mengidentifikasi ideologi yang menghubungkan *din* (agama) dengan *daulah* (negara) dalam tatanan politik berbasis syariat. Tibi mengkritik mereka yang mengusung politik Islam atau Islam politik atau Islamisme tersebut. Bagi Bassam Tibi, Islamisme adalah respon politik dan budaya terhadap krisis atas kegagalan pembangunan pascakolonial di berbagai masyarakat Islam yang berada di bawah kondisi globalisasi. Kondisi ini mendorong kelompok Islam mereproduksi wawasan politik klasik yang hendak mendirikan negara Islam, atau negara berdasarkan prinsip-prinsip keislaman.⁶⁶ Sebagaimana diperlihatkan oleh gerakan politik seperti Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tarhbir. Partai-partai Islam yang memperjuangkan ideologi politik Islam yang hendak mendirikan negara Islam, negara dengan sistem syariah bisa digolongkan kedalam kelompok Islamisme ini. Basam Tibi tampaknya melanjutkan pemikiran Muhammad Iqbal, Muhammad Abduh, Ali Abdurraziq, Nurkholis Madjid, dan pemikir beraliran modernis lainnya yang memisahkan Islam sebagai agama dan Islam sebagai politik, sebab Islam politik dilihat sebagai praktik yang mendistorsi Islam, dari nilai-nilai universal menjadi nilai-nilai particular. Bahkan secara

¹¹ Anthony Bubalo, Greg Fealy dan Whit Mason, "Zealous Democrat, Islamism and Democratic in Egypt, Indonesia and Turkey", dalam M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, (Jakarta: PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2014)

⁶⁶ Lihat ulasan lengkap Bassam Tibi, *Islamisme* (terj). (Bandung: Mizan, 2012).

lebih tegas bisa dikatakan bahwa Islamisme hanyalah wujud lain dari kegagalan gerakan Islam berdialog dengan modernisasi.

Sejak Bassam Tibi mempopulerkan konsep “Islamisme” melalui bukunya, telah ada banyak kritik yang diajukan kepadanya terutama karena kategorisasi yang dibuat Bassam Tibi, dianggap terlalu simplistic dan cenderung ketat, yang sangat sulit menggambarkan keseluruhan kehidupan politik Islam yang cenderung dinamis dan kompleks. Perubahan-perubahan yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok politik Islam yang paling radikal sekalipun, cenderung melakukan transformasi-trnsformasi politik untuk memperoleh dukungan public. Partai Islam seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir berusaha masuk kedalam sistem politik demokratis, dan mengembangkan berbagai gagasan progresif, meskipun akhirnya berhasil digulingkan oleh militer Mesir yang memanfaatkan kecurigaan para pengkritik Islamisme seperti Hasan Tibi. Demikian juga beberapa gerakan Islam lain seperti PAS di Malaysia atau bahkan Hisbullah di Libanon yang terus mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Gerakan Islamis kontemporer tidak memiliki wajah yang tunggal sebagaimana digambarkan oleh para teoritis, Islamisme harus dipahami secara komprehensif dengan mengkaitkannya pada sejumlah variable lain. Maka tawaran Post-Islamisme yang dikembangkan Asif Bayat sejak beberapa tahun terakhir bisa membantu untuk mencermati bagaimana perkembangan kontemporer gerakan-gerakan Islam dewasa ini.

C. Era Post-Islamisme dan Artikulasi Ideologi Politik Islam

Jika kita menyimak perkembangan politik Islam kontemporer atau paling tidak di Indonesia dan Turki, justru memperlihatkan sebuah upaya yang berbeda sebagaimana digambarkan para teoritis “Islamisme” yang telah dijelaskan di atas. Ada upaya memunculkan ideologi politik Islam, atau

term lainnya seperti Islam politik atau Islamisme dengan model yang lebih lentur dan kompromistis. Model yang mengkompromikan Islamisme dengan tuntutan-tuntutan politik dan praksis demokrasi modern, seperti negara bangsa, kebebasan, partisipasi, kedaulatan rakyat dan lain-lain. Fenomena ini sudah dapat diidentifikasi sejak tahun 1990, pasca revolusi Islam yang berlangsung di Iran, dimana kekuatan-kekuatan ideologis politik Islam diperhadapkan dengan berbagai tantangan perubahan social dan isu-isu moderenis seperti demokratisasi, hak asasi manusia, partisipasi kaum perempuan, hingga sebuah sistem politik yang memberi tempat yang luas bagi berbagai kelompok minoritas dalam suatu negara Islam. Pokoknya kekuatan-kekuatan politik Islam dituntut untuk menampilkan sebuah pandangan ideologi politik yang diharapkan mampu berdialog dengan berbagai tantangan modernisasi yang dihadapi umat Islam kontemporer.

Asif Bayat (2013) yang melakukan penelitian panjang di Iran dan Mesir sejak tahun 1970-an hingga akhir tahun 2000-an menyebut gerakan-gerakan baru dalam ideologi politik Islam dengan mempertimbangkan semangat demokrasi dan modernisasi sebaga fenomena Pos-Islamisme. Artikulasi ideologi politik Islam yang terus mencari bentuk yang sesuai dengan langgam politik dan perubahan yang terjadi di masing-masing negara.⁶⁷ Partai politik Islam yang tidak menyesuaikan dengan berbagai tuntutan keterbukaan dan demokratisasi cenderung akan ditinggal dalam dinamika politik di masing-masing negara Islam. Hal ini yang menjelaskan mengapa partai politik Islam yang masuk kedalam sistem politik demokratis di sejumlah negara Islam, justru berhasil memperoleh dukungan politik signifikan. Bayat berusaha menunjukkan contoh yang konkrit di Mesir dan Iran dengan faktor-faktor pembentuk Post-Islamisme yang ditandai dengan

⁶⁷ Asif Bayat, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. (New York: Oxford University Press, 2013), h. 3

pergeseran dari Islamism ke Post-Islamisme. Post-Islamisme atau pasca-Islamis merupakan koreksi atas kegagalan gerakan Islamisme dan secara konseptual merupakan suatu upaya sadar untuk membangun rasionalitas dan modalitas strategis membatasi gerakan Islamisme yang eksklusif di wilayah social, politik dan intelektual.⁶⁸ Dalam pandangan Bayat, Post-Islamisme menghindari formalisasi syariat Islam dan lebih menunjukkan kompatibilitas Islam dengan wacana-wacana demokrasi yang universal, namun disisi yang lain masih tetap berusaha mempertahankan identitas keislaman.⁶⁹ Atau seperti yang dikemukakan Bayat secara konseptual dalam bukunya,

“.....post-Islamisme adalah sebuah upaya sadar untuk membangun konsep rasionalitas dan modalitas secara strategis untuk membatasi gerakan Islamisme di area social, politik, dan intelektual. Post-Islamisme bukanlah ideologi yang anti Islam atau sekuler, ataupun non-Islam. Tetapi lebih dari itu ia mewakili upaya meleburkan keagamaan dan hak, iman dan pembebasan, Islam dan Kebebasan. Ia merupakan upaya membalik prinsip-prinsip dasar Islamisme di atas kepalanya sendiri dengan mengedepankan hak-hak daripada tugas dan kewajiban, menjunjung pluralitas dari dera suara otoritatif tunggal, mengaskan kesejarahan kibat suci, dan untuk selalu menatap masa depan dibalik masa lampau. Ia berjuang untuk mensinergikan Islam dengan pilihan dan kebebasan individu, demokrasi dan modernitas (hal yang menjadi penekanan post-Islamisme) untuk menggapai sebuah modernitas alternatif.”⁷⁰

Kunci dari pos-Islamime Bayat adalah mensinergikan Islam dengan demokrasi dan modernisasi yang menjadi tantangan umat Islam dewasa ini. Islam hendak dipandang sebagai kerangka etis yang seharusnya *compatible* dengan tuntutan politik kontemporer. Berbagai bentuk formalisme Islam

⁶⁸ Asif Bayat, *Making Islam Democratic; Social Movement and the Post-Islamist Turn* (Stanford; Stanford University Press, 2007), h. 9-11

⁶⁹ Lihat Anthony Bubalo, dkk., “Zealous Democrat, Islamism and Democratic in Egypt, Indonesia and Turkey”, dalam M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, (Jakarta: PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2014), h. 22

⁷⁰ Asif Bayat, *Making Islam Democratic; Social Movement and the Post-Islamist Turn*, Terj. Faiz Tajul Millah, *Pos Islamisme* (Yogyakarta: 2011), h. 20

hanya akan membatasi fleksibilitas Islam dengan berbagai persoalan social politik yang dihadapinya. Seperti yang dijelaskan Asif Bayat, adalah keliru dan tidak relevan mempertanyakan “apakah Islam sesuai dengan demokrasi,” Persoalannya bukan terletak pada “sesuai tidaknya” Islam dan demokrasi, tetapi bagaimana proses adaptasi yang dilakukan oleh umat Islam, terutama partai politik Islam sehingga ide demokrasi bersesuaian dengan realitas umat yang ada.⁷¹ Pandangan dunia (*worldview*) yang dianut oleh kaum Islamis tidak serta-merta harus dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi –seperti selama ini diklaim oleh para ideolog mereka. Akan tetapi, terdapat kritisisme yang didasarkan pada sebuah upaya pencarian solusi mengatasi defisit sosial-ekonomi-politik yang disebabkan oleh ekspansi kapital negara-negara Barat sejak era imperialisme. Gerakan sosial dan politik di dua negara yang menjadi subjek penelitian Bayat, Mesir dan Iran, memiliki adanya upaya dan pendekatan berbeda dalam mengartikulasikan “Islamisme.”

Catatan kritis yang mungkin disampaikan kepada Asif Bayat, bahwa konsep post-Islamisme yang dikemukakannya justru tidak bisa diidentifikasi secara tepat dan jelas di Mesir dan Iran yang selama satu dekade menjadi lokus penelitiannya. Atau lebih tepatnya gerakan politik post-Islamisme seperti yang digambarkan Bayat, cenderung mengalami kegagalan di kedua negara tersebut karena berbagai sebab yang kompleks. Gerakan-gerakan Islam di Iran lebih memilih “serangan frontal” atas simbol-simbol kekuatan Islam yang diinterpretasikan oleh negara, sementara Mesir lebih menggunakan “cara reformis” atau “perang posisi” –meminjam wacana Gramscian— vis-à-vis negara.⁷² Akibat kedua negara tersebut tidak bisa

⁷¹ Asif Bayat, *Making Islam Democratic; Social Movement and the Post-Islamist Turn*, Terj. Faiz Tajul Millah, *Pos Islamisme* (Yogyakarta: 2011), h. 12

⁷² Asif Bayat, *Making Islam Democratic; Social Movements and the Post-Islamist Turn*, h. 76

merepresentasikan secara tepat fenomena post-Islamisme dalam konteks yang lebih relevan dengan perkembangan yang ada.

Fenomena Islam di Indonesia dan Turki dalam beberapa tahun terakhir justru lebih bisa menggambarkan penjelasan Asif Bayat tentang post-Islamisme. Kasus Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) di Turki dan PKS di Indonesia bisa membantu memperjelas gagasan post-Islamisme tersebut. Meskipun AKP tetap membawa ideologi politik Islam, namun tidak berorientasi mengubah ideologi sekuler Turki, sehingga Militer Turki sebagai kekuatan politik tradisional penjaga sekularisme-Kemalisme tetap merasa nyaman. Demikian juga kelompok politik Islam yang terus mencoba membangun tangga untuk menuju puncak kekuasaan seperti yang diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia. Keberhasilan kedua partai politik Islam tersebut, yang tetap mengusung ide-ide politik Islam, namun secara inovatif mencoba mengartikulasikan secara berbeda sesuai perkembangan masyarakat dan lanskap politik nasional di masing-masing negara Islam, bisa menjadi bahan kajian menarik dalam konteks post-Islamisme.

Berbeda halnya dengan Islamisme yang memaksakan *Islamic-State* atau teokrasi, Pos-Islamisme menolak sekularisme yang memusuhi agama, namun juga menolak gagasan teokrasi yang mendorong formalisme agama secara jelas dalam kehidupan betnegara. Bayat juga menyatakan bahwa revolusi di Arab adalah sebuah Revolusi Pos-Islamis karena walaupun *an-Nahdah* (gerakan Kebangkitan) di Tunisia dan *Ikhwanul Muslimin* di Mesir terlibat di dalam revolusi Arab tersebut, kelompok-kelompok Islamis itu tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya yang menggerakkan revolusi tersebut dan mereka juga tidak mendorong terbentuknya teokrasi atau Negara Islam seperti di Iran. Berikut tabel komparasi antara ideologi Neo-fundamentalis, Islamis, Pos-Islamis:

Komparasi antara Neo-fundamentalisme, Islamisme dan Pos-Islamisme

Neo-fundamentalisme	Islamisme	Pos-Islamisme
Neo-fundamentalisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam yang secara parsial mengkhhususkan pada pemurnian tata cara ritual peribadatnya saja dan menjauhi politik (apolitis dan anti demokrasi)	Islamisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama dan mengajarkan tentang <i>syumuliyatul Islam</i> yakni bahwa tidak ada satu aspek kehidupanpun yang tidak tersentuh aturan Islam.	Pos-Islamisme adalah juga sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam dan juga mengajarkan tentang <i>syumuliyatul Islam</i> yakni bahwa ajaran Islam meliputi pula semua aspek kehidupan.
Neo-fundamentalisme merupakan sebuah aliran pemikiran hasil gabungan dari westernisasi, individualisme, kesenjangan antargenerasi, krisis sosial dan sikap keberagamaan yang emosional, sehingga tidak menekankan aspek intelektualisme.	Islamisme merupakan gerakan global yang berupaya mewujudkan negara Islam (<i>Daulah Islamiyah</i>) atau teokrasi melalui kontestasi di dalam sistem demokrasi di negaranya masing-masing. Kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir haruslah terwujudnya <i>Islamic State</i> dan tegaknya syariah Islam.	Pos Islamisme juga merupakan gerakan global yang menekankan aspek substantif sehingga menganggap <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Pos-Islamisme mengusung konsep masyarakat Madani.
Neo-fundamentalisme merupakan gerakan yang bersifat global menolak baik budaya Muslim yang dianggap bid'ah maupun budaya Barat modern yang dianggap sesat.	Kelompok Islamis menyuarakan pesan-pesan moral secara eksplisit dalam bentuk jargon-jargon politik. Mereka dianggap cukup eksklusif dan sulit menerima perbedaan.	Kelompok Pos-Islamis menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktivis dan pemimpinnya.
Kelompok Neo-fundamentalis dianggap paling eksklusif dan paling sulit menerima perbedaan. Mereka bergerak dalam skala internasional dan mengedepankan <i>transnational-ummah</i> serta menolak demokrasi karena dianggap sistem kafir.	Kelompok Islamis menerima demokrasi dan melakukan perjuangan politik melalui kontestasi Pemilu Islamisme diinisiasi oleh gerakan Islam <i>mainstream</i> Ikhwanul Muslimin (IM) Contoh kelompok-kelompok Islamis adalah gerakan Tarbiyah di Indonesia yang menjadi PK, gerakan Milli Gorus menjadi Partai Refah	Kelompok yang mengusung Pos-Islamis paling inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan keberagaman. Kelompok Pos-Islamis menerima demokrasi dan mengikuti Pemilu Partai-partai politik Islamis tersebut (AKP, PKS, FIS) kemudian berevolusi menjadi partai Pos-Islamis di awal abad

Contohnya adalah Hizbut Tahrir (berpusat di Yordania), dan Salafiy (Saudi Arabia)	yang Islamis, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia. <i>Front Islamic du Salut (FIS)</i>	ke-21.
---	---	--------

Ket: Disadur dari Citaresmi S. Soekanto, 2012

Jika, kita mencermati konsep-konsep kunci dari Post- Islamisme yang ditawarkan Asif Bayat, maka aka segera ditemukan beberapa kata kunci seperti; historisitas kitab suci, demokrasi sebagai penyokong sistem politik, Islam yang lebih inklusif yang ramah pada keragaman, dan penghormatan pada hak asasi manusia. Bila diperhatikan secara seksama kata-kata kunci di atas, maka post-Islamisme yang dikemukakan Bayat bukan merupakan suatu konsepsi yang benar-benar baru dalam kajian ideologi politik Islam. Ilmuwan Muslim Indonesia seperti Nur Kholis Madjid, misalnya, sejak tahun 1970-an telah menawarkan Islam inklusif, atau Islam actual yang mencoba memberi tafsir yang lebih sesuai dalam membangun hubungan yang saling melengkapi antara Islam dan modernitas.⁷³ Catatan positif dari teori pos-Islamisme Bayat adalah mendudukan kembali kajian ideologi politik Islam, setelah sekian lama didera oleh Islamisme dan ketegangan yang tidak usai dengan modernisasi. Itulah mengapa kajian ini mencoba memanfaatkan kerangka teoritis Pos-Islamisme untuk melihat aksi-aksi PKS di Indonesia dan AKP di Turki.

Maka dalam kerangka teoritik Post-Islamisme, partai politik Islam di Indonesia dan Turki justru bisa mewakili apa yang digambarkan Bayat sebagai fenomena post-Islamisme, ketimbang apa yang ditemukan Bayat di

⁷³ Lihat polimik tentang pidato kebudayaan Nurcholis Madjid, "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat," dalam Nurcholis Madjid (et.all), *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Islamic Research Center, 1970). Pembahasan yang sama juga bisa dilihat pada Nurcholis Madjid, *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987)

Mesir dan dan Iran.⁷⁴ Fenomena partai politik Islam di Indoensia dan Turki memperlihatkan sebuah keyakinan politik yang tidak meninggalkan cita-cita politik Islam, namun bersamaan dengan itu kekuatan politik Islam (Partai Islam), mencoba mengartikulasikan ideologi politik Islam sesuai dengan semangat zaman, terutama konteks-konteks lokal dimana partai politik tersebut berada. Hal ini bisa dilihat dari kompromi dan consensus politik yang dilakukan, atau program aksi dan gerakan politik yang diperagakan partai politik. Fenomena ini tampaknya bisa menggambarkan praktik berideologi Partai Islam seperti AKP di Turki dan PKS di Indonesia. Hipotesis awal dari peneliti adalah kedua partai ini masih tetap memelihara cita-cita politik Islam, namun mereka tidak memaksakan kehendak dan ideologi politik masing. AKP dan PKS (terutama AKP) berhasil mendapatkan apresiasi dari masyarakat Muslim yang sedang beranjak moderen namun tetap menginginkan adanya jaminan kehidupan spiritual. Pendekatan post-Islamisme tampaknya bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena baru ideologi partai politik Islam yang mungkin belum disadari oleh kekuatan partai politik Islam itu sendiri.

⁷⁴Asif Bayat sendiri dalam kajiannya sudah meyakini bahwa fenomena post-Islamisme akan terus berkembang dalam masyarakat Muslim dunia, sebagai ganti atas kegagalan Islamisme yang mengundang kecaman dan kritik. Bayat menyebut partai-partai inklusif di Turki berpotensi membuka jalan bagi tumbuhnya post-Islamisme di Turki. Lihat Asif Bayat, *Pos-Islamisme*, h. 25

BAB III
GERAKAN ISLAM TRANS-NASIONAL
DAN KONTEKS PERKEBANGAN POLITIK ISLAM
DI INDONESIA DAN TURKI

Dinamika politik Islam di Turki dan Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari berbagai konteks perubahan yang kompleks, baik yang terkait dengan faktor-faktor internasional yang memiliki pengaruh yang secara langsung terhadap kehidupan social, ekonomi dan politik di masing-masing negara, maupun kontestasi politik internal. Oleh sebab itu pada bagian ini digambarkan dinamika tersebut, dan bagaimana proses demokratisasi yang terjadi di negara-negara Muslim dan bagaimana demokratisasi memberi dampak positif bagi gerakan Islam. Diuraikan pula kondisi sosial politik dan ekonomi Indonesia sebelum era Reformasi serta munculnya gerakan Tarbiyah hingga lahirnya PK (1998) yang kemudian menjadi PKS pada 2003. Demikian pula kondisi sosial politik dan ekonomi di Turki serta munculnya gerakan Islam *Milli Görüş* yang melahirkan partai-partai Islam sejak 1970-an hingga berdirinya AKP pada 2001 diuraikan di bab ini.

A. Angin Demokrasi di Negara-negara Muslim

Sebagaimana diketahui globalisasi yang melanda dunia Islam, turut menyebarkan ide gerakan-gerakan Islam Internasional dengan arus utamanya gerakan Ikhwanul Muslimin yang antara lain juga mengimbas ke Indonesia melalui interaksi global sejumlah tokoh partai politik. Hal ini sebagaimana dicatat Imdadudin Rahmat (2005), bahwa beberapa partai Islam di dunia

seperti PKS di Indonesia, PAS di Malaysia, Hizbullah di Libanon, demikian juga pada PKS di Indonesia dan AKP di Turki.⁷⁵

Ketika tokoh utama PKS seperti Hilmi Aminuddin menjalani studi di Saudi Arabia, ia berinteraksi dengan pandangan-pandangan Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan Hasan Al-Bana di Mesir. Hal ini secara langsung mengilhaminya untuk mendirikan gerakan Tarbiyah pada tahun 1980. Pandangan-pandangan Islamis Ikhwanul Muslim juga juga mengimbas ke negara Islam lain seperti Turki, melalui persentuhan Tokoh Islamis Turki Nechmetin Erbakan. Meskipun Erbakan tidak menjalani studi secara intensif di Timur Tengah dan merasakan interaksi secara langsung dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin (IM), namun ia mengikuti dengan seksama gerakan tersebut dan banyak sisi mempengaruhi pandangan Nechmetin Erbakan, baik selama studinya di Jerman maupun ketika kembali ke Turki. Erbakan kemudian mendirikan gerakan *Milli Görüş* atau pandangan kebangsaan pada tahun 1969 yang dikemudian hari melahirkan banyak sekali partai politik.⁷⁶

Terbukanya demokratisasi di era Reformasi 1998 di Indonesia memunculkan animo yang besar di kalangan aktivis Islam untuk mendirikan partai politik Islam, meski perolehan partai-partai Islam secara keseluruhan hanya mencapai 39% ketika itu. Bahtiar Effendy (2006) menyatakan persepsi bahwa demokrasi secara otomatis akan menyebabkan keunggulan partai politik Islam di negara mayoritas Muslim ternyata tidak terbukti di dalam sejarah politik Indonesia modern berdasarkan fakta sejak Pemilu 1955, gabungan perolehan suara partai-partai politik Islam selalu lebih

⁷⁵ M. Imdadudin Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, h. 23. Keterangan serupa juga bisa dibaca dalam tulisan Muhammad Ulin Nuha, *Geneologi dan Ideologi Gerakan Radikal Islam Kontemporer di Indonesia*, dalam Jurnal Intelegensia Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2014, h. 25-54

⁷⁶ Sitaremsi Sulitiyawati, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia (1999-2009) dan Adalet ve Kalkinma (AKP) di Turki 2002-2007*, (Disertasi Dotoral di Program Pascasarjana Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012)

sedikit dari perolehan suara partai-partai nasional.⁷⁷ Fakta tersebut menunjukkan bahwa Muslim di Indonesia tidak memiliki aspirasi politik yang tunggal sehingga keyakinan mereka pada agama Islam tidak bisa secara otomatis dikorelasikan langsung dengan pilihan parpol Islam.⁷⁸

Performa partai-partai Islam di Indonesia yang menurun pada pemilu 1999 jika dibandingkan Pemilu 1955 di satu sisi menurut Nurcholish Madjid menunjukkan politik aliran sudah tidak dianggap penting di Indonesia pasca Soeharto. Namun di sisi lain hal itu juga tidak bisa dianggap karena rakyat sudah lebih melihat faktor substansi dan program partai dibanding slogan dan jargon partai. Sebab sebagai kontrasnya juga sangat sulit untuk mengatakan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) di Pemilu 1999 karena faktor substansi dan program partai. Kemenangan tersebut dianggap lebih sebagai bentuk protes rakyat kepada rezim terdahulu yakni Orde Baru (Orba) dengan Megawati sebagai simbol oposisi.⁷⁹

Di tengah kecenderungan deklinasi partai-partai politik Islam, lahirnya Partai Keadilan (PK) dari gerakan Tarbiyah yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap cukup memberikan harapan kemungkinan bangkitnya kembali partai politik Islam di Indonesia. Meskipun performas PK di Pemilu pertamanya pada tahun 1999 baru meraih 1,3% (7 kursi) dan tidak melampaui batas *Electoral Threshold* (ET) 2%. Namun di pemilu 2004, PK yang telah berubah nama menjadi PKS memperoleh peningkatan suara yang sangat signifikan, yakni meningkat menjadi 7,2% (45 kursi) sehingga memungkinkan PKS berhasil membentuk Fraksi sendiri di Parlemen sekaligus memiliki posisi tawar (*bargaining*

12

⁷⁷ Bahtiar Effendy. *Islam and The State in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003) h. 211

⁷⁸ Saidin Ernas, *Artikulasi Ideologi Politik Masyarakat Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Adallah **12** volume 17 Nomo 2, November 2014.

⁷⁹ Bahtiar Effendy. *Islam and The State in Indonesia*. h. 217.

position) untuk menempatkan kader. Selanjutnya di Pemilu 2009, PKS memperoleh 7,8% (57 kursi).⁸⁰

Sejarah partai politik berhaluan Islam di negara Turki yang memiliki konstitusi sekuler pun diwarnai dinamika fluktuasi, namun bukan berupa fluktuasi dukungan suara rakyat melainkan berulang kali harus menghadapi pemberangusan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi (MK). Partai-partai politik berhaluan Islam yang dilahirkan oleh tokoh-tokoh gerakan Islam *Milli Görüş* dianggap melakukan proses Islamisasi sehingga melanggar konstitusi. Dari gerakan *Milli Görüş* pertama-tama lahir *Milli Nizam Partisi* (MNP) atau Partai Keteraturan Bangsa pada awal 1970-an dan tak lama kemudian dibubarkan. Setelah itu Erbakan kembali mendirikan *Millî Selâmet Partisi* (MSP) atau Partai Keselamatan Bangsa dan sempat mengikuti Pemilu serta memperoleh lebih dari 50 kursi namun partai Islam ini kembali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki.

Sebagai gantinya segera didirikan *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan yang berhasil mengikuti Pemilu 1991 dan memperoleh 62 kursi dari 550 kursi. Pada Pemilu berikutnya yakni 1995, *Refah Partisi* bahkan memenangkan Pemilu dengan perolehan kursi sebanyak 158 kursi dan Erbakan menjadi Perdana Menteri serta memimpin pemerintahan koalisi. Namun satu tahun kemudian yakni 1996 terjadi kudeta militer dan *Refah Partisi* dibubarkan. Partai politik baru segera dibentuk lagi yakni *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan dan mengikuti Pemilu 1999 serta masih memperoleh jumlah kursi 111, tetapi pada 1996, *Fazilet Partisi* juga dibubarkan dan Erbakan dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Para penerus Erbakan mendirikan *Saadet Partisi* (SP) atau Partai Kebahagiaan namun hanya memperoleh suara sebesar 2,5% sehingga tidak melewati *Parliamentary Threshold* (PT) 10%. Sementara mantan Walikota Istanbul

⁸⁰ DPP PKS, *Draft Kronologi Sejarah PKS*. (Jakarta, 2008)

yang juga kader Erbakan yakni Recep Tayyip Erdogan mendirikan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan pada 2001 dan langsung mengikuti Pemilu 2002 serta muncul sebagai pemenang dengan 34,26% suara.⁸¹

Kemenangan AKP di Pemilu 2002 mengejutkan kehidupan politik Turki kontemporer karena untuk pertama kalinya sebuah partai dari kelompok Islam dapat membentuk pemerintahan tanpa harus koalisi dengan partai lain. AKP sendiri tidak memunculkan symbol Islam dalam konstitusi maupun lambang Partai karena dilarang konstitusi. Itulah mengapa secara eksplisit AKP tidak menyebut dirinya sebagai partai politik Islam. Namun demikian, AKP secara implisit hadir sebagai partai politik berhaluan Islam bila ditinjau dari akar ideologisnya, aktivitas dakwah Islamnya dan basis massanya Islami yang menjadi pendukung partai tersebut. Fakta historis yang sulit disangkal adalah bahwa AKP merupakan kelanjutan dari mata rantai gerakan Islam: *Milli Görüş* yang didirikan oleh Necmettin Erbakan sehingga menurut Hakan Yavuz⁸² kemenangan AKP dalam Pemilu 2002 merupakan pembuktian hilangnya kepercayaan rakyat pada kubu sekuler karena korup dan tidak mensejahterakan rakyat dan sekaligus restorasi partai politik berhaluan Islam.

Mayoritas Muslim termasuk gerakan Islam arus utama yang juga disebut kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin memandang demokrasi sebagai sistem yang netral dan merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan universal seperti keadilan dan kesejahteraan. Sebaliknya gerakan Islam lainnya seperti Salafy memiliki prinsip apolitis, sementara Hizbut

⁸¹ *Turkiye İstatik Kurumu* (Badan Statistik Turki, 2009), dalam Sitaremsi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia (1999-2009) dan Adalet ve Kalkınma (AKP) di Turki 2002-2007*, (Disertasi Dotoral di Program Pascasarjana Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012)

⁸² M.Hakan Yavuz. *Islamic Political Identity in Turkey* (New York: University Press, 2003), h. 257.

¹ Tahrir (HT) walaupun tidak apolitis memilih tidak masuk ke dalam sistem politik saat ini karena menganggap demokrasi bukan berasal dari Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁸³ ¹² Sebagai jalan tengah di antara umat Islam yang menerima secara utuh maupun yang menolaknya mentah-mentah, Robert W. Hefner menawarkan sebuah sikap kritis dan pengadaptasian demokrasi dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Menurut ¹²nya pula perspektif dialogis lintas budaya antara negara-negara Barat dan negara-negara mayoritas Muslim merupakan cara yang lebih baik untuk memaknai demokrasi modern.⁸⁴

¹ John L. Esposito dari Amerika Serikat meminta negara-negara Barat melakukan otokritik karena memiliki standar ganda dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Esposito menekankan bahwa Barat seharusnya lebih dulu menjalankan nilai-nilai toleransi yang harus tercermin dalam kebijakan negaranya misalnya dengan tidak memaksakan para migran Muslim di Eropa untuk memiliki kultur yang homogen dengan mereka yakni kultur Barat yang bebas nilai. Terlebih lagi *trend* negara global saat ini adalah multikultural sehingga bukan hanya dunia Islam yang perlu memahami dan menerapkan multikulturalisme serta toleran pada pluralitas masyarakat, melainkan Barat yang harus lebih dulu menerapkan nilai-nilai yang diusungnya tersebut. Bila Barat menginginkan agar dunia Islam tidak terus memiliki dendam masa lalu dan menolak segala hal yang berasal dari Barat termasuk demokrasi, maka menurut Esposito, Barat yang juga seharusnya lebih dulu tidak berprasangka pada dunia Islam dengan selalu

¹⁸³<http://hizbuttahrir.or.id/2009/06130/demokrasi-sistem-kufur-menyalahi-orang-Yahudi-dan-Nasrani-termasuk-prinsip-agama-kita>. Dapat dilihat pula di <http://koranMuslim.com/2011/jubir-salafi-mesir-demokrasi-paham-yang-berbahaya/>, diakses ¹² Agustus 201

⁸⁴Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001) h. 356.

¹ menyebut Islam sebagai teroris sementara mereka yang selalu melakukan agresi di dunia Islam.⁸⁵

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan gerakan Islam tentang konsep demokrasi, faktanya demokratisasi telah memberi dampak positif bagi gerakan Islam dengan adanya peluang kebebasan. Gerakan Islam yang memilih jalur politik sebagai metode perjuangannya sehingga lazim disebut kelompok *Islam siyasi*, Islam politik atau Islamis di Turki dan di Indonesia serta di negara-negara Muslim lainnya mendapatkan keuntungan dari berkembangnya nilai-nilai demokrasi selama tahun 1990-an yang menekankan pada kebebasan, keterbukaan dan kesamaan peluang serta kesiapan untuk hidup berdampingan dalam perbedaan, karena kemudian mereka dapat berkompetisi di dalam kehidupan politik bersama kelompok-kelompok sekuler.¹²

Di Indonesia demokratisasi di era Reformasi memunculkan 42 partai politik Islam, walaupun hanya 20 partai Islam yang memenuhi syarat dan akhirnya lolos verifikasi sehingga bisa mengikuti Pemilu 1999. Dari 20 partai tersebut hanya 10 partai Islam yang berhasil mendapatkan 1 kursi atau lebih di parlemen Pusat.⁶ Adapun gerakan Tarbiyah yang lahir di tahun 1979 baru dapat memunculkan partai Islam yakni Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998 yang kemudian sejak 2003 menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena di era Soeharto atau Orde Baru tidak boleh ada organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang berideologi selain Pancasila atau

⁸⁵ John L. Esposito. "Islam dan Barat: Konflik atau Benturan Peradaban?" dalam buku *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?* (Bandung: Mizan, 1996), h. 192-193.

⁸⁶ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen di Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). Lihat juga Lili Ramli, *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, dalam *Jurnal Jurnal Politica*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2011, h. 199-2019

dikenal dengan Asas Tunggal sehingga tidak mungkin sebuah partai memilih ideologi Islam sebagai asasnya.⁸⁷

Demikian pula di Turki demokratisasi telah memberi peluang bagi gerakan Islam *Milli Görüş* yang lahir di tahun 1969 segera setelah melahirkan partai-partai berhaluan Islam sejak 1970 yakni MNP, MSP dan *Refah Partisi* yang di tahun 1994 menjadi pemenang dan memimpin pemerintahan koalisi dengan Ketua Umumnya Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri. Padahal sebelumnya konflik antara prinsip-prinsip sekularisme dengan Islam yang telah berlangsung di Republik Turki selama lebih dari 80 tahun sejak runtuhnya Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924, membuat gerakan Islam atau kelompok Islamis selalu ditekan oleh kelompok sekuler dan militer yang berkuasa. Tindakan represif kubu sekuler dan militer malah memunculkan semangat kebangkitan Islam di berbagai bidang termasuk politik.

Demokratisasi memberi kebebasan bagi gerakan Islam atau kelompok Islamis di negeri-negeri Muslim untuk menampilkan identitas keislamannya dalam berbagai aspek kehidupan karena keyakinan mereka Islam bukan hanya agama ritual melainkan agama yang mewarnai segala aspek kehidupan mulai dari pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan, politik dan ekonomi. Kemunculan partai-partai politik Islam menurut Greg Fealy merupakan kelanjutan aplikasi wacana yang dimulai sejak awal abad ke-20 tentang hubungan yang tidak terpisahkan antara Islam, politik dan masyarakat yang diyakini lahir dari ide sentral: Kebangkitan Islam.⁸⁸

Semangat menampilkan identitas Islam memunculkan pula partai politik Islam yang bila ditelusuri berawal dari munculnya gerakan Islam

⁸⁷ M. Imadadudin Rahmat, *Ideologi PKS; dari masjid kampus ke gedung parlemen*, *op.cit.*, h.

⁸⁸ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah* (Bandung: Mizan, 2005), h. 27.

12

Ikhwanul Muslimin di Mesir pada awal abad kedua puluh, Jami'at Islami di Pakistan dan gerakan Jama'ah Said An Nursi di Turki pada pertengahan abad kedua puluh. Kemudian mendekati akhir abad kedua puluh, terjadi Revolusi Islam Iran di tahun 1979 yang menumbangkan dinasti kerajaan Pahlevi pro-Barat di bawah Shah Iran Reza Pahlevi membuat gerakan Islam secara politik berhadapan *vis a vis* dengan kekuatan hegemonik sekuler Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.⁸⁹

Revolusi Islam Iran menurut Zayyar, ilmuwan politik Timur Tengah, telah menimbulkan pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia Islam baik Islam Syiah maupun mayoritas dunia Islam yang menganut Sunni. Semangat kebangkitan untuk membebaskan diri dari diktator bangsanya yang terkooptasi negara-negara imperialis menyebar di seluruh dunia Islam, karena mayoritas dunia Islam terutama negara-negara Timur Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. ¹² Gelombang demokrasi yang menyebar dari Barat dan memasuki dunia Islam malah menyadarkan dunia Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme ekonomi Barat.⁹⁰ Kemunculan Nahdhat di Tunisia, *Front Islamic du Salut* (FIS) atau Partai Penyelamatan Islam di Aljazair, *Refah Partisi* di Turki, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia dan di awal abad ke-21 ini keberhasilan AKP sebagai partai pemenang di Turki serta PKS sebagai partai pemenang ke-4 dari 9 partai politik yang berhasil masuk parlemen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari semangat menampilkan identitas keislaman di bidang politik dan efek gelombang ketiga demokratisasi.

⁸⁹ Hussin Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (Ed.). *Islam, Muslims and the Modern State. Case-Studies of Muslims in Thirteen Countries*. (Basingstoke and London: Macmillan Press LTD, 1996), h. ix

⁹⁰ Zayyar. *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan* (Ed. Terjemahan dari *The Iranian Revolution: Past, Present and Future*. Senin, 15 Desember 2003). Lihat di www.marxist.com/iran-latar-belakang-sejarah.htm

Semangat menampilkan identitas keislaman menurut diawali dengan kemajuan di bidang pemikiran dan ekonomi yang memunculkan *new Muslim middle class* yang kemudian mendirikan partai-partai politik Islam. Nasr menyebutkan indikator meningkatnya semangat Islam di bidang ekonomi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi nasabah bank-bank syariah sehingga menyebabkan meningkatnya industri perbankan syariah. Ada lebih kurang 300 bank Islam atau bank syariah dan perusahaan investasi Islam di lebih dari 75 negara Muslim. Pada akhir 2006, simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang ada di 218 bank syariah berjumlah lebih kurang 14 milyar dollar AS. Bahkan laporan aset bank syariah di Iran pada 2007 menunjukkan angka sebesar 155 milyar dollar AS, diikuti oleh Saudi Arabia dan Malaysia masing-masing 69 milyar dollar AS dan 65 milyar dollar AS, kemudian Kuwait 38 milyar dollar AS dan Uni Emirat Arab sebesar 35 milyar dollar AS.⁹¹

Indikator semangat identitas keislaman di Indonesia juga muncul dalam aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi. Salah satu indikator di bidang budaya dan pendidikan adalah meningkatnya minat membaca buku-buku Islam sehingga menyebabkan peningkatan penerbitan buku-buku Islam di Indonesia. Bambang Trimansyah, Ketua Forum Editor Indonesia mengatakan buku-buku spiritual khususnya buku Islam merupakan buku yang paling diminati oleh masyarakat. Kini rata-rata sekitar 2.000 judul buku per bulan diterbitkan dari sebelumnya hanya 500 judul per bulan. Sekarang bisa sampai 12.000 judul buku per tahun dan hampir 50 persennya adalah buku Islam. Selain itu juga terjadi peningkatan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan menjadikan umrah sebagai wisata rohani. Demikian pula bisnis busana muslim menjadi marak seiring munculnya

⁹¹ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of The New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World* (New York: Free Press, 2009), h. 16

trend menggunakan busana muslim. Indikator meningkatnya semangat keislaman juga nampak dalam fenomena tersedianya musholla dan bahkan masjid di hampir semua perkantoran dan juga pusat-pusat perbelanjaan.⁹²

Semangat memunculkan identitas keislaman juga muncul di Turki sejak awal 1970-an yang menurut Ziya Önis sejak 1970-an diawali dengan semangat mendukung partai berhaluan Islam dari kalangan pengusaha yang memberikan dukungan finansial sekaligus menjadi basis sosial utama MSP yang merupakan pendahulu *Refah Partisi*. Selama tahun 1970-an, pengusaha kecil dan pemilik toko skala kecil atau sedang di kota Anatolia merupakan konstituen penting MSP. Hal tersebut berlanjut di tahun 1980-an ketika kelompok borjuis Islam di Turki pasca 1980 yang tergabung dalam asosiasi *Müstakil Sanayici ve İşadamları* (MUSIAD) atau Asosiasi Industrialis dan Pengusaha Independen menjadi basis ekonomi yang utama bagi *Refah Partisi* berperan penting sebab tanpa sumber keuangan yang memadai *Refah Partisi* tidak dapat mengimplementasikan strategi organisasionalnya menuju suksesnya di Pemilu 1995.⁹³ Formula menjadikan kelas menengah Muslim sebagai basis utama sekaligus menjadi faktor kekuatan ekonomi penunjang partai dilanjutkan oleh AKP di bawah Recep Tayyip Erdoğan dengan penyempurnaan sehingga berdampak lebih signifikan bagi kemenangan AKP di 2 Pemilu berturut-turut (2002 hingga 2014).

Semangat menampilkan identitas keislaman juga bisa dilihat dari kehidupan masyarakat di Turki dewasa ini. Mereka berani menampilkan simbol dan identitas keislaman di ruang publik, sebagaimana diungkap oleh Rukiye Ozdeimeir seorang aktivis perempuan di Istanbul bahwa masyarakat Turki sejak AKP berkuasa menjadi jauh lebih religius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rukiye menunjuk fenomena berhijab di kalangan perempuan

⁹² Ogira, *Feature Editor*. Sumber: <http://indonesiabuku.com/?p=4271>

⁹³ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 54

Turki yang saat ini menjadi sesuatu yang lumrah. Mereka menggunakan hijab di kantor-kantor atau berbagai tempat public.⁹⁴ Di berbagai Cami atau Masjid Raya di pusat-pusat kota juga ditemukan hal yang sama, dimana masjid-masjid ramai dikunjungi pada waktu masuk waktu sholat, sebagian bahkan meluber di luar pelataran Masjid, atau sholat harus dilakukan dalam beberapa sift, sebagaimana penulis saksikan di Cami di pusat kota Sakarya. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh Sitaresmi melalui wawacaranya terhadap sejumlah sumber. Mengutip para informannya Sitaresmi menyebut bahwa kini dari penduduk Turki yang 99% Muslim, paling tidak di atas 70% menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, sekitar 60% menunaikan sholat 5 waktu dan lebih kurang 60% menggunakan busana muslimah.⁹⁵

Bila wacana demokratisasi dianggap menguntungkan bagi gerakan Islam digunakan untuk melihat fenomena kontemporer PKS di Indonesia dalam rentang waktu 1999-2009 dan AKP di Turki di kurun waktu 2002-2007, maka tetap saja ada variasi dalam tingkat keberhasilannya. Greg Fealy mencatat bahwa demokrasi baru sebatas memberikan peluang bagi gerakan Islam untuk mengekspresikan dirinya dan mengukur penerimaan masyarakat terhadap cita-cita dan konsep yang ditawarkannya. Sedangkan sejauh mana partai politik Islam atau berbasis massa Islam diterima oleh masyarakat masih harus dibuktikan dengan ukuran seberapa besar keberhasilan *electoral* yang diraih. Di Indonesia, misalnya gelombang demokrasi pasca Reformasi memang memunculkan 42 partai politik Islam termasuk PK kemudian PKS, namun yang bisa bertahan hingga saat ini (Pemilu 2009) di parlemen hanya 2 partai berasas Islam yakni PKS dan PPP serta dua partai berbasis massa Islam yakni PKB dan PAN, sedangkan 5 partai lainnya dari 9 partai yang ada

⁹⁴ Wawancara dengan Ruikye Ozdeimir, Sakarya Turki, 27 Agustus 2018

⁹⁵ Sitaresmi Sulitiyawati, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 55

di parlemen adalah partai nasionalis serta 3 besar di Pemilu 2014 juga partai-partai nasionalis.

Demokrasi memang memberi peluang tumbuh dan berkembang bagi PKS yang lahir dari gerakan Islam yakni gerakan Tarbiyah, namun yang akan menentukan keberhasilan elektoralnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kehadirannya. Bila kenyataannya besaran elektoral PKS masih berada di tahapan *middle size*, berarti penerimaan masyarakat pada PKS masih terbilang sedang. Hal tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi elit PKS untuk bagaimana memanfaatkan iklim demokrasi yang kondusif guna berkompetisi mendapatkan simpati dan penerimaan masyarakat dengan kerja-kerja nyata. PKS merasakan fenomena ini pada pemilu 2009, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya, karena public mengapresiasi kerja-kerja nyata dari PKS. Hampir di setiap bencana PKS selalu tampil paling depan dalam membantu korban.

Sementara di Turki, walaupun pada awal abad ke-21 yakni di tahun 2000 pihak militer masih selalu bekerja sama dengan kubu sekuler di MK untuk membekukan, terutama setiap partai politik berhaluan Islam yang dianggap melanggar konstitusi negara Turki, tetapi AKP mampu meraih kemenangan di pemilu umum. Selain berusaha berkompromi dengan militer dan kubu sekuler serta tidak mengambil langkah-langkah konfrontatif dengan keduanya, AKP juga kembali mengajukan proposal keanggotaan di Uni Eropa yang selama ini diharapkan oleh mayoritas rakyat Turki. Pengajuan tersebut menuntut sejumlah persyaratan yang mengharuskan Turki lebih demokratis, seperti misalnya mengembalikan peran militer di bawah kontrol sipil, penghargaan pada HAM, kebebasan pers dan sebagainya yang kesemuanya justru sangat menguntungkan bagi AKP.⁹⁶ Ketika pada tahun 2008 AKP digugat kembali untuk dibekukan, jumlah

⁹⁶ M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, h. 140

hakim di MK yang menyetujui pembekuan tidak cukup karena begitu kuatnya argumentasi pembelaan para akademisi bahwa AKP tidak melanggar konstitusi. Di tengah berbagai tantangan yang cukup berat, AKP memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya sebagai partai berkuasa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta memperbaiki perekonomian Turki sehingga demokratisasi yang berlangsung di Turki benar-benar berpengaruh pada kemenangan Pemilu AKP.

B. Fenomena Gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya di Indonesia dan Turki

Greg Fealy dan Bubalo (2005) dalam penelitiannya tentang dampak pengaruh Gerakan Islam di Indonesia terlebih dulu mengupas tentang ragam Gerakan Islam atau Islamisme dan kaitannya dengan politik dan demokrasi. Fealy dan Bubalo mengutip tesis Samuel Huntington pada 1993, di jurnal Amerika *Foreign Affairs* dengan judul *The Clash of Civilization* (Benturan Peradaban) yang menyebutkan bahwa dengan berakhirnya perang dingin antara AS dan Uni Soviet maka bentuk konflik masa depan lebih bersifat benturan budaya dan antar-peradaban. Meskipun yang dimaksud oleh Huntington adalah menyangkut 7 peradaban besar, tesisnya tetap saja dianggap sinonim dengan konflik antara Barat dan Muslim karena umumnya pemerintahan Barat pun menuding kelompok Islamis sebagai biang konflik atau pelaku terorisme.⁹⁷

Islamisme didefinisikan oleh kelompok Islamis sebagai Islam yang dipahami sebagai sebuah ideologi yang menganggap agama bukan sebagai ibadah ritual semata melainkan mencakup segala dimensi kehidupan

⁹⁷ Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*, diterjemahkan dari: *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002)

masyarakat modern. Menurut mereka Islam memiliki aturan-aturan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat mulai dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan dan ekonomi. Dalam hal ini Islamisme sebagaimana diidentifikasi Bassam Tibi (2008) lebih merupakan upaya untuk menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial dan ekonomi yang dianggap sebagai sifat inheren agama Islam dan bukan sekedar merupakan perluasan agama ke wilayah politik. Selain itu elemen Islamisme lainnya yang juga mendasar adalah aktivisme atau dakwah horizontal yang harus selalu berlangsung. Namun ada perdebatan di kalangan kelompok Islamis antara pilihan fokus pada dakwah (Salafy), politik (Ikhwanul Muslimun) atau bentuk paramiliter dan revolusi (kelompok jihad). Selain itu juga ada perdebatan terkait pilihan apakah membentuk partai politik yang berpartisipasi dalam politik parlementer atau tidak.⁹⁸

Greg Fealy mengartikan Islamisme sebagai wacana tentang hubungan antara Islam, politik dan masyarakat yang lahir dari satu ide sentral: kebangkitan atau pembaharuan Islam. Sebagian besar kelompok Islamisme menyerap inspirasi langsung dari Ikhwanul Muslimin Mesir namun juga sekaligus dapat dilihat sebagai pewaris tradisi revivalis. Ada dua gerakan revivalis yang menjadi dasar perkembangan kelompok Islamis kontemporer di Timur Tengah yakni gerakan pada abad 18 yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia dan gerakan abad 19 dan 20 yang dipimpin oleh 3 pemikir: Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.⁹⁹

Dalam sejarah politik Islam modern, pewaris tradisi revivalis yang kemudian menjadi Gerakan Islam *mainstream* atau kelompok Islamis adalah Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada 1928 oleh Hasan Al-Banna

⁹⁸ Bassam Tibi, *Islamisme* (Bandung: Mizan, 2008)

⁹⁹ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah*, h. 28

yang prihatin atas kemunduran umat Islam khususnya kebobrokan masyarakat Mesir. Bila Afgani, Abduh dan Ridha memberikan kontribusi pada ide kebangkitan Islam melalui ide dan kiprah individual mereka, maka sumbangan Al-Banna yang sangat vital adalah pada pembentukan sebuah gerakan Islam. Strategi Al-Banna sifatnya bertahap dan reformis dengan cara mencetuskan kebangkitan spiritual yang luas di kalangan umat Islam. Al-Banna mengembangkan sebuah gerakan berbasis luas melalui berbagai aktivitas sosial akar rumput yang kemudian ditiru oleh gerakan-gerakan Islam lainnya. Selain bergerak di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi, Ikhwanul Muslimin juga mengorganisasi masjid, sekolah, klinik kesehatan dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin serta mendirikan klub atletik. Ikhwanul Muslimin tidak anti terhadap kegiatan politik bahkan menjadikannya sebagai sarana untuk mendorong amandemen konstitusi Mesir dan melawan korupsi.¹⁰⁰

Pada periode 1979-1992, kelompok Islamis mencatat sejumlah prestasi dengan meraih puncak kekuasaan baik di Iran (1979), Sudan (1989), Afganistan (1992), di Aljazair (1992) maupun Ikhwanul Muslimin yang memenangkan banyak kursi di parlemen Mesir melalui jalur independen dengan penguasaan segmen luas masyarakat Mesir, khususnya asosiasi-asosiasi dan kelompok-kelompok profesional. Namun pada akhir dekade 1990-an sebagian besar gagal mempertahankan puncak kekuasaan sehingga Olivier Roy menyimpulkan bahwa Islam politik telah gagal karena kemenangan gerakan Islam di Mesir dan Aljazair diberangus oleh militer dan rezim yang berkuasa. Demikian pula gerakan Islam *mainstream* seperti Ikhwanul Muslimin di berbagai negara juga menghadapi tekanan-tekanan.

Menurut Olivier Roy, gerakan Islam politik berada di persimpangan jalan untuk memilih di antara dua lintasan yang berbeda yakni apakah akan

¹⁰⁰ Sitaremsi Sulitiyawati, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera* h. 57

memilih normalisasi politik ataukah mundur ke neo-fundamentalisme. Gerakan Islam yang memilih normalisasi dan tetap mengikuti aturan permainan politik yang ada umumnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan masyarakat, sensitif terhadap problem lokal dan disibukkan dengan agenda perbaikan hidup para konstituen mereka. Namun sebagian lainnya menurut Roy beralih ke Neo-fundamentalisme, yakni kelompok Islamis yang memiliki pendekatan konservatif dan literalis terhadap Islam baik yang melakukan reformasi praktek keagamaan (Salafy) maupun Islam garis keras (*Jihadis Salafism*).¹⁰¹

Ahmad S. Moussali (2006) menyebut gerakan Islamisme sebagai Islam fundamentalis. Islam fundamentalis menurutnya lebih dari sekedar gerakan lokal melainkan melingkupi negara-negara bangsa dan tatanan dunia karena tidak hanya mempersoalkan isu dan aspirasi lokal, melainkan juga di skala regional dan universal. Moussali membagi fundamentalisme menjadi fundamentalis moderat dan fundamentalis radikal:

“To radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others.”¹⁰²

Menurut Moussali gejala fundamentalisme agama tidak selalu bermakna negatif hanya saja perlu diwaspadai bila mengarah pada radikalisme yang dapat mencederai citra agama Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bila fundamentalis moderat lebih menekankan *amar ma'ruf* dalam metode dakwahnya yakni dengan berdialog secara persuasif, maka

¹⁰¹ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996), h. 98-99.

¹⁰² Ahmad S. Moussali sebagaimana dikutip oleh Firman Noor. *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998-2005. A sub-thesis submitted for the degree of Master of Arts (Asian Studies) of the Australian National University* (The Australian National University, Faculty of Asian Studies. 2006) h. 23.

1 fundamentalisme radikal menitikberatkan pada *nahy munkar* sehingga cenderung menggunakan kekerasan.¹⁰³

Gerakan Islam yang disebut Esposito sebagai gerakan Islam arus utama yakni Ikhwanul Muslimin memilih mengikuti sistem politik yang ada sebagaimana pendirinya Hasan Al-Banna menyatakan bahwa politik adalah wilayah yang boleh dimasuki selama dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Sebagian generasi muda kemudian membentuk *Hizb Al-Wasat* sebagai partai politik dan memiliki *platform* partai yang tidak jauh berbeda dari pandangan-pandangan Ikhwanul Muslimin. Namun *Al Wasat* bukan satu-satunya gerakan Islam yang mengintegrasikan dakwah dan politik karena saat ini ada AKP di Turki yang menjadi contoh bagi banyak gerakan Islam setelah melakukan perubahan dari *Refah Partisi*, pendahulunya yang frontal dalam memperjuangkan Islam. Partai-partai Islam lainnya juga memasuki parlemen di Yordan, Kuwait dan Bahrain dalam batas-batas yang ditentukan oleh otoritas. Di Aljazair partai Islam seperti Partai *Nahdah* diperbolehkan ikut dalam pemilihan dan menyerap banyak konstituen FIS. Demikian pula Hamas di Palestina membentuk partai politik. Namun di sisi lain kelompok-kelompok Islamis garis keras juga ada yang terus melakukan kekerasan, terutama jika kesempatan berekspresi dalam politik terbatas.¹⁰⁴

Pergerakan Islam Internasional juga telah mengimbas ke Indonesia sejak awal abad ke-20 dengan terjadinya persentuhan antara ideologi Islam dengan modernitas. Deliar Noer menyatakan bahwa modernisasi ideologi Islam terjadi karena adanya gerakan pemurnian agama kembali ke Qur'an dan Sunnah, nasionalisme dan keinginan kuat komunitas Muslim mendirikan organisasi sosial-ekonomi serta meningkatnya perhatian pada pendidikan

¹⁰³ Sitaremsi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 59

¹⁰⁴ Sitaremsi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 60

Islam.¹⁰⁵ Gerakan kebangsaan dan juga gerakan Islam yang muncul dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan adalah Boedi Oetomo (BO), kemudian Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama (NU). BO dan SI muncul sebagai gerakan politik, sedangkan Muhammadiyah dan NU muncul sebagai gerakan sosial keagamaan.¹⁰⁶

Jauh sebelum kemerdekaan, pada awal abad ke-20 selain BO, maka gerakan Islam pertama yang muncul di Indonesia adalah Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan pada 1911 oleh Samanhudi di Solo dan berkembang pesat menjadi organisasi politik Islam di Indonesia. SDI kemudian berubah menjadi Syarikat Islam, dan memiliki tujuan untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dengan asas Islam sebagai dasar perjuangannya, asas kerakyatan sebagai dasar himpunan organisasi dan asas sosial ekonomi sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi yang masih sangat miskin dalam penjajahan dengan cara menghadapi konglomerasi etnis Cina yang mendapatkan banyak keistimewaan dari penjajah Belanda. Asas Islam dipakai karena keyakinan bahwa hanya landasan Islamlah yang mampu mempersatukan ummat Islam yang tertindas. Kata “Dagang” dihilangkan sehingga SDI menjadi Syarikat Islam (SI) agar seluruh umat Islam memiliki rasa tanggung jawab menghadapi tantangan bersama. Selain itu SI memiliki pula cita-cita politik yakni mewujudkan persatuan umat bahkan persatuan umat Islam sedunia yang dikenal dengan istilah *Pan-Islamisme*. Kemudian memperjuangkan kemerdekaan umat yang berarti kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bidang politik dan bidang ekonomi dengan “melenyapkan perbudakan manusia atas manusia”. Dalam hal sistem pemerintahan, pada

11

¹⁰⁵ Deliar Nor. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (LP3ES, Jakarta, 1980), h. 20.

¹⁰⁶ Syarifuddin Jurdi, lihat di Siti Nurhayaty Dewi. *Muhammadiyah sebagai Civil Society dan Pengaruhnya terhadap Demokratisasi Pasca Orde Baru (1998-2009)*. Program Pascasarjana Ilmu Politik. FISIP UI. Juni 2009.

saat Kongres SI di Bandung 18 Juni 1916, HOS Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI berjuang agar bangsa Indonesia merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri yang mengatur nasibnya sendiri.¹⁰⁷

Harry J. Benda mencatat, “dengan menampilkan diri secara penuh kepada rakyat Indonesia, SI memperoleh dukungan dari semua kelas, di kota-kota dan di desa-desa. Para pedagang Muslim, para buruh di kota-kota, kyai dan ulama, bahkan juga alangan priyai, tetapi di atas segalanya seluruh petani, bergabung kedalam gerakan politik berbasis massa yang pertama – dan terakhir- pada masa kolonialisme Indonesia ini.¹⁰⁸ Sayangnya bahwa posisi SI yang sedang menjulang itu tidak dapat dipertahankan dalam waktu yang lama. Para petinginya sebagai katalisator pergerakan nasional Indonesia mulai memudar di penghujung 1920-an. SI gagal mempertahankan kepeloporannya yang menonjol dalam mencapai kemerdekaan. Sebaliknya di tahun-tahun berikutnya, seperti dicatat sejumlah peneliti, idealisme dan aktivisme politik SI dibayang-bayangi kelompok-kelompok social politik lain yang tidak secara formal menyatakan Islam sebagai dasar ideologi negara.¹⁰⁹ Setelah itu, ide-ide politik Islam lebih banyak dimainkan organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU, Muhammadiyah dan Persis. Tokoh-tokoh dari kelompok ini yang mewarnai perdebatan ideologi politik Indonesia di awal masa kemerdekaan.

Dalam sejarah di Indonesia, para pemimpin Muslim telah memainkan peran penting dalam menentukan reformasi sosial dan politik. Di era Orde Lama (Orla) para pemimpin Muslim berperan melalui Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang didirikan pada tanggal 7 November

¹⁰⁷<http://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/28/cita-dasar-pergerakan-syarikat-islam/>, diakses 6 September 2018

¹⁰⁸ Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945* (The Hague and Bandung: W. Van Holve, Ltd, 1958), h. 41-42

¹⁰⁹ Lihat Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun*, h 54-60; Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, h 112-152; Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara*, h. 64-73

1945 di Yogyakarta. ⁶ Sebagai wakil politik Islam satu-satunya, Masyumi berhasil menarik jumlah pengikut yang sangat besar. Para pemimpin Masyumi seperti Natsir juga tampil sebagai pemimpin nasional utama, dan memimpin kabinet selama masa-masa pasca kemerdekaan.¹¹⁰ Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena tokoh-tokohnya diduga terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi rehabilitasi sebagian tokoh-tokoh Masyumi yang diperbolehkan aktif kembali dalam politik dengan meleburkan diri ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

⁹ NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi dan tokoh NU, KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi sehingga keterlibatan NU dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi. Demikian pula hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis dan sempat merenggang pada saat ⁹ Pemilu 1955. Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu dan menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara, sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 22,3%, Nahdlatul Ulama 18,4% dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 16%.¹¹¹ Di antara tokoh-tokoh Masyumi yang

⁶ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca: Cornell University, 1962), h. 274-275; lihat juga tulisan Herbert Feith yang lain, *The Indonesian Election 1955* (Ithaca: Cornell University, 1962)

¹¹¹ Herbert Feith yang lain, *The Indonesian Election 1955*, h. 273

cukup dikenal adalah: Hasyim Asy'arie. Wahid Hasjim (putra KH Hasyim Asy'arie), Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Muhammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Mr. Mohammad Roem, Muhammad Isa Anshari, Kasman Singodimedjo dan Anwar Harjono, merupakan juru bicara terakhir Partai Masyumi yang dibekukan oleh pemerintah Orde Lama. Kemudian lahirlah Keluarga Besar Bulan Bintang yang di masa Orde Baru mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan pada masa Reformasi menjadi inspirator bagi penerus perjuangan Masyumi yakni Partai Bulan Bintang (PBB).¹¹²

Selanjutnya pada masa pasca Orba dua organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah yang lahir jauh lebih dulu dari Masyumi yakni sebelum kemerdekaan secara proaktif terlibat langsung dalam proses perubahan kepemimpinan untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. *Nahdlatul Ulama* (NU) atau *Kebangkitan Ulama* adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Sebelum NU berdiri, berturut-turut berdiri organisasi pergerakan *Nahdlatul Wathan* (*Kebangkitan Tanah Air*) pada 1916, *Taswirul Afkar* atau *Nahdlatul Fikri* (*kebangkitan pemikiran*) pada 1918 dan *Nahdlatul Tujjar* (*pergerakan kaum saudagar*). Baru kemudian musyawarah para kyai memunculkan kesepakatan untuk membentuk organisasi yang lebih lengkap dan tertata rapi bernama *Nahdlatul Ulama* (NU) atau *Kebangkitan Ulama* pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 dan dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Umum NU yang juga sekaligus merumuskan *Qanun Asasi* (*prinsip dasar*) dan *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam *khittah* NU dan dijadikan rujukan warga NU di bidang sosial, keagamaan dan politik. NU menganut paham *Ahlussunnah*

¹¹² Lihat penjelasan singkat tentang Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyumi>, diakses, 16 September 2018

waljama'ah yang mengambil jalan tengah antara kelompok ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan ekstrim *naqli* (skripturalis) dengan merujuk pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dan di bidang fiqh cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i namun tetap mengakui tiga mazhab yang lain yakni madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Gagasan mengembalikan NU kepada *khittah* nya pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial serta pola hubungan NU dengan negara dengan lebih menekankan lagi NU sebagai gerakan sosial keagamaan.¹¹³

Selain NU, Muhammadiyah juga berperan penting sebagai gerakan sosial keagamaan di masa Orde Baru. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, memiliki potensi kekuatan politik karena faktor historis Muhammadiyah yang pernah berkecimpung dalam politik praktis pada masa Orla. Pada Muktamar Ujung Pandang tahun 1971, Muhammadiyah memutuskan untuk terlepas dengan segala bentuk politik praktis, tapi anggotanya diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada selama tidak merugikan Islam dan Muhammadiyah, membedakan dengan kelompok 'Islam Politik'. Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais pada 1998 muncul menjadi tokoh penting yang berperan dalam Reformasi dan juga di dalam perkembangan politik pasca rezim Orba. Walaupun Amien Rais kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional yakni partai politik nasionalis yang memiliki basis massa dari anggota Muhammadiyah, namun Muhammadiyah sendiri setelah Amien Rais tidak lagi menjadi Ketua Umum tetap

¹¹³ Lihat Sitaremsi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 63. Catatan tentang hal ini juga bisa dibaca melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulma, diakses 16 September 2018.

menguatkan diri sebagai gerakan sosial keagamaan atau menurut istilah Bahtiar Effendy, Islam kultural yang membedakannya dari Islam politik.¹¹⁴

Selama masa kekuasaan Orde Baru politik Islam seakan mati suri. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang didesain oleh rezim Orde Baru sebagai satu-satunya Partai Politik yang merepresentasi ideologi politik Islam di Indonesia, tidak mampu menampilkan dirinya secara optimal.¹¹⁵ Dengan semua langkah ini, Golkar sebagai partai pendukung pemerintah berhasil memperoleh kemenangan mutlak dalam pemilihan umum sejak pemilu pertama tahun 1971. Berbagai perkembangan setelah pemilu 1971 hanya memoerbesar rasa putus asa masyarakat politik Islam. Akhirnya, konstruk lama partai Islam, khususnya dalam kerangka wadah politik (yakni partai Islam), memudar ketika pemerintah Orde Baru melakukan restrukturisasi sistem kepartaian pada Januari 1973.¹¹⁶

Evolusi Islamisme menurut Greg Fealy juga terefleksikan dalam perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia di bidang politik, sosial dan ekonomi. Di Indonesia, masih menurut Fealy kalangan Salafy telah cukup berkembang di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, namun gagasannya tidak banyak diikuti kalangan Muslim. Sementara gerakan Islam yang diilhami oleh Ikhwanul Muslimin seperti misalnya gerakan Tarbiyah atau PKS, berpotensi memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan gerakan Salafy atau Salafi-jihadi, karena sebagian besar aktivitas PKS difokuskan untuk mencari dukungan massa dan secara hati-hati melakukan kompromi demi mendulang dukungan tersebut. Berbeda dengan Olivier Roy yang menganggap gerakan Islam atau kelompok Islamisme mengalami

¹¹⁴ Bahtiar Eefendi, *Islam dan Negara*, h. 306

¹¹⁵ Rezim Orde Baru mengeluarkan serangkaian peraturan penyederhanaan partai, dan mobilisasi berbagai kekuatan politik seperti TNI-Polri dan birokrasi untuk memperkuat Golkar yang menjadi pendukung utama pemerintah.

¹¹⁶ Keneth E. Ward, *The 1971 Election in Indonesia; an East Java Case Study*, (Clayton Monash Papers on South East Asia No. 2, Monas University: 1974) , h. 15

1
deklinsi dan kemudian mundur menjadi neo-fundamentalisme yang sibuk mengurus aspek ritual saja, maka Fealy justru beranggapan bahwa kini banyak gerakan Islam yang semula bertentangan dengan masyarakatnya sendiri kini mengalami kemajuan dengan melakukan integrasi politik dan mendukung penguatan demokrasi politik sehingga tidak lagi menganut Islamisme melainkan Pos-Islamisme.

BAB IV
PKS DAN AKP DALAM DINAMIKA
POLITIK IDEOLOGI DI INDONESIA DAN TURKI

Partai politik adalah intitusi yang didesain sebagai media perjuangan untuk mewujudkan pandangan politik tertentu dalam kehidupan politik demokratis di sebuah negara. Partai politik menjadi pilar demokrasi yang menyandang berbagai fungsi strategis, terutama dalam menagregasi kepentingan ideologis dalam memperjuangkan kepentingan public (rakyat) yang tergabung dalam partai politik tertentu. Sebab itu, kehadiran partai politik biasanya dipicu oleh berbagai konteks politik, social, ekonomi dan budaya yang kompleks di sebuah negara.

Bab ini akan mendeskripsikan secara detail tentang proses kelahiran PKS dan AKP sebagai partai politik Islam, dan bagaimana pergumulan keduanya dalam dinamika politik di Indonesia dan Turki, baik tentang sejarah berdirinya, tokoh-tokoh yang berdiri dibalik gerakan politik kedua partai politik, ideologi (asas) politik yang disandang hingga artikulasi politik PKS dan AKP dalam dinamika politik kontemporer di Indonesia dan Turki. Hal ini penting dikemukakan sebelum memasuki pembahasan-pembahasan selanjutnya, sebab perjalanan PKS dan AKP sebagai pratau politik Islam yang memiliki DNA Islamisme di dalam dirinya cukup menakjubkan. Itulah mengapa beberapa peneliti dan pengamat menyebut PKS dan AKP adalah *the rising star* yang menarik untuk dikaji.¹¹⁷

¹¹⁷ Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki* (Yogyakarta, 2014)

A. Lahirnya PKS; dari Gerakan Dakwah ke Panggung Politik

Sejarah kemunculan PKS di dalam konstelasi politik di Indonesia berawal dari didirikannya gerakan sosial keagamaan yakni gerakan Tarbiyah sejak 1980 oleh Hilmi Aminuddin, Salim Segaf Al Jufri, Alm. Encep Abdusyakur dan Abdullah Baharmus. Gerakan Tarbiyah ini merupakan gerakan yang terilhami gerakan arus utama Islamis yakni Ikhwanul Muslimin (IM). Di tengah kondisi sosial politik era Orde Baru yang sangat represif terhadap gerakan Islam, gerakan Tarbiyah pun menjadi wadah pendidikan dan pembentukan karakter kader-kader muda yang berasal dari SMP, SMA dan perguruan tinggi yang kemudian menjadi penggerak kegiatan-kegiatan dakwah di Rohis sekolah menengah maupun di perguruan tinggi.

1. Situasi Politik di Indonesia sebelum Reformasi tahun 1998

Setelah berkuasa sejak 1966, Soeharto dengan Orde Barunya yang disebut sebagai Negara Birokratik Otoriter (NBO) ternyata di akhir 1960-an mulai mengecewakan harapan komponen aktivis Islam karena menolak permintaan untuk menghidupkan kembali partai Masyumi. Selanjutnya di awal 1970-an, pemerintahan Orba juga mengecewakan komponen mahasiswa karena menunjukkan keberpihakannya pada kekuatan modal asing dan bertindak represif terhadap para demonstran di peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Unjuk rasa besar-besaran para mahasiswa di peristiwa Malari merupakan kerusuhan sosial pertama yang sangat terkenal di masa Rezim Soeharto atau Rezim Orde Baru karena terjadi dalam skala yang besar di masa itu.¹¹⁸

Peristiwa Malari merupakan bentuk protes para mahasiswa terhadap dominasi modal asing yang masuk ke Indonesia dan tercetus ketika Perdana

¹¹⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Malari>, diakses 16 September 2018

Menteri (PM) Jepang Tanaka Kakuei berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Para mahasiswa merencanakan menyambutnya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, namun karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Demikian pula pada saat akan pulang pada tanggal 17 Januari 1974, PM Jepang tersebut diantar dari Istana oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha langsung menuju pangkalan udara. Sebelumnya kedatangan Ketua *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI), Jan P. Pronk *juga* telah dijadikan momentum awal untuk demonstrasi anti-modal asing dan klimaksnya terjadi berupa Peristiwa Malari pada saat kedatangan PM Jepang pada Januari 1974. Dalam buku-buku yang ditulis oleh Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) Soemitro menekankan peran Ali Moertopo dan Soedjono Humardani “membina” orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Dalam kasus Malari, lewat organisasi tersebut dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Sementara Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen.¹¹⁹ Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai latar belakang peristiwa kerusuhan Malari, peristiwa tersebut telah menjadi fakta sejarah bahwa ketidakdependensian gerakan mahasiswa berdampak negatif baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi rakyat yang menganggap mahasiswa sebagai *moral force* yang memperjuangkan mereka. Dewan Mahasiswa (Dema) UI di bawah pimpinan Hariman Siregar terbawa masuk ke dalam arena *power interplay* karena secara sadar atau tidak sadar telah terintervensi dan terkooptasi oleh unsur-unsur kekuasaan pemerintahan Orba.

¹¹⁹ Sitaesmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 66

Sementara bagi rezim militer Soeharto peristiwa tersebut terlepas dari siapa dalangnya dan apakah peristiwa tersebut murni atautkah hanya sebuah rekayasa yang jelas telah menjadi sebuah alasan kuat untuk bertindak semakin represif dengan melakukan penangkapan para aktivis mahasiswa dan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef menerapkan kebijakan kontroversial Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang intinya membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan politik praktis. Pemerintah beranggapan kegiatan politik hanya boleh dilakukan di luar kampus dan tugas utama mahasiswa adalah belajar. Joesoef pun menghapuskan organisasi mahasiswa saat itu yakni Dewan Mahasiswa (Dema) di universitas-universitas di seluruh Indonesia sehingga praktis melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa.¹²⁰

Pelanjut pelaksana NKK adalah Prof. Dr. Nugroho Notokusanto yang namanya kemudian identik dengan konsep NKK yang terus diberlakukannya ketika dilantik sebagai Rektor UI dan kemudian menjadi Mendikbud. Di tahun 1983 terjadi demonstrasi menjelang Sidang Umum MPR sehingga aparat keamanan (ABRI) masuk ke kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah aktivis mahasiswa Jakarta dan Bandung yang dianggap bertanggungjawab ditahan di rumah tahanan militer di Jakarta dan Bekasi. Di masa Nugroho menjadi Rektor UI, dua tokoh mahasiswa Teknik UI yakni Biner Sitompul dan Peter Sumariyoto yang bersikukuh tetap menghidupkan Dema diskors dan akhirnya dipecat dari kampus UI. Tindakan represif Orba berupa NKK/BKK di kampus-kampus negeri terkemuka pada awal 1980-an menyebabkan stagnasi gerakan mahasiswa dan melahirkan berbagai bentuk “pelarian” bagi para mahasiswa karena mulai menimbang resiko dipecat sebagai mahasiswa dan dipenjara seperti yang sudah terjadi pada para aktivis karena menentang represi rezim Orba. Oleh karena itu ada mahasiswa yang

¹²⁰ Sitaesmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 68

melarikan diri ke dalam hedonism dan menghidupkan slogan: Pesta, Buku dan Cinta serta memilih bersikap apatis karena dipaksa menjauh dari pengabdian dan kepedulian terhadap rakyat. Sebagian lagi menyibukkan diri dengan seni musik dan teater sehingga banyak musisi dan seniman yang lahir dari kampus UI pada masa itu seperti Ikang Fauzi dari FISIP, Christine Panjaitan dari Fakultas Sastra (FS), Grup musik Chaseiro dipimpin Chandra Darusman dari FH, grup orkes dangdut: Pancaran Sinar Petromak (PSP) dipimpin Sys Ns dan Ferrasta Soebardi alias Pepeng dari FISIP dan Neno Warisman dari FS yang aktif di teater kampus.

Kemudian banyak pula mahasiswa yang berkonsentrasi pada kegiatan organisasi di luar Kampus seperti misalnya menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ataupun Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Ada pula yang memilih berkonsentrasi di dunia akademik dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri serta baru kembali ke Indonesia menjelang peristiwa Reformasi 1998. Sedangkan sebagian mahasiswa lainnya “melarikan” diri ke kegiatan positif pengajian-pengajian di kampus seperti Kuliah Keputrian setiap hari Jum’at, menyelenggarakan Seminar Hari-hari Besar Islam, *Daurah* atau Pesantren Kilat dan *halaqah* atau kelompok kajian di mushola-mushola dan masjid-masjid kampus seperti Masjid Arif Rahman Hakim (ARH) di Salemba atau Masjid At Taqwa di Rawamangun, Masjid Shalahudin di Yogyakarta, Masjid Al Ghiffari di IPB Bogor dan Masjid Salman ITB. Selain itu mereka juga aktif juga di kegiatan bakti sosial untuk korban banjir, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal dan pelajaran Kursus Membaca Al Qur’an baik di masjid-masjid ekstra kampus seperti aktif di Remaja Islam Sunda Kelapa (RISKA) maupun masjid-masjid kampus.¹²¹

¹²¹ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 69

Efek berikutnya dari meningkatnya kesadaran beragama adalah bertambahnya jumlah Muslimah yang berjilbab, di kampus Sastra (sekarang FIB) di awal 1980-an semula hanya sekitar 5 orang, di Fakultas Psikologi 3 orang, di FH 1 orang, di FISIP 4 orang, namun di akhir 1980-an sudah berlipat-lipat yang memakainya. Namun represifnya rezim Orba terasa pula dampaknya pada kehidupan beragama pelajar dan mahasiswa. Peraturan yang ketat berupa larangan mengenakan jilbab di sekolah negeri menyebabkan banyak anak SMA Negeri yang dikeluarkan, kemudian juga ada mahasiswa yang batal mendapatkan beasiswa karena fotonya mengenakan jilbab.

2. Gerakan Tarbiyah dan Tumbuhnya Islamisme di Kampus

Sebagian besar dari para aktivis Rohis (Rohani Islam) di sekolah dan kampus kemudian tertarik bergabung dengan gerakan Tarbiyah yang didirikan oleh Hilmi Aminuddin, seorang alumni Universitas Madinah di Arab Saudi pada awal 1980. Hilmi Aminuddin menekuni pembinaan kader-kader melalui *halaqah* dan *usrah*. Bila melihat pola *Tarbiyah* atau pembinaan melalui *halaqah* dan *usrah* yang perkembangannya melalui sistem *stel-sel*, nampak gerakan Tarbiyah Hilmi Aminuddin terilhami dan mengadopsi model pembinaan Ikhwanul Muslimin yang digagas Hasan Al Banna. Sebuah persentuhan pemikiran yang sangat dimungkinkan dalam pergaulan mancanegara di Universitas di Timur Tengah.¹²²

Pengaruh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin (IM) di Indonesia yang meningkat pesat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Salah satu penyebabnya adalah faktor kekecewaan baik terhadap rezim Suharto maupun organisasi-organisasi Islam dan para pemimpinnya yang dianggap kurang

¹²² Abdurrahman, *Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Umat Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional*, (Disertasi di Programa Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2013), h. 82

memiliki integritas, sehingga mereka mencari model baru bagi perjuangan Islam. (Alm.) Rahmat Abdullah dikutip oleh Greg Fealy pada September 2002 menyebutkan banyak kalangan muda Muslim tertarik dengan model perjuangan IM yang menawarkan pendekatan baru dalam kegiatan dakwah Islam. Mereka kemudian mengadopsi model IM dengan membentuk kelompok-kelompok kecil atau sel-sel yang dikenal dengan *halaqah* dan *usrah* sebagai unit terkecil yang menekankan ketaatan pada kewajiban ritual, rasa saling tolong menolong, pengkajian pengetahuan Islam dan aktivitas sosial berupa layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.¹²³

Kegiatan-kegiatan di masjid kampus, seperti Kuliah Jum'at Kajian Keputrian diisi oleh kader-kader Gerakan Tarbiyah di hampir seluruh fakultas di UI. Demikian pula kegiatan Integrasi Studi Tentang Islam (ISTI) di FEUI, Formasi di FSUI atau SALAM UI dan lain-lain juga dipimpin para kader Tarbiyah dan pada perkembangannya kemudian bahkan memimpin pula organisasi kemahasiswaan resmi kampus yakni BEM di kampus-kampus sekuler yang utama yakni UI, IPB, ITB, UGM, IKIP, STAN dan lain-lain. Sepanjang dekade 1980-an dan awal 1990-an gerakan Tarbiyah masih menampakkan diri sebagai gerakan keagamaan dan mulai mengakses sumber daya negara yakni para alumnus STAN yang telah menjadi kader Tarbiyah ketika kuliah dan kemudian bertugas di daerah-daerah sehingga memudahkan gerakan ini tersebar ke seluruh kampus di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Gerakan Tarbiyah yang terorganisasi rapi ini juga meningkatkan jumlah anggota dalam upaya merebut kepemimpinan di lembaga-lembaga kampus, sehingga pada awal 1990-an para aktivis gerakan

¹²³ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Op.cit.,

² Tarbiyah memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi terbesar di Indonesia.¹²⁴

Imdadun Rahmat, peneliti NU, berpendapat bahwa PKS bukan fenomena politik baru di tanah air melainkan kelanjutan dari Masyumi yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin.² Namun Greg Fealy berpendapat bahwa kelahiran PK (PKS) tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang meningkat pesat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Salah satu penyebabnya adalah faktor kekecewaan baik terhadap rezim Suharto maupun organisasi-organisasi Islam dan para pemimpinnya yang dianggap kurang memiliki integritas, sehingga mereka mencari model baru bagi perjuangan Islam. (Alm) Rahmat Abdullah dikutip Greg Fealy pada September 2002 menyebutkan banyak kalangan muda Muslim tertarik dengan model perjuangan Ikhwanul Muslimin yang menawarkan pendekatan baru dalam kegiatan dakwah Islam melalui *halaqah* dan *usrah* sebagai unit terkecil yang menekankan ketaatan pada kewajiban ritual, rasa saling tolong menolong, mengkaji pengetahuan Islam dan melakukan aktivitas sosial berupa layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.¹²⁵

Sepanjang dekade 1980-an dan awal 1990-an gerakan Tarbiyah masih menampakkan diri sebagai gerakan keagamaan dan mulai mengakses sumber daya negara yakni para alumnus STAN yang telah menjadi kader Tarbiyah ketika kuliah dan kemudian bertugas di daerah-daerah sehingga memudahkan gerakan ini tersebar ke seluruh kampus di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.² Gerakan Tarbiyah yang terorganisasi rapi ini juga meningkatkan jumlah anggota dalam upaya merebut kepemimpinan di lembaga-lembaga kampus, sehingga pada awal 1990-an gerakan Tarbiyah

¹²⁴ Imdadun Rahmat. *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

¹²⁵ Greg Fealy, *The Failure of Political Islam*, h. 67

2 memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi terbesar dan paling bergengsi. Terutama di kampus-kampus umum seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan beberapa yang lainnya.¹²⁶

Selanjutnya terjadi perkembangan lain di luar prediksi para kader Tarbiyah yakni 2 jatuhnya Soeharto karena krisis finansial, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di samping adanya krisis sosial-politik dan krisis kepercayaan pada pemerintahan sehingga muncul kondisi *chaos* di mana-mana pada 1998. Golkar yang selama dua dekade telah menjadi mayoritas tunggal (*single majority*) dalam sistem perpolitikan di Indonesia ikut tumbang seiring runtuhnya Orde Baru dan lengsernya Soeharto di tahun 1998. 2 Kondisi politik pun berubah drastis dengan jatuhnya Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru serta dimulainya era Reformasi. Perasaan tertekan selama lebih dari tiga dekade karena tidak ada kebebasan menemukan momentumnya yang tepat. Gerakan mahasiswa bersama rakyat menumbangkan Soeharto, dengan didukung oleh perubahan zaman berupa keterbukaan di era globalisasi, gelombang demokratisasi dan terpecahnya militer di Indonesia antara yang ingin mempertahankan *status quo* dengan kubu militer yang lebih demokratis.

2 Gerakan Tarbiyah pun dihadapkan pada terbukanya peluang membentuk partai politik. Musyawarah para kader inti gerakan Tarbiyah yang saat itu berjumlah sekitar 3000 orang di seluruh Indonesia diselenggarakan untuk memilih apakah gerakan dakwah ini akan menjadi sebuah partai politik atau ormas saja. Sebanyak lebih dari 72 persen kader menyatakan setuju untuk membentuk partai politik sementara 28 persen ingin mendirikan ormas.¹²⁷ Sementara itu pada saat yang hampir bersamaan

¹²⁶ Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, h. 17

¹²⁷ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 72

aktivis-aktivis muda generasi kedua dan ketiga gerakan Tarbiyah mendirikan organisasi Islam ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada 1997 di Malang dengan Fahri Hamzah sebagai Ketua Umum.¹²⁸ Organisasi ini berperan menggerakkan kampus-kampus bekerjasama dengan ormas-ormas Islam dan seluruh elemen masyarakat dalam memunculkan gerakan Reformasi yang melengserkan Soeharto dan berperan memblow up Amien Rais untuk menjadi *icon* tokoh Reformasi. Pada Agustus 1998, KAMMI dan para pemimpin Gerakan Tarbiyah dengan pendirinya Hilmi Aminuddin di belakang layar mendirikan partai politik Islam yakni Partai Keadilan (PK) dan memunculkan Dr. Nur Mahmudi Ismail lulusan AS sebagai presiden PK serta Dr. Hidayat Nurwahid lulusan Madinah sebagai Ketua Majelis Syuro.¹²⁹

3. Gerakan Reformasi dan Lahirnya PKS.

Adanya *euphoria* kebebasan di masa reformasi 1998 menyebabkan munculnya begitu banyak parpol yang dulu tidak dimungkinkan di zaman Orde Baru. Reformasi politik memberikan keleluasaan berlangsungnya demokrasi multipartai. Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang ditandatangani pada bulan Februari 1999 oleh Presiden Republik Indonesia pertama di era Reformasi yakni BJ. Habibie membuka babak baru dalam sistem politik dan kepartaian di Indonesia. UU tersebut kembali membuka tradisi sistem politik multipartai di Indonesia seperti di era awal kemerdekaan, namun partai-partai baru telah bermunculan jauh sebelum UU tersebut disahkan dan partai-partai yang paling cepat bermunculan sepanjang tahun 1998 hingga awal 1999 adalah partai

¹²⁸Lihat “Sejarah KAMMI”, diakses melalui <http://infokammi.blogspot.com/2011/12/sejarah-kammi.html>, 12 Oktober 2018

¹²⁹ Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS*, h. 72-74

bersymbol keislaman. Sebagian besar merupakan warisan ideologis dari partai maupun organisasi Islam yang pernah sukses di masa lalu.

Bahtiar Effendy berpendapat perkembangan Islam di dunia politik menjadi signifikan setelah berakhirnya era Soeharto dan dimulainya era Reformasi. Kebangkitan kembali kekuatan Islam politik di Indonesia ditandai dengan berdirinya lebih dari 40 partai politik Islam. Setelah selama bertahun-tahun dinamika politik Indonesia dibatasi situasi segera menjadi berbalik ketika Soeharto mundur dan partai politik yang muncul di era Reformasi mencapai jumlah 181 dengan dengan 42 di antaranya adalah partai Islam. Ada yang semakin meyakini bahwa akhirnya Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, sehingga menempatkan nilai agama sebagai sumber daya politik yang besar. Sementara yang lainnya berpendapat kelahiran kembali Islam politik adalah fenomena logis karena terpinggirkan sekian lama oleh rezim Orde Baru, sehingga jatuhnya Soeharto memberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam politik.¹³⁰

Partai politik Islam yang muncul di era Reformasi dapat dikategorikan ke dalam tiga varian. Varian pertama adalah partai Islam warisan masa Orde Lama (Orla) yakni partai pewaris ideologi partai Islam di masa tersebut. Kemudian varian kedua adalah partai politik Islam warisan Orde Baru yakni PPP sebagai satu-satunya peninggalan masa Orba. Partai ini berusaha kembali pada citra keislamannya dengan memakai lambang Ka'bah lagi. Lalu varian ketiga adalah partai Islam generasi baru yang tidak memiliki hubungan dengan partai Islam di masa Orla atau Orba dan

¹³⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara*, h. 202. Lihat juga dalam Irsyad Zamjani. *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif*. (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), h. 222-224.

memiliki struktur organisasi dan sistem yang baru serta berbeda dengan partai-partai Islam sebelumnya.¹³¹

Walaupun partai politik Islam yang muncul di era Reformasi begitu banyak dengan beberapa variannya, Bahtiar Effendy menganggap fenomena politik aliran di era Reformasi tidak sekuat di tahun 1950-an masa Orde Lama, karena dari 42 partai politik Islam yang ada hanya 20 yang bisa ikut Pemilu 1999 dan hanya 10 yang menempatkan wakilnya di parlemen yakni (58), PKB (51), PAN (34), PBB (13), PK (7), PNU (5), PP (1), PSII (1), PPII Masyumi (1) dan PKU (1). Hasil tersebut menunjukkan mayoritas Muslim di Indonesia masih lebih memilih partai nasionalis, karena keseluruhan partai Islam hanya memperoleh 17,8 persen (87 kursi), jauh di bawah perolehan partai-partai nasionalis yakni 62,5 persen (290 kursi).

Sementara Nurcholish Madjid beranggapan di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat kini lebih melihat substansi dari pada symbol, kinerja daripada retorika. Oleh karena itu selama partai-partai politik Islam tidak mampu mengartikulasikan gagasannya dalam perspektif kepentingan masyarakat luas, maka sangat sulit untuk menjadi kekuatan utama dalam politik di Indonesia.¹³² Hal ini bisa dilihat secara nyata dalam pemilu 1999 sampai dengan pemilu tahun 2009, dimana partai politik Islam tidak mampu meraih hasil yang meyakinkan.¹³³ Bahkan banyak partai Islam yang tenggelam dalam pertikaian internal yang tidak berkesudahan dan akhirnya lenyap dari panggung politik Indonesia. Seperti yang dialami partai-partai Islam yang muncul pasca reformasi.

¹³¹ Muhammad Nur Hakim, "Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Kontestasi Reformasi Studi Perbandingan PPP, PKB dan PAN," dalam Jurnal *Humanity*, Volume 1 Nomor 1, September 2006, h. 61-68.

¹³² Triono, "Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam pada Pemilu 2014," dalam Jurnal *TAPIS*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015, h. 93-106

¹³³ Irsyad Zamjani, *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif* (Jakarta: Dian Rakyat, 2009), h. 216

Tabel. 3
Perolehan Suara Partai-partai Islam dalam Pemilu di Era Reformasi

No	Partai	Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	PPP	11.329.905	58	9.248.764	58	5.533.214	
2	PP	551.028	1				
3	PBR			2.764.998	13	1.264.333	
4	PKB	13.336.982	51	11.989.56	4	5.146.122	
5	PKU	300.064	1				
6	SUNI	180.167	-				
7	PNU/PPNUI	679.179	5	895.610	-	146.779	
8	PKNU					1.327.593	
9	PAN	7.528.956	37	7.303.324	52	6.254.580	
10	PMB					414.750	
11	PBB	2.049.708	14	2.970.487	11	1.864.752	
12	PPII Masyumi	456.718	1				
13	Masyumi baru	152.289	-				
14	PSII	375.920	1				
15	PSII 1905	152.820	-				
16	PIB	192.712	-				
17	PCD	168.097	-				
18	PUI	269.309	-				
19	PK/PKS	1.436.565	7	8.325.020	45	8.206.955	
20	PID	62.901	-				
21	P. KAMI	289.489	-				
22	PAY	213.979	-				
23	PUMI	49.839	-				

Sumber: Irsyad Zamjani, 2009

Greg Fealy dan Anthony Bubalo menyebutkan bahwa bentuk awal PKS adalah gerakan Tarbiyah yang muncul pada permulaan 1980-an dan hingga awal 1990-an merupakan gerakan keagamaan. Pada awal 1990-an kader-kader Tarbiyah mulai memimpin dewan mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi terbesar. Pada Agustus 1998, KAMMI dan para pemimpin Gerakan Tarbiyah dengan pendirinya Hilmi Aminuddin di belakang layar mendirikan partai politik

Islam yakni Partai Keadilan dan memunculkan Dr. Nur Mahmudi Ismail lulusan AS sebagai presiden PK serta Dr. Hidayat Nurwahid lulusan Madinah sebagai Ketua Majelis Syuro. PK pada 1998 memiliki sekitar 60.000 anggota baik inti maupun pendukung dan ketika pembentukan PKS diumumkan pada pertengahan 2003, partai ini telah memiliki lebih dari 300.000 anggota.¹³⁴

Pada tanggal 20 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) didirikan dan diumumkan dalam sebuah konferensi pers di aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Para pendiri PK terdiri dari 52 orang tokoh dari berbagai latar belakang institusi, pendidikan, gender, suku bangsa dan profesi. Pendirian PK ini sebelumnya didahului dengan sebuah angket atau jajak pendapat di kalangan 6000 orang kader inti gerakan Tarbiyah di seluruh Indonesia, bahkan juga yang tengah berada di luar negeri. Jajak pendapat internal partai ini dilakukan sebagai upaya merespon situasi sosial politik setelah jatuhnya Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi pada tahun 1998. Jajak pendapat yang diikuti oleh 6000 kader inti ini dan dengan jumlah formulir yang kembali sebanyak 5800 (97%) menunjukkan hasil bahwa 68% responden menginginkan pendirian partai politik, sedangkan 27% responden menginginkan bentuk organisasi massa dan sisanya ingin bertahan dalam bentuk asal gerakan Tarbiyah yakni berupa yayasan, dakwah kampus, pesantren, dan lembaga-lembaga dakwah lainnya. Maka berdasarkan hasil tersebut 52 tokoh gerakan Tarbiyah kemudian merumuskan dan mendirikan Partai Keadilan (PK).¹³⁵ Namun dalam dinamikanya, ada beberapa orang pendiri di antaranya adalah: Yusuf Supendi (2010), Dr. H. Daud Rasyid Sitorus (2010), Tizar Zein (2010), Syamsul Balda dan Zirly Rosa Jamil (2003) yang menurut Aus Hidayat Nur,

¹³⁴ Reg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah*, h. 116.

¹³⁵ Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS, *Draft Kronologi Sejarah PKS*. (Jakarta, 2007), h. 1.

ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dikeluarkan karena pelanggaran disiplin organisasi partai dan ada juga yang memilih keluar karena merasa sudah tidak sejalan lagi dengan arah kebijakan partai dewasa ini.¹³⁶

Partai Keadilan (PK) dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa. Partai ini menjadikan Islam sebagai asas partai serta berlambangkan Ka'bah yang di dalamnya terdapat dua bulan sabit di antara garis tegak. Partai ini memilih nama "Partai Keadilan", karena dengan menegakkan keadilan, Bangsa Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi di masa depan. Susunan pengurus PK terdiri atas Majelis Syuro yang diketuai oleh Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. sekaligus sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Dewan Syariah yang dipimpin Dr. Salim Segaf Al Jufri, M.A., serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. sebagai Presiden dan Syamsul Balda sebagai wakilnya. Partai Keadilan yang memiliki visi: keadilan, kemajuan, persatuan nasional dan kerja sama internasional bermarkas di sebuah Ruko (Rumah Toko) sewaan di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E Jakarta Selatan 12720. Setelah itu pada bulan 27 September di tahun yang sama PK mendeklarasikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PK DKI Jakarta di Istora Senayan yang dihadiri sekitar 50.000 massa dan diketuai Ahmad Heryawan, Lc. (kini Gubernur Jawa Barat). Kemudian berturut-turut dideklarasikan pula DPW PK Jawa Timur di Gelora Pancasila dan diketuai oleh Rofi' Munawar, Lc. Kemudian DPW PK Jawa Tengah yang diketuai Zuber Syafawi dan DPW Lampung yang diketuai oleh KH. Ir. Abdul Hakim. Dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan peresmian DPW di beberapa daerah, antara lain di Kaltim, Kalbar,

¹³⁶ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 75

Kalsel dan Bengkulu serta di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan juga terbentuk PIP (Pusat Informasi dan Pelayanan) di berbagai negara.¹³⁷

PK langsung mengikuti pemilu pertama di era Reformasi yakni 1999 dan hanya memperoleh suara sebesar 1.436.565 atau 1,36 % sehingga tidak menembus batas *electoral threshold*. PK berada diperingkat tujuh ² besar setelah PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dan mendapatkan 7 kursi di DPR RI serta membentuk Fraksi Reformasi bersama PAN. Partai ini memunculkan KH. Didin Hafidhudin MS sebagai calon Presiden RI dan ² membangun aliansi Poros Tengah dengan PPP, PAN, PBB yang kemudian memunculkan Gus Dur sebagai calon alternatif presiden dengan didukung pula oleh PKB. Setelah penolakan MPR atas laporan pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie, poros tengah tersebut mengusung Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pengganti BJ Habibie dengan mengalahkan Megawati.

Pada tanggal 20 Oktober 1999, Partai Keadilan memutuskan menerima tawaran kursi menteri dalam Kabinet Persatuan Nasional (KPN) yang dipimpin KH. Abdurrahman Wahid, yaitu dengan menempatkan Presiden Partai Keadilan Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Nur Mahmudi direkomendasikan DPP PK dari hasil Musyawarah Pimpinan Partai yang terlibat dalam Tim *Falah* Sidang Umum MPR (unsur MPP, Dewan Syari'ah dan DPP) yang menganggap pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terpilih berkat dukungan Poros Tengah.¹³⁸

Melalui rapat gabungan Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah dan Dewan Pimpinan Pusat PK, pengunduran diri Nur Mahmudi Ismail

¹³⁷ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 76

¹³⁸ Poros tengah adalah koalisi partai-partai politik Islam, seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera/PKS), Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Greg Barton, *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: LKS, 2002), h. 275

sebagai Presiden PK pada tanggal 16 April 2000 diterima dan disahkan. Nur Mahmudi mengundurkan diri karena diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Menteri Perhutanan dan Perkebunan (Menhutbun) dalam Kabinet Pembangunan Nasional. Sebagai penggantinya, Rapat Gabungan PK memutuskan mengangkat Wakil Presiden PK Untung Wahono, sebagai pejabat sementara Presiden PK. Kiprah Nur Mahmudi selama menteri tidak begitu menonjol, namun posisinya telah memberi kesempatan kepada PKS untuk mengakses berbagai sumber daya politik dan ekonomi di pemerintahan. Hal itu juga sekaligus sebagai pengakuan atas peran penting PKS dalam proses politik terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada tanggal 18 Mei 2000, DPP Partai Keadilan (PK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional I (Munas I) di Bumi Wiyata Depok. Acara pembukaan diikuti sekitar 150 orang utusan dari 27 DPW PK se-Indonesia dan ribuan penggembara. Munas dilaksanakan selama empat hari (18-21 Mei 2000) dengan acara inti berupa pembahasan AD/ART PK, penyusunan program kerja PK serta pemilihan pengurus baru. Acara Munas I PK pada tanggal 19 diwarnai dengan kampanye calon presiden PK periode 2000-2005. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2000, Munas I PK memilih Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden PK periode 2000-2005 dengan menyisihkan dua calon lainnya, Irwan Prayitno (Ketua Komisi VIII DPR) dan Anis Matta (mantan Sekjen DPP PK). Dalam proses pemilihan dengan cara voting tersebut, Hidayat Nur Wahid memperoleh 21 suara, Irwan Prayitno (13 suara) dan Anis Matta memperoleh 5 suara.¹³⁹

Pada tanggal 3 Maret 2001 Hidayat Nurwahid didampingi Fahri Hamzah dalam konferensi pers di Kantor DPP PK menyampaikan kepada publik bahwa kredibilitas Presiden Wahid sebagai pemimpin bangsa sangat

¹³⁹ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 77

merosot di mata masyarakat dengan indikator diterimanya secara bulat kesimpulan Pansus yang menyatakan presiden telah melakukan kebohongan publik. "Kebohongan publik serta tindakan-tindakan yang menjurus pada praktek KKN kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* sebenarnya hanyalah merupakan puncak gunung es yang demikian besar."¹⁴⁰ Secara lebih tegas, Hidayat mengatakan bahwa Presiden Wahid sudah semestinya mengakhiri sendiri masa kepemimpinan kontroversialnya karena tidak mampu melaksanakan amanah reformasi secara totalitas. "Wahid akan dikenang secara indah dan dipuji oleh bangsa Indonesia," lanjutnya. *Buloggate* menghasilkan keputusan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati menggantikan posisi sebagai Presiden RI kelima dan Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden.¹⁴¹

Pada perkembangan selanjutnya yakni tanggal 17 April 2003 sebanyak 264 peserta dan 131 peninjau dari 30 provinsi menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Istimewa (Munasis) Partai Keadilan di Asrama Haji Jawa Barat, Bekasi. Acara dibuka oleh KH Rahmat Abdullah selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan dan dihadiri oleh Presiden PK, Sekjen, Ketua MPP, Ketua Dewan Syariah Pusat PK, utusan dari unsur Majelis Syuro, DPP, MPP, DSP serta utusan dari 30 provinsi. Pada Munas ini pula Sidang Majelis Syuro XIII Partai Keadilan merekomendasikan agar PK bergabung dengan PK Sejahtera yang saat itu dipimpin Almuzammil Yusuf. Hasil Majelis Syuro itu disampaikan langsung oleh Presiden PK, Hidayat Nur Wahid yang menyebutkan ada dua alasan PK bergabung dengan PKS yaitu: (1) PK memiliki kedekatan visi dan misi dengan PK Sejahtera yakni ingin mensejahterakan rakyat. (2) PK Sejahtera

¹⁴⁰ *Sikap Kami (Kumpulan Seruan, Pernyataan Politik, Bayanat dan Pidato Politik DPP PK*, Jakarta: Humas DPP PK, 2001), h. 100. Dapat dibaca juga dalam Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu PKS dan AKP*, h. 77

¹⁴¹ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 78

memiliki SDM yang handal. Pada tanggal 20 April 2003 ratusan ribu kader dan simpatisan PKS memadati Monumen Nasional (Monas), Jakarta untuk mengikuti deklarasi PKS. Dalam acara tersebut, selain deklarasi PKS juga ada pernyataan resmi penggabungan Partai Keadilan (PK) ke PK Sejahtera dan Ketua Umum PK Sejahtera Almuzzamil Yusuf menyatakan menerima penggabungan itu. Menurut Almuzzamil, PKS merupakan kelanjutan dari PK dengan berbagai pembaharuan dan perbaikan yang belum dapat dicapai PK. Dasar bergabungnya PK adalah Munas I PK yang berlangsung 17 hingga 19 April 2003 yang menentukan bahwa Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera.¹⁴²

Seusai Pemilu 2004, Musyawarah Majelis Syuro (MMS) IV PKS yang berlangsung 24-25 April 2004 menghasilkan beberapa keputusan. *Pertama*, PKS menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 dan ungkapan apresiasi kepada kader, konstituen, simpatisan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menyelenggarakan Pemilu 2004 dengan lancar. *Kedua*, berdasarkan hasil Jaring Capres Emas di lingkungan internal PKS, Hidayat Nur Wahid mendapat suara terbanyak akan tetapi karena perolehan suara PKS tak mencapai 20%, maka sesuai hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro III, PKS tidak mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai Capres/Cawapres RI. Kemudian setelah Amien Rais, calon yang didukung PKS pada putaran pertama kalah, pada tanggal 26 Agustus 2004 PKS membuat nota kesepahaman dengan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemilihan Presiden putaran kedua, 20 September 2004. Beberapa kesepakatan yang dilakukan, adalah: (1) konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, diantaranya dalam keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota

¹⁴² M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS, Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, h. 63

2 kabinet yang melakukan korupsi, (2) mempertahankan kedaulatan NKRI, (3) melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia, (4) meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat, (5) mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.¹⁴³

Walau pun gagal menjadi capres, Hidayat Nur Wahid pada tanggal 6 Oktober 2004 dengan selisih hanya dua suara, terpilih menjadi Ketua MPR RI periode 2004-2009. Hidayat yang juga Presiden PKS, dicalonkan oleh koalisi keummatan yang terdiri PPP, PKB, PAN, PKS dan PD, satu paket dengan AM Fatwa dari PAN, Aksa Mahmud dan Mooryati Soedibyo yang menjadi Wakil Ketua MPR. Hidayat mengatakan akan mengembalikan lembaga MPR menjadi lembaga terhormat untuk mewakili rakyat setelah pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan. Capaian Presiden PKS Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Majelis Perwakilan Rakyat, merupakan sebuah keberhasilan nyata dari mobilitas politik PKS dalam kanca politik nasional. Meskipun belum mencerminkan keberhasilan PKS secara keseluruhan karena jumlah kursinya yang tidak memadai. Hal ini membatasi PKS dalam memaksakan sejumlah agenda prioritas parti sebagai kebijakan negara.¹⁴⁴

Setelah pada tanggal 11 Oktober 2004 atau lima hari setelah dilantik sebagai Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid resmi mengundurkan diri sebagai Presiden PKS, Majelis Pertimbangan Partai menunjuk Ketua DPP Wilayah Dakwah I Tifatul Sembiring sebagai Pejabat Sementara. Tak lama setelah itu terjadi bencana besar di Aceh berupa gelombang Tsunami pasca gempa besar. PKS pun segera membentuk Komite kemanusiaan Indonesia untuk Aceh (KKIA) guna membantu korban gempa bumi dan gelombang tsunami

¹⁴³ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 79

¹⁴⁴ Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS; Suara dan Syariah*, h. 186

di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, pada tanggal 7 Januari 2005 bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) dalam pemulihan (*recovery*) mental para pengungsi Aceh.¹⁴⁵

Pada tanggal 29 Mei 2005, Majelis Syuro PKS menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden DPP PKS Periode 2005-2010.⁷⁷ Dalam pemilihan presiden partai, tidak dilakukan kampanye lazimnya dilakukan partai politik lainnya karena semuanya diputuskan melalui musyawarah di Majelis Syuro. Dengan melalui pemilihan raya internal kader inti PKS, KH. Hilmi Aminudin oleh 51 orang anggota Majelis Syuro didaulat sebagai Ketua Majelis Syuro menyisihkan kandidat lainnya yakni Abdul Hasib, Salim Segaf Al Jufri dan Surahman Hidayat. Sementara Surahman Hidayat terpilih menjadi Ketua Dewan Syariah Pusat dan kursi Ketua Majelis Pertimbangan Partai ditempati Suharna Surapranata. Mendampingi Tifatul, Anis Matta menjabat Sekretaris Jenderal dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum. Dalam musyawarah tersebut juga dihasilkan beberapa keputusan strategis partai di antaranya, (1) penambahan jumlah anggota Majelis Syuro untuk mengakomodasi peningkatan jumlah kader PKS, (2) penegasan kembali PKS sebagai partai dakwah dan Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai, sehingga keputusan Majelis Syuro mengikat seluruh organisasi, termasuk keputusan suksesi pemilihan Ketua lembaga tinggi partai.

Tak lama setelah ditetapkannya Tifatul Sembiring sebagai presiden PKS, Musyawarah Nasional (Munas) I PKS digelar pada 23 hingga 31 Juli 2005, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta. Di antara agendanya adalah amandemen AD/ART dan Rencana Strategi PKS ke depan. Munas ini merupakan rangkaian dari Musyawarah Majelis Syuro II. Dalam Munas I ini, selain agenda utamanya Musyawarah Majelis Syuro II, juga dilakukan

¹⁴⁵ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 79

sosialisasi produk Majelis Syuro. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberikan sambutan pada pembukaan Munas I PKS di Jakarta, 27 Juli 2005 mengatakan “PKS sebagai bagian dari komponen bangsa harus ikut bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa.”¹⁴⁶

Tifatul Sembiring beserta sejumlah ketua umum partai pada tanggal 3 Januari 2006 hadir dalam penyerahan bantuan dana pemerintah di Gedung Depdagri. Sebanyak 14 partai politik dari 16 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI menerima bantuan dana partai politik dengan besaran dana yang disesuaikan jumlah kursi masing-masing di legislatif. Dasar perhitungan yang dilakukan adalah, pemerintah menghargai satu kursi di DPR sebesar Rp 21 juta dan jumlah yang diterima partai adalah harga tersebut dikalikan dengan perolehan kursi masing-masing partai dalam Pemilu 2004.¹⁴⁷

Menghadapi Pemilu 2009, PKS menargetkan peningkatan kadernya dari 500 ribu orang menjadi 2 juta orang. Menurut Presiden PKS, Tifatul Sembiring dalam orasinya pada tanggal 26 Juli 2006 menyatakan optimis bisa meraih 20 persen suara pada Pemilu 2009 mendatang mengingat pertumbuhan jumlah kader PKS cukup tinggi. Dari tahun 1999 ke 2004, jumlah kader PKS meningkat dari 60.000 orang menjadi 500 ribu orang atau hampir 8 kali lipat. Untuk lima tahun yang akan datang diperkirakan akan mencapai lima kali lipatnya. Menjelang Pemilu 2009, DPP PKS juga melakukan konsolidasi dalam bentuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan 25–27 Agustus 2006 di Hotel Century Jakarta. Rapimnas ini mensosialisasikan program-program yang sudah disusun melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satunya adalah pencapaian target Pemilu 2009 sebesar 20% dan untuk mencapai perolehan

¹⁴⁶ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 80

¹⁴⁷ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 80

suara tersebut akan dilakukan perekrutan kader besar-besaran pada tahun 2006 hingga 2008. Namun ternyata target pertumbuhan kader yang dicanangkan tidak tercapai, demikian pula dengan target perolehan suara, hanya terjadi peningkatan suara yang kecil, dari 7,2% menjadi 7,88%. Walaupun demikian peringkat PKS naik di urutan ke-4 dan perolehan kursi juga meningkat dari 45 menjadi 57 kursi.¹⁴⁸ Dalam hal ini PKS hanya mendapat berkah dari pembagian sisa suara.

B. Konsolidasi Ideologi Politik Islam dan Munculnya AKP di Turki

Kemunculan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) di tahun 2001 dan memperoleh keberhasilan luar biasa di Pemilu 2002 bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari rangkaian partai-partai berhaluan Islam yang didirikan oleh gerakan sosial keagamaan *Milli Görüş*. Situasi sebelum lahir *Milli Görüş* dan partai-partai politik berhaluan Islam yang didirikannya, sangat tidak kondusif bagi setiap gerakan Islam bahkan boleh dibilang sangat represif. Republik Turki yang sejak berdirinya pada tahun 1923 memiliki konstitusi sekuler memang menganggap agama dan simbol-simbol keagamaan sebagai ancaman bagi konstitusi negara. Pendiri dan pemimpin gerakan Islam An Nur yakni Said Nursi berulang kali dipenjarakan atau diasingkan karena pemerintahan Turki sangat represif terhadap setiap manuver gerakan Islam yang dianggap sebagai upaya makar terhadap konstitusi sekuler.¹⁴⁹ Republik Turki disebut sebagai negara ultra sekuler, sebab melebihi standar sekulerisme negara-negara Barat sekuler yang masih memberi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan pula sisi keagamaannya.

¹⁴⁸ Lihat berita Kompas, *PKS Partai Kader yang Tidak Tergantung Satu Sosok*, dapat diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/07511951/pks-partai-kader-yang-tak-tergantung-pada-satu-sosok>. diakses 20 September 2018

¹⁴⁹ Serif Mardin, *Religion and Social Change in Modern Turkey, The Case of Bediuzzaman Said Nursi* (New York: New York Press, 1989), h. 90-93

Namun faktanya selama puluhan tahun paham sekuler dipaksakan di Turki, masyarakat Turki tetap memegang teguh keyakinan, tradisi dan budaya Islam yang sudah berakar lama di masyarakat sejak di masa Khilafah Utsmaniyah atau *Ottoman Empire*, sehingga sekulerisme hanya dianut oleh kelompok elit Kemalis (pengikut Kemal Pasha) dan militer.¹⁵⁰ Pada akhir 1960-an militer mengganti taktiknya dan mulai mendekati kelompok-kelompok Islam karena menghadapi ancaman serius dari gerakan sosialisme-marxisme yang di tengah kondisi perekonomian Turki yang terpuruk mengkritik tajam elit borjuis pemerintahan Turki dan melakukan demonstrasi-demonstrasi menuntut perbaikan nasib rakyat, pemberantasan korupsi dan memperdengarkan pula ide revolusioner. Beberapa tokoh gerakan Islam dibebaskan dari penjara dan kelompok-kelompok Islam memperoleh keleluasaan yang lebih untuk bergerak di bidang sosial keagamaan. Strategi militer yang menggalang kekuakatan dengan mendekati kelompok Islam untuk menghadapi agresifitas kelompok sosialis-marxis dalam pergolakan politik di Turki, telah membawa hikmah berupa perkembangan pesat Islam di tengah cengkaman sekularisme.¹⁵¹

Menurut Vali Nasr ketika konflik terjadi secara berlarut sepanjang tahun 1970 hingga kudeta militer 1980, militer Turki memang tidak memiliki pilihan untuk tidak bekerjasama dengan kelompok Islam guna meredakan ketegangan politik yang dipicu oleh konspirasi kelompok buruh yang menggalang sejumlah aksi mogok kerja dan penutupan pabrik yang menggoyahkan stabilitas keamanan dan tidak menentunya perkembangan politik. Pada masa ini larangan pendidikan Islam dicabut, kelompok-kelompok yang berafiliasi gerakan *Nurcu* hadir kembali, yang menyebabkan

¹⁵⁰ Ahmed Kuru dan Alferd Stepan, *Democracy, Islam, and Secularisme in Turkey* (New York: Columbia University Press, 2012), h. 49-50

¹⁵¹ M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki* (Bekasi: PT. Penjuru Ilmu Sejati, 2015), h. 51-55

salah satu tokoh Islamis Fathullah Gulen yang menginisiasi banyak pendirian lembaga pendidikan Islam di Turki mulai mendapatkan tempat.¹⁵²

Maka gerakan *Milli Görüş* didirikan oleh Necmettin Erbakan, sejak 1970 berturut-turut mendirikan partai politik dengan mengusung pandangan ideologi Islam. Erbakan dan kelompoknya mendirikan *Milli Nizham Partisi* (MNP) atau Partai Keteraturan Bangsa, *Milli Slamet Partisi* (MSP) atau Partai Keselamatan Bangsa, *Refah Parti* atau Partai Kesejahteraan dan *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan di tahun 1997 yang dibubarkan pada tahun 2001. Sikap militer berubah menjadi kembali represif setelah melihat partai-partai politik berhaluan Islam yang didirikan *Milli Görüş* memperoleh dukungan yang cukup besar dari masyarakat Turki yang tidak pernah berhasil disekulerkan. Akibatnya partai-partai berhaluan Islam yang didirikan berulang kali selalu dibekukan dan tokoh-tokohnya dipenjarakan.¹⁵³

Kondisi sosial politik yang tidak stabil semakin memperburuk kondisi perekonomian Turki sehingga berpengaruh pada minimnya kesejahteraan rakyat Turki. Oleh karena itu Recep Tayyip Erdogan berbeda dengan teman-temannya sesama kader *Fazilet Partisi* yang mendirikan *Saadet Partisi* atau Partai Kebahagiaan yang tetap berhaluan Islam *Milli Görüş*, mendirikan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di tahun yang sama dengan berdirinya *Saadet Partisi* yaitu tahun 2001. AKP memilih berkompromi dan bekerjasama dengan militer dan kelompok elit sekuler agar terwujud stabilitas politik yang memungkinkan pemerintahan Turki untuk memperbaiki ekonomi. Strategi ini sering dikritik oleh kelompok Islam di Turki, terutama pada permulaan kehadiran AKP. Erdogan dan AKP dianggap pragmatis dan meninggalkan

¹⁵² Lihat Vali Nasr, *Force of Fortune, The Rise of The New Muslim Middle Class and What it Will Mean for Our World* (New York: Free Press, 2009), h. 235.

¹⁵³ Ahmed Kuru dan Alferd Stepan, *Democracy, Islam, and Secularism in Turkey*, h. 257

ideologi politik Islam yang sekian lama diperjuangkan kelompok *Milli Görüş*.

1. Situasi di Turki Sebelumnya Lahirnya Partai Politik Islam.

Pada periode Kemal Ataturk dan penerusnya di era satu partai yakni CHP, ideologi negara sekuler dijaga ketat dari setiap penyimpangan. Militer di Turki berusaha keras mempertahankan ideologi sekuler, beberapa kali militer masuk ke dalam dunia untuk mengambil kekuasaan, melakukan kudeta tahun 1960, 1971, dan 1980 serta sejak tahun 1990-an bertindak diam-diam, menggunakan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan pemerintah yang tidak mereka sukai. Maka situasi politik di Turki sangat tidak kondusif bagi perkembangan partai Islam, yang sebetulnya masih memiliki basis masa tradisional.

Ironisnya, kebangkitan kembali Islam dalam kehidupan di negara ini, sebagian besar dimungkinkan karena peran militer yang selama tahun 1980-an mengurangi represinya pada Islam, karena saat itu kelompok kiri radikal telah mendapatkan pengikut yang kuat di Turki. Konflik antara kelompok kiri radikal dengan golongan kanan menyebabkan keributan yang luar biasa. Ideologi sekuler kelompok kanan seperti fasis nasionalisme dan kelompok kiri (campuran Marxisme-Leninisme) tumbuh dari keresahan sosial dan mereka menyerukan revolusi atau perubahan sosial secara radikal. Mahasiswa dan pekerja melakukan pawai, menyerukan pemogokan dan melahirkan protes jalanan besar-besaran. Faksi kiri dan kanan terlibat dalam bentrokan kekerasan di kampus dan di jalan-jalan kota sehingga terjadi konfrontasi berdarah serta pembunuhan-pembunuhan. Kondisi ini terjadi ketika militer melancarkan kudeta ketiga, tahun 1980 dan memenjarakan ribuan militan sampai keamanan pulih kembali.¹⁵⁴

¹⁵⁴ M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, h. 51-54

Oleh karena itu sebagai sebuah strategi, kepemimpinan militer mulai berpaling ke Islam, sebagai upaya melawan kelompok radikal. Dengan memaafkan sebagian kecil dari kelompok konservatisme agama sehingga dapat kembali ke ranah publik, para jenderal berharap untuk mengalihkan perhatian rakyat dari hasutan revolusi. Larangan pendidikan Islam ditiadakan dengan harapan bahwa pendidikan agama di sekolah akan membuat siswa tidak mudah direkrut oleh ekstremis sekuler, sehingga setelah sekian lama dimarginalkan, kelompok-kelompok Islam yang terkait dengan gerakan *Nurcu* (pengikut ulama besar Turki Said Nursi) dan gerakan sufi mulai muncul kembali. Saat itulah Fethullah Gulen mendapatkan popularitas yang luar biasa dengan pesan-pesan keagamaannya.¹⁵⁵ Partai politik baru yang berhaluan Islam dibentuk untuk mengambil keuntungan dari kebangkitan Islam serta menjadi saluran pengaruh sosial ke dalam politik. Menurut Sitaresmi, militer Turki beranggapan bahwa mereka bisa memanfaatkan Islam untuk sementara waktu untuk kemudian pada saatnya ditekan kembali. Mereka tidak sadar bahwa Islam tetap merupakan kekuatan vital di bawah permukaan kehidupan sekuler Turki, yang bila sekali diberi kesempatan dengan cepat menjadi kuat.¹⁵⁶ Seorang pemimpin oposisi terkemuka Islam mengatakan bahwa "Kemalisme sekuler adalah sebuah penyimpangan dan bukan norma yang baku. Kemalisme pernah berakar di bagian kecil elit berpendidikan tinggi dari universitas di pusat-pusat kota Ankara dan Istanbul Turki, namun Turki selamanya adalah *Ottoman Empire*."¹⁵⁷

Kepemimpinan militer mulai mengakui pengurangan peran dan kontrol negara serta penguatan kapitalisme memang dibutuhkan dan tugas itu

¹⁵⁵ Lihat tulisan Neval Sevindi, *Contemporary Islamic Conversation; M. Fethullah Gulen in Turkey, Islam and The West* (New York: State University of New York Press, 2008).

¹⁵⁶ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia (1999-2009) dan Adalet ve Kalkinma (AKP) di Turki 2002-2007*, h. 83

¹⁵⁷ Marvin Howe, "Turkey a Nation Divided over Islam's Revival," dalam Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu PKS dan AKP op.cit.*, h. 84

kemudian diemban oleh Turgut Özal, seorang teknokrat dipilih menjadi perdana menteri dengan dukungan para jenderal. Seorang insinyur elektrik dan sudah bekerja sebagai birokrat sejak lama sebelum menjadi seorang manager di Bank Dunia dan pimpinan dari sejumlah perusahaan swasta di Turki. Özal juga dianggap mempunyai dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan bisnis dan ekonomi. Secara politis dia adalah kanan tengah dan mempunyai hubungan baik dengan kelompok-kelompok Islam, tapi cukup sekuler untuk mendukung terciptanya negara militer Turki. Dia memadukan antara kesalehan kelompok Muslim dengan kebijakan yang bersahabat dengan dunia usaha. Özal mengesahkan perbankan syariah dan menjadi perdana menteri pertama yang pergi haji dalam masa jabatannya, namun dia juga mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1987. Özal juga merumuskan titik-titik pusat baru dan lebih layak dari politik Turki, liberalisme ekonomi, aliran kanan tengah, dan Islam yang ringan, semuanya dibingkai didalam kemalisme. Kebanyakan orang Turki melihatnya sebagai figur penting dalam sejarah Turki sesudah era Ataturk.¹⁵⁸

Ketika Özal berkuasa pada tahun 1983, perekonomian masih merupakan warisan dari Kemalisme. Upaya industrialisasi besar-besaran melahirkan manfaat bagi elit dunia usaha di Istanbul tapi juga memberikan kesempatan yang jelas untuk usaha kecil, termasuk lapangan kerja untuk kelas pekerja rendah dan menengah. Industri menggantungkan pada import dan pabrik rakitan, dengan sedikit upaya untuk menghasilkan barang jadi untuk ekspor. Negara melindungi industri tertentu dengan tarif tinggi dan nilai tukar yang baik serta juga subsidi. Özal menjamin pinjaman dari bank dunia dan IMF, yang dengan mereka, Özal bekerja menyusun rencana restrukturisasi yang menjadi engsel bagi perubahan dari neo-liberal menjadi

¹⁵⁸ Banu Eligur, *The Mobilization of Political Islam in Turkey*, (Candbrige: Candbrige University Press, 2010), h. 122.

fokus kepada desentralisasi, privatisasi dan fokus pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan redistribusi kewenangan dari negara kepada pasar. Akan ada tekanan baru antara keterbukaan sosial dan partisipasi warga masyarakat. Banyak industri di swastakan sementara perusahaan lain yang sudah tidak menguntungkan ditutup. Özal dengan tegas mengalihkan arah pemerintahan yang mendukung para eksportir dan menghasilkan pendapatan devisa. Ketentuan tarif nilai tukar dan subsidi diubah guna meningkatkan ekspor. Di antara yang tumbuh subur adalah pabrik tekstil dan furnitur, kebanyakan berada di kawasan industri di jantung Anatolia yang cukup jauh dari Istanbul.¹⁵⁹

Poros birokrasi tingkat tinggi dan pengusaha besar Ankara-Istanbul mulai kehilangan kontrol atas ekonomi sampai lahirnya pengusaha baru dari kota-kota kecil di Anatolia, mirip yang terjadi di American Midwest, di mana Istanbul adalah New York City. Generasi pengusaha baru yang sukses masuk golongan yang konservatif, tapi mereka menyadari bahwa pertumbuhan bisnis mereka bergantung pada bergabungnya dengan ekonomi global melalui peningkatan perdagangan. Rezim ekonomi lama belum pernah mendukung mereka, sehingga mereka tidak begitu tertarik dalam model yang dikendalikan oleh negara. Sebaliknya, mereka cenderung mendukung pengurangan kontrol dengan membangun demokrasi yang sebenarnya serta membangun suatu ekonomi pasar bebas. Reformasi Özal membuka jalan bagi *booming* pertumbuhan ekonomi karena nilai komoditi ekspor. Menurut Sitaresmi, transformasi ekonomi yang berlangsung sangat pesat di saat globalisasi mengubah kehidupan ekonomi dan sosial Turki. Kekuatan ekonomi beralih kepada usaha kecil dan menengah dan jantung Anatolia menaungi Istanbul sebagai mesin pertumbuhan. Pada tahun 2004,

¹⁵⁹ Banu Eligur, *The Mobilization of Political Islam in Turkey*, (Candbrige: Candbrige University Press, 2010), h. 123

perusahaan-perusahaan kecil dan menengah menyumbang seperempat dari ekspor Turki. Sebanyak 80% dari perusahaan-perusahaan tersebut bahkan belum ada saat Özal menjadi perdana menteri.¹⁶⁰

2. Gerakan Dakwah *Milli Görüş* (MG) atau Pandangan Kebangsaan

Kelompok Kemalis terus berada dalam kendali kekuasaan selama beberapa dekade setelah kematian Atatürk di tahun 1938, dengan militer menjadi pemandu Kemalisme yang secara ketat menegakkan sekularisme Atatürk dalam negara dan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Atatürk itu, Turki menjadi sebuah Republik yang dipimpin seorang presiden dan ada parlemen. Partai yang berkuasa di parlemen melalui pemungutan suara akan menentukan siapa yang menjadi perdana menteri dan biasanya ketua partai. Walaupun perangkat-perangkat demokrasi sudah dimiliki, Atatürk memerintah dengan otoriter dan CHP menjadi satu-satunya partai untuk waktu yang lama sebelum adanya partai-partai baru yang lain. Seiring berjalannya waktu Atatürk berkeinginan melakukan evolusi demokrasi parlementer dan bahkan mempelopori pembentukan partai-partai oposisi selama masa jabatannya, meskipun partai-partai tersebut belum pernah mendapatkan momentum yang cukup untuk mengambil kekuasaan.

Sampai akhirnya tahun 1950 Partai Demokrat akhirnya berhasil menang di Pemilu parlemen dengan *platform* campuran antara ideologi Kemalisme sekularisme militan dengan liberalisme ekonomi yakni mengurangi peran negara dalam perekonomian. Namun proses evolusi demokrasi di Turki penuh dengan ketegangan. Partai Demokrat memenangkan 2 pemilu lagi, pada tahun 1954 dan 1957, tetapi akhirnya dibubarkan pada tahun 1960 karena berbicara terlalu banyak tentang Islam

¹⁶⁰ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 86

dan pemimpinnya, Perdana Menteri Adnan Menderes, diadili serta dihukum mati pada tahun 1961 karena dianggap berkhianat pada negara.¹⁶¹

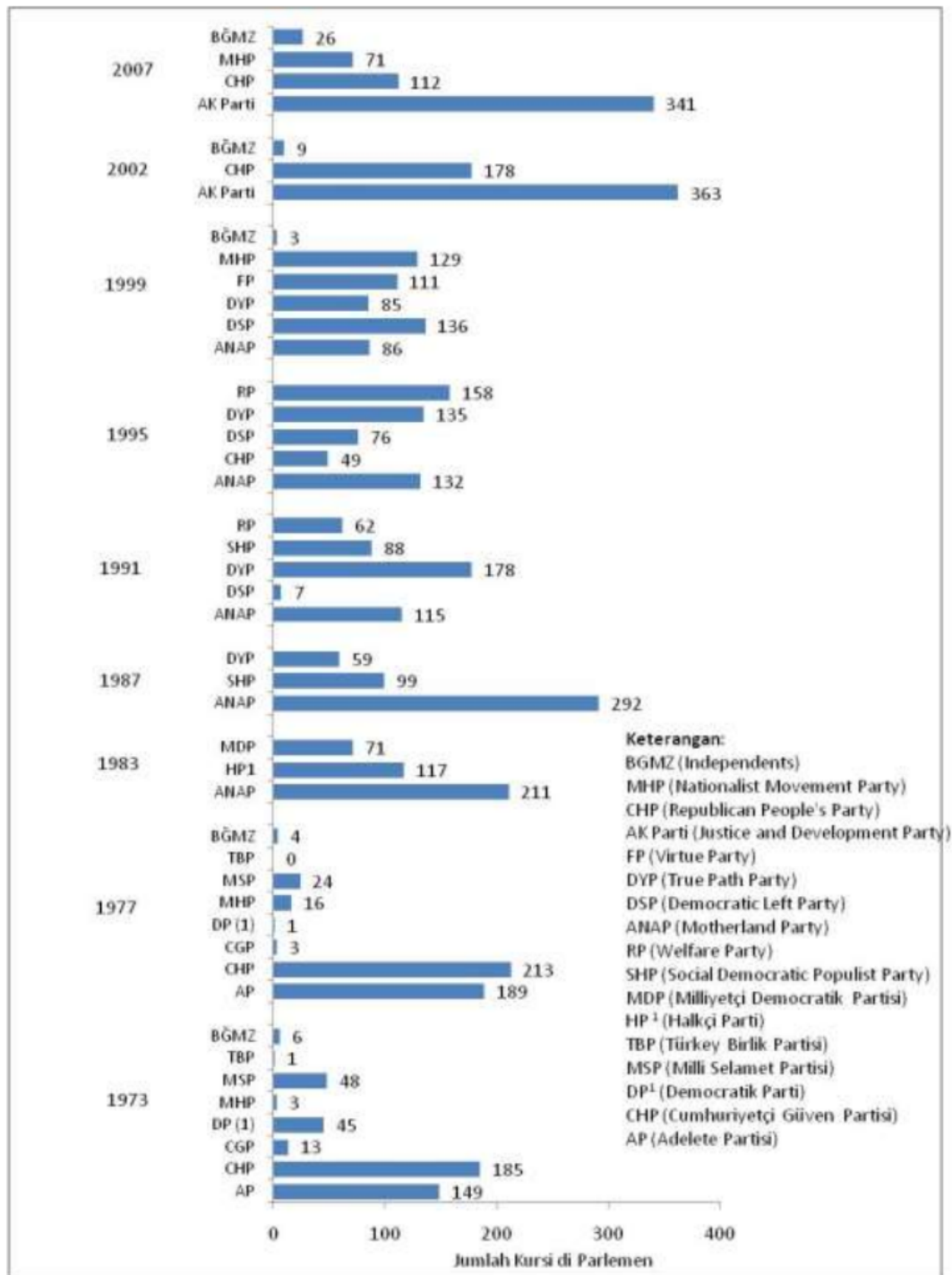
Sejak berakhirnya masa Ottoman dan pembentukan Republik Turki modern, Turki telah menyelenggarakan pemilu 25 kali. Pemilu di Turki dimulai pertama kali pada tahun 1923 atau tepat setelah Kemal menumbangkan kekuasaan Ottoman. Dan terakhir Turki menyelenggarakan pada tahun 2018 yang dimenangkan secara telak oleh AKP.¹⁶² Menurut catatan Sita resmi Pemilu yang lebih bebas dan terbuka di Turki, tampaknya baru dimulai pada 2002, ketika AKP tampil sebagai pemenang. Karena pada saat itu tidak ada kudeta atau pembekuan sebuah partai yang dilakukan militer atau oleh Mahkamah Konstitusi Turki.

Namun karena konstitusi melarang seseorang atau **sebuah organisasi** **maupun partai politik menunjukkan nama atau simbol-simbol agama**, maka **tidak mungkin sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam**. Namun orang bisa melihatnya sebagai partai politik berhaluan Islam dari aktivisme Islamisnya, para tokohnya dan basis massanya. Hal itulah yang terjadi dengan AKP dalam keseluruhan praktik politiknya. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan hasil Pemilu di Turki sejak 1973, yakni sejak munculnya partai politik bentukan Necmettin Erbakan yang berhaluan Islam. Kita bisa membaca bagai pola peningkatan suara partai Islam dari waktu ke waktu:

¹⁶¹ “Why was Adnan Menderes executed? How is that decision perceived in modern Turkey?” diakses melalui *Quora*, <https://www.quora.com/Why-was-Adnan-Menderes-executed-How-is-that-decision-perceived-in-modern-Turkey>, 17 September 2018

¹⁶² Pada pemilu 2018, AKP memperoleh 42,47% suara, dan erdogan memenangkan pemilihan presiden Turki dengan 52,65% suara.

Grafik. 1
 Hasil Pemilu Turki 1973-2007



Sumber; Sitaresmi Soekanto

Setelah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani (*Ottoman Empire*) Islam di Turki sejak pemerintahan Mustafa Kemal Pasha sangat ditekan. Kemal Ataturk menganut paham sekulerisme dan mengubah Turki menjadi negara sekuler setelah menghapuskan Khilafah Islamiyah dengan berdirinya Republik Turki pada 1923. Undang-undang Islam diganti Kemal Ataturk dengan undang-undang nasionalis sekuler dan ia memegang kekuasaan hingga kematiannya pada tahun 1938. Ismet Ainunu kemudian menggantikannya selama 21 tahun hingga wafatnya pada tahun 1959 dan setelah itu Ba Yar selama 13 tahun (1960-1973).

Munculnya semangat keislaman yang bertolak belakang dari semangat sekulerisme justru muncul dari tokoh-tokoh Muslim yang kuliah di Eropa. Ketika kembali ke Turki mereka memiliki semangat demokratisasi dan semangat keislaman. Salah seorang yang menonjol adalah Necmettin Erbakan yang mendirikan gerakan Islam modern *Milli Görüş*.¹⁶³ Selanjutnya bekerja sebagai pimpinan di beberapa perusahaan dan kemudian beralih ke dunia politik serta terpilih sebagai Deputy di Konya pada 1969. Sebelum mencapai kesuksesan di dalam karir politiknya, Erbakan sebenarnya telah memperoleh kesuksesan juga dalam dunia bisnis industri dan menghasilkan beberapa penemuan. Ideologi Erbakan yang berhaluan Islam tergambar jelas dalam manifesto *Islamische Gemeinschaft Milli Görüş* (IGMG) yang

¹⁶³ Nechmetin Erbakan, lahir pada 29 Oktober 1926 di Sinop, Turki Utara dan hingga wafatnya tanggal 27 Februari 2011 kini masih aktif di dunia politik sebagai Ketua Umum Saadet Partisi menggantikan Nurman Kurtulmus. Beliau seorang insinyur lulusan Istanbul Technical University dan memperoleh gelar *PhD* dari *RWTH Aachen University*, Jerman yang setelah kembali ke Turki, menjadi dosen di almaternya serta menjadi profesor pada tahun 1965. Lihat Youssef Aboul-Enein, *Observations of Turkish Islamist Politics: Islamic Democrats or Enemies of Turkish Secularism*, dalam *Small Wars Journal* July 7, 2010, diakses melalui <http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/470-aboul-enein.pdf>, 17 September 2018.

diterbitkannya pada tahun 1969 ketika masih studi di Jerman,¹⁶⁴ yang kemudian menjadi nama bagi organisasi yang didirikannya. Istilah *Milli Görüş* berasal dari manifesto ideologi Necmettin Erbakan.

Awalnya, yang dimaksudkan dengan *Milli* dalam *Milli Görüş* adalah *millah* Ibrahim, atau dalam pengertian yang luas: *ummat* yang didasari kesamaan tauhid. Jadi sebenarnya nama ini tidak ada kaitannya dengan *millet* dalam bahasa Turki yang berarti rakyat atau bangsa. Namun nampaknya hal itu dibiarkan dipahami secara luas sebagai Pandangan Kebangsaan karena terkait dengan konstitusi Turki yang sekuler. Sejarah dibentuknya asosiasi Islam *Milli Görüş* berawal dari direkrutnya pekerja-pekerja Turki oleh pemerintah Jerman Barat pada tahun 1960-an. Berjuta-juta Muslim dari Turki dan negara Muslim lainnya sejak saat itu mulai bermigrasi ke Eropa. Walaupun sebagian sudah pulang ke tanah airnya masing-masing, hingga kini masih ada lebih kurang 15 juta Muslim yang bermukim di Eropa Barat. Dan sejak awal tahun 1970-an pekerja-pekerja Turki di Eropa, terutama di Jerman sudah mulai mendirikan masjid-masjid dan tempat kegiatan umat Islam. Sehingga mulanya asosiasi ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kebutuhan ummat akan tempat ibadah, kemudian pengadaan dan pembinaan imam-imam dan khatib, barulah kemudian berkembang juga ke aspek budaya dan layanan sosial. Organisasi juga melakukan pemeliharaan dan pemakmuran masjid-masjid di Jerman, Belanda, Belgia, Perancis, Swiss, Austria, Italia, Inggris, Denmark, Swedia dan Norwegia. Ada 30 cabang *Milli Görüş*, 15 di antaranya di Jerman, 4 di Perancis, 2 di Austria, 2 di Belanda, dan di beberapa negara lainnya.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Lihat Gabriella Maranci (edit.), *Muslim Society and The Chalange of Secularization*, (New York: Springer, 2010), h. 189

¹⁶⁵ Gonul Told an Yasemin Akbaba, "Islamism in Westrn Eurpe; Milli Görüş in Germany," dalam *Interdisciplinary Journal of Research on Religion* Volume 1 (2016), Article 6, h. 4-16. Penjelasan tentang Milli Görüş dapat dibaca juga melalui

Di satu sisi, organisasi *Milli Görüş* di tiap negara memiliki hubungan kerja dengan IGMG pusat dan dengan cabang-cabang *Milli Görüş* lainnya, serta di sisi lain mereka juga bekerja sama dengan masyarakat lokal di mana mereka berada. Organisasi ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan ibadah dan pendidikan, termasuk pembinaan para imam dan khatib serta menyelenggarakan perayaan-perayaan Hari Besar Islam. Kantor pusat di Jerman mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kantor cabang, bekerja sama dengan masyarakat regional dan lokal terkait penyelenggaraan haji, penyembelihan hewan kurban, penentuan jadwal shalat atau penyelenggaraan jenazah. IGMG mengkoordinasikan 514 masjid beserta jamaahnya, 323 di antaranya berada di Jerman. Mereka juga menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, fasilitas untuk kegiatan perempuan, remaja dan olah raga. Fasilitas yang tersedia berjumlah 1833 lokal dan saat ini memiliki 87000 anggota. Shalat Jum'at di masjid-masjid anggota IGMG secara teratur dihadiri oleh 300.000 orang. IGMG pada dasarnya adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi Muslim, mencari solusi untuk permasalahan dan membantu proses integrasi Muslim dengan masyarakat Eropa. Karena itu IGMG juga mengimplementasikan dan mengembangkan konsep serta bersedia menjadi partner pemerintah dalam bidang sosial-politik. IGMG juga memiliki pedoman pandangan yang jelas terkait dengan: demokrasi, dialog antar-agama, integrasi, pendidikan dengan menggunakan bahasa ibu, hubungan antar-laki-laki dan perempuan serta cara berpakaian. Terkait dengan aliran politiknya yang berhaluan Islam, maka Erbakan pun menjadi pendiri dan

<http://www.igmg.de/verband/islamic-community-milli-goerues/what-does-milli-goerues-mean.html>, 17 September 2017

pemimpin dari rangkaian partai Islam yang dibangunnya sejak 1969 yakni MNP, MSP, *Refah Partisi*, *Fazilet Partisi* dan *Saadet Partisi*.¹⁶⁶

3. Dinamika Politik di Turki dan Lahirnya AKP.

Di Turki tidak henti-hentinya terjadi instabilitas politik yang salah satu penyebabnya adalah campur tangan militer di dalam pemerintahan di Turki. Pada tahun 1980, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa kudeta militer. Walaupun keadaan ini berangsur-angsur mulai berkurang, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia secara terang-terangan masih sering terjadi. Perlawanan suku Kurdi dan etnis Armenia yang ada di negara ini merupakan sumber konflik politik yang terus berlangsung di negeri ini. Belum lagi dengan negara Armenia dan Yunani sebagai negara tetangga Turki. Ketika partai buruh al-Kurdastani melakukan pemberontakan bersenjata karena ingin mendirikan negara Kurdi, maka militer Turki menumpasnya dan korban yang terbunuh dalam peristiwa ini mencapai lebih dari 40.000 orang. Pada saat itu Turki dipimpin oleh Turgut Özal yang setelah wafat digantikan oleh Süleyman Damirel pada tahun 1993 dengan Tansu Çiller sebagai perdana menteri wanita pertama pada tahun yang sama.¹⁶⁷

Pada tahun 1996 Turki menjalin kerja sama di bidang militer dengan Israel yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kemarahan bangsa Arab dan kaum Muslimin. Padahal sejak awal 1990 Turki sedang mengalami krisis sosial, politik dan ekonomi atau krisis multidimensional yang sangat berat. Krisis politik ditandai dengan berganti-gantinya pemerintahan sejak tahun 1995, dimulai dari Necmettin Erbakan (Islam), kemudian Tansu Çiller yang berduet dengan Mesut Yilmaz, berganti lagi Erbakan bersama Çiller,

¹⁶⁶ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia (1999-2009) dan Adalet ve Kalkinma (AKP) di Turki 2002-2007*, h. 90

¹⁶⁷ Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003) h. 495.

kemudian Yilmaz. Pada tahun 1999, Yilmaz dipecat dan digantikan oleh Bülent Ecevit. Dan pada tahun 1999, pemerintah Turki menangkap Abdullah Öcalan (tokoh Kurdi) yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Akibatnya kondisi politik di Turki semakin tidak stabil.

Dan ditambah krisis ekonomi, maka puncaknya pada tahun 2001 krisis ekonomi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Turki. Rakyat dan pihak swasta kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan. Mereka menginginkan perubahan. Masalah serius di dalam aspek sosial, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bangsa Turki. Selain kondisi sosial-politik dan ekonomi yang buruk sehingga menyebabkan krisis kepercayaan rakyat dan swasta terhadap pemerintahan, terjadi pula represi terhadap kebebasan *civil society*. Masyarakat Turki yang memiliki akar keislaman yang sangat kuat ditekan oleh pemerintah ultra sekuler.¹⁶⁸

Momentum yang tepat bagi kemunculan kembali partai berhaluan Islam adalah ketika Turki mengajukan proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa sehingga semakin menguat tuntutan melakukan demokratisasi yang secara tidak langsung melemahkan posisi militer dan sekuler yang represif terhadap Islam serta sebaliknya memberi keleluasaan pada partai berhaluan Islam.¹⁶⁹ Bila dilakukan kilas balik terhadap kemunculan partai politik berhaluan Islam, maka dengan jelas nampak bahwa itu semua itu bermula dari Erbakan pemimpin *Milli Görüş* yang pada 1969, di tengah kondisi Turki yang sangat ultra sekuler dan militer yang sangat represif, mendirikan MNP yakni partai berhaluan Islam yang dikategorikan Kanan-Tengah. Mereka menyebut diri mereka sendiri partai Konservatif-Demokrat. Tak lama setelah berdiri segera dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap

¹⁶⁸ Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*), *Introductory Brief About AKP* (Makalah 2008).

¹⁶⁹ Ali Aybey, *Turkey and European Union Relation: A Historical Assessment*, Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, Cil. 4 No: 1 (Guz: 2004), h. 19-3

melanggar konstitusi sekuler yakni mendirikan sebuah partai yang bernuansa Islam atau mencirikan simbol keislaman. Tak lama kemudian Erbakan kembali mendirikan partai politik yakni MSP berhasil mengikuti dua kali Pemilu yakni pada 1973 memperoleh 48 kursi. Pada tahun itu pula Erbakan yang juga adalah Ketua Umum MSP berkoalisi dengan CHP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa Bülent Ecevit selama terjadinya peristiwa krisis Cyprus di tahun 1974. Pada 1977 perolehan suara MSP menurun menjadi 24 kursi. Ketika terjadi kudeta militer pada tahun 1980, partainya tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Erbakan dilarang berpolitik.

Namun setelah ada referendum pencabutan larangan pada tahun 1987, Erbakan mendirikan kembali di Ankara partai politik bernama *Refah Partisi* yang dipimpin oleh Ahmet Tekdal serta memiliki slogan: *Justice is our goal*. Ideologi *Refah Partisi* adalah *İslamis Mili Görüş* dan didirikan oleh kelompok Islamis dengan para tokohnya adalah Ali Türkmen, Ahmet Tekdal, dan Necmettin Erbakan. *Refah Partisi* ikut berpartisipasi pada beberapa Pilkada dan menang di tiga kota: Konya, Sanliurfa, dan Van. Prosentase pemilih mereka hampir mendekati 5%. *Refah Partisi* kemudian ikut dalam Pemilu tahun 1991 dan berkoalisi dengan *The Nationalist Task Party* (Turkish: *Milliyetçi Çalışma Partisi/MCP*) dan *Reformist Democracy Party* (Turkish: *Islahatçı Demokrasi Partisi/IDP*). Prosentase suara yang diperoleh 16,9% dan koalisi ini memenangkan 62 deputi, namun 19 deputi yang diperoleh MCP dan 2 IDP meninggalkan *Refah Partisi* setelah itu.¹⁷⁰

Partai ini mendapatkan keuntungan dari persaingan tajam yang terjadi di antara dua pemimpin dari dua partai konservatif sekuler yang berbeda, yakni Mesut Yilmaz dan Tansu Çiller. Sehingga Erbakan bisa membawa

¹⁷⁰ Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*), *Introductory Brief About AKP*, (Makalah, 2008)

partainya kepada keberhasilan yang mengejutkan pada Pemilu 1995, menjadi partai terbesar dan memenangkan Pemilu serta ketua mereka Erbakan menjadi perdana menteri tahun 1996 dan merupakan perdana menteri pertama dari kelompok Islam. Erbakan berkoalisi dengan Tansu Çiller dari *Doğru Yol Partisi* (DYP) atau Partai Jalan Kebenaran. Erbakan berusaha lebih mengembangkan hubungan Turki dengan negara-negara Arab dalam upayanya mengikuti program-program kesejahteraan ekonomi mereka untuk dikembangkan di tengah masyarakat Turki.¹⁷¹ Pemerintahan Turki berusaha untuk melaksanakan pendekatan politik yang multi dimensional dengan negara-negara tetangga. Pandangan politik luar negerinya memiliki dua pilar, hubungan kerja sama yang erat dan persatuan di antara negeri-negeri Muslim, serta pertarungan melawan Zionisme. Ia membentuk persatuan *The Developing Eight D-8* yang bertujuan mencapai persatuan ekonomi dan politik yang kuat di antara negara-negara Muslim yakni Turki, Iran, Malaysia, Indonesia, Mesir, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria.¹⁷² Jumlah penduduk keseluruhan negara ini dengan jumlah lebih dari 800 juta orang atau 14% dari populasi dunia.

Citra Erbakan memburuk setelah isi pidatonya yang terkenal dianggap meremehkan demonstrasi menentang skandal *Susurluk*. Walaupun pemerintahannya tidak memiliki kaitan dengan skandal tersebut akan tetapi ia dipersalahkan pada saat itu karena tidak melakukan penolakan secara jelas terhadap skandal tersebut. Maka militer Turki secara bertahap mulai memberikan peringatan pada pemerintahan Erbakan dan bahkan akhirnya menekan Erbakan untuk mundur pada 1997. Sebenarnya pada saat itu sudah

¹⁷¹ Yousef Aboul-Eenein, *Observation of Turk Islamists Politics: Islamic Democrat or Enemies of Turkish Secularism*, dalam SmalwarsJournal.com, diakses melalui <http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/470-aboul-enein.pdf>, 27 Agustus 201

¹⁷²Kai Hafiz (edit.) *The Islamic Worl and the West: an Introduction to Political Cultures and*, (Leiden: Brill, 2000) h. 172

ada perjanjian resmi antara Perdana Menteri Erbakan dengan Tansu Çiller untuk saling bergantian dalam kurun waktu tertentu; Erbakan misalnya menjadi perdana menteri untuk suatu waktu tertentu dan dia akan turun untuk kemudian digantikan dengan Tansu Çiller. Akan tetapi karena partainya Çiller pemenang ketiga di parlemen maka ketika Erbakan turun, Presiden Süleyman Demirel menunjuk perdana menteri dari partai terbesar kedua yakni perdana menteri sebelumnya: Mesut Yilmaz. Namun karena perjanjian tersebut diketahui dan diarahkan oleh militer yang ternyata kemudian malah memberangus pemerintahan Erbakan.

Pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Erbakan dipaksa meletakkan pemerintahan oleh militer Turki pada tahun 1997 terkait dengan tuduhan memiliki agenda Islam. Terkait hal ini Alfian Alfian menulis, "...kudeta 28 Februari 1997 atau lebih dikenal dengan "Proses Februari 1997" ditandai oleh mengerasnya isu "anti-sekuler" yang mengaskan kuatnya cara konflik tradisional Kemalis: Militer sebagai penjaga ideologi sekuler menyingkirkan Islamis. Kendatipun demikian, motivasi kudeta bukan semata-mata isu ideologis, tetapi juga motif-motif pragmatis, dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan kekuatan militer dan sekularis yang telah terbangun kokoh sebelumnya.¹⁷³

Pada tahun 1998 *Refah Partisi* dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap mempromosikan Islam fundamentalis di Turki dan Erbakan kembali dilarang dari kegiatan politik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sekularisme yang menjadi konstitusi Negara Turki. Keputusan pembekuan ini didukung oleh *European Court of Human Rights (ECHR)* pada 13 Februari 2003. Keputusan ECHR dikritik oleh *Human Rights Watch* karena ketidakkonsistennya, setelah mereka sebelumnya menolak membekukan partai-partai lain pada kesempatan yang berbeda.

¹⁷³ M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, h. 61

Mantan Perdana Menteri Necmettin Erbakan pada tanggal 23 Nopember 1997 selesai membacakan tiga hari pidato pembelaannya di hadapan Mahkamah Konstitusi terkait kasus yang dapat menyebabkan partainya dan dirinya dilarang melakukan aktifitas politik selama lima tahun. Erbakan menolak tuduhan bahwa *Refah Partisi* mengabaikan konstitusi negara yang sekuler dan mengubahnya menjadi negara Islam. Walaupun sidang ini tertutup untuk publik, Erbakan mengungkapkan argumen-argumennya di hadapan wartawan-wartawan asing di Istanbul. Erbakan mengatakan, “Tidak ada satu pun organisasi yang tidak terlibat terorisme yang dapat dibekukan. Mereka mengatakan *Refah Partisi* adalah sarang teroris untuk melawan negara sekuler. Namun jika ditanya mereka sendiri juga tidak memiliki bukti.”¹⁷⁴ Undang-undang di negara Turki menegaskan bahwa partai politik tidak boleh bertujuan merubah karakter sekuler Republik Turki. Undang-undang ini juga melarang partai-partai memperoleh suara melalui penyalahgunaan isu-isu keagamaan. Tapi jaksa penuntut umum, Vural Savaş, menyatakan bahwa *Refah Partisi* pantas ditutup. Karena telah menjadi pusat aktifitas yang dapat membahayakan konstitusi negara. Savaş mencontohkan *Refah Partisi* berkampanye untuk menghapuskan larangan mengenakan jilbab di kampus, sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan serta ingin mendirikan sekolah agama atau *madrasah* yang menurut Savaş, akan mempropagandakan fundamentalisme.¹⁷⁵

Maka pada tanggal 17 Januari 1998 Mahkamah Agung Turki menjatuhkan sanksi berupa pembekuan terhadap partai politik terbesar saat itu yakni *Refah Partisi* karena dianggap melakukan tindakan subversif untuk

¹⁷⁴ Lihat Hakan Koni, *Regime Opposition as a Source of Party Policy Change: The Case of the Turk Religious Right*, dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4 No. 4; April 2013

¹⁷⁵ Gabriele Marrance, *Muslim Societies and the Challenge of Secularization*, h. 242

menggantikan konstitusi negara yang sekuler menjadi berdasarkan Islam.¹⁷⁶ Salah seorang pemimpin muda di *Refah Partisi*, Abdullah Gül, mengatakan keputusan tersebut menghambat proses demokrasi di Turki. Menurut Gül, ummat Islam adalah tulang punggung negeri Turki dan sebagian besar mendukung *Refah Partisi* sehingga dalam masyarakat demokratis, kelompok ini harus terwakili. Ia menyatakan akan segera mendirikan partai politik lain. Negara-negara asing termasuk sahabat Turki (Amerika dan beberapa negara di Uni Eropa) memberikan peringatan pada pemerintah Turki untuk menghindari keputusan seperti itu karena akan menghambat proses demokratisasi yakni adanya penghargaan terhadap pluralitas dan kebebasan berekspresi.

Walaupun *Refah Partisi* dibekukan dan Erbakan dilarang berpolitik selama 2 tahun oleh Mahkamah Agung Turki, ia tetap menjadi tokoh dan mentor politik bagi para kadernya. Tak lama setelah *Refah Partisi* dibekukan, pada pada 1997 sekelompok kecil politisi Islam membentuk partai bernama *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan yang akan menjadi wadah baru bagi para pemimpin *Refah Partisi* dan ternyata pada Pemilu 1999 masih memperoleh 111 kursi. Namun para jaksa Federal pada tanggal 26 Februari 1998 mengamati mereka dengan seksama, walaupun *Fazilet Partisi* memiliki basis yang lebih luas dan mengurangi unsur relijiusitasnya dibanding *Refah Partisi* serta lebih inklusif dan membolehkan perempuan menjadi fungsionaris partai dan calon anggota legislatif. Pemimpin *Fazilet Partisi*, Ismail Alpkın pun mengatakan bahwa partai ini bukan pelanjut dari partai sebelumnya. Tetapi para jaksa dan pengamat tidak mempercayainya, mereka segera melakukan investigasi terhadap partai ini apakah mereka masih seperti *Refah Partisi* dalam bentuk yang baru. Savaş, mengatakan bila

¹⁷⁶ Nur Aliyah Zaina, Analisis tentang Dekemalisasi di Turki Pasca Attaturk, dalam *Jurnal Politik Profetik Volume 4, No. 1 Tahun 2016*.

ditemukan bukti bahwa FP sama saja dengan *Refah Partisi*, maka akan kembali berusaha dibekukannya.¹⁷⁷

Ketika para pengurus Uni Eropa sedang mengevaluasi dan memperbaharui tuntutanannya agar Turki menjadi negara yang lebih demokratis, pengadilan pada tanggal 11 Maret 2000 malah menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Erbakan karena pidato yang diucapkannya 6 tahun yang lalu yakni pada 1994. Keputusan ini segera mendatangkan kritik dari para pemimpin Eropa dan memperingatkan bahwa semakin kecil kemungkinan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Pemimpin Uni Eropa, Gunter Verheugen, menyatakan bahwa Turki sebenarnya secara historis, ekonomi dan budaya adalah bagian dari Eropa, tetapi menurutnya masih dibutuhkan perubahan politik yang mendasar jika masih ingin bergabung dengan Uni Eropa. Turki dianggap belum memenuhi kriteria tersebut, karena Turki belum mengakomodasi kebebasan menyatakan pendapat, demokrasi yang lebih stabil, penegakan hukum dan HAM.¹⁷⁸

Setelah *Fazilet Partisi*, Erbakan mendirikan *Saadet Partisi* yang memiliki strategi perjuangan yang sama dengan partai-partai Islam sebelumnya dan menjadikan Nu'man Kurtulmus sebagai Ketua Umumnya dan tidak ingin Turki bergabung dengan Uni Eropa. Sejarah dinamika naik turunnya partai-partai politik berhaluan Islam di Turki sejak MNP, MSP, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi* membuat murid dan tokoh muda *Fazilet Partisi* yakni Recep Tayyip Erdoğan mendirikan AKP pada tahun 2001 sebagai partai politik berhaluan Islam yang lebih moderat, terbuka dan bersedia berkompromi dengan kubu sekuler dan militer serta mengajukan kembali proposal resmi Turki sebagai calon anggota Uni Eropa.

¹⁷⁷ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan*, h. 95

¹⁷⁸ Lihat Press Conference Uni Eropa pada 10 Maret 2000, "EU Commissioner Günter Verheugen Encourages Turkey To Proceed with Political Reform," dalam http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-246_en.htm, diakses 17 September 2018

Ketika prospek Turki menjadi anggota penuh Uni Eropa mulai nampak setelah menjadi anggota kehormatan Uni Eropa, tiba-tiba saja Kongres AS mengajukan kembali ke PBB kasus genosida 95 tahun yang lalu dalam PD I yang menurutnya dilakukan tentara Turki Utsmani terhadap etnis Armenia. Hubungan Armenia dan Turki selama ini memang relatif buruk, karena kesenjangan ekonomi di antara dua negara. Armenia terletak di antara Turki dan Azerbaijan di Rusia namun sementara hubungan kerjasama karena kesamaan agama dan budaya antara Turki dan Azerbaijan sangat baik, tidak demikian halnya dengan Armenia yang terpuruk kondisi ekonominya. Armenia juga menyimpan dendam yang belum kunjung hilang karena masih ada beberapa puluh orang saksi mata pada saat itu yang masih hidup hingga saat ini dan selalu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi saat itu. Armenia memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar yakni sekitar 600 ribu orang dan mayoritas atau 95% lebih beragama Kristen Ortodoks dan selebihnya animis.¹⁷⁹

Seperti diketahui, Armenia memiliki dendam masa silam dan sulit melupakan peristiwa yang terjadi 95 tahun silam pada saat Perang Dunia I. Saat itu tentara Turki Utsmani mendesak dan mendeportasi etnis Armenia dari wilayah Turki yang dalam perjalanan tersebut banyak yang mati terbunuh atau mati kelaparan. Dalam kampanyenya saat akan menjadi Presiden, Obama memang sempat menjanjikan di beberapa negara bagian bahwa ia akan mengungkap kembali kasus *genocide* di Armenia oleh tentara Turki Utsmani pada PD I. Namun ketika saat ini Kongres AS mengangkat hal tersebut dalam rapat Kongres untuk mengajukannya ke Dewan Keamanan PBB agar Turki mendapat resolusi, Gedung Putih melalui Menlu Hillary Clinton menginginkan agar Kongres menunda proses *voting* di Kongres karena akan mengganggu hubungan bilateral AS dengan Turki dan

¹⁷⁹ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 96

meminta agar istilah *genocida* tidak digunakan. Karena bagaimanapun juga selama ini Turki telah menjadi sekutu utama AS di dunia Muslim dan sama-sama merupakan anggota NATO yang terikat dalam kewajiban untuk saling melindungi.¹⁸⁰

Namun yang jelas ada kesamaan kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia menjelang Reformasi 1998 dengan kondisi di Turki menjelang abad 21. Pemerintahan rezim Soeharto yang represif di Indonesia dan pemerintahan sekuler CHP yang korup dan militer yang represif menyebabkan sebuah situasi yang menyebabkan baik rakyat Indonesia maupun Turki sama-sama mengharapkan perubahan ke arah yang lebih demokratis dan lebih sejahtera. Indonesia yang semula unggul dan memimpin di persatuan negara kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai ASEAN menjadi terpuruk. Inflasi sangat tinggi juga membuat Turki semakin jauh dari keinginannya menjadi anggota Uni Eropa. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu PKS dan AKP yang sama-sama berasal dari sebuah gerakan Islam yakni gerakan Tarbiyah di Indonesia dan gerakan di Turki lahir berturut-turut pada tahun 1998 dan 2001. Kemunculan AKP sudah menuai keberhasilan dan memenuhi sebagian besar harapan rakyat Turki akan stabilitas politik dan kesejahteraan, sementara kehadiran PKS belum memberikan arti yang signifikan sehingga masih panjang jalan yang harus ditempuh PKS untuk menuai keberhasilan dan untuk memenuhi harapan rakyat Indonesia. Bila disimpulkan maka sudah bukan saatnya lagi mempertanyakan apakah demokrasi sesuai dengan Islam atau sebaliknya apakah Islam bisa sejalan dengan demokrasi, karena persoalan yang lebih penting adalah bagaimana gerakan Islam yang mewujud menjadi partai-partai politik Islam dapat berperan positif dalam demokratisasi di negaranya masing-masing. Selain itu karena ada nilai-nilai demokrasi yang sejalan

¹⁸⁰ Alfian Alfian, *Politik dan Militer di Turki* (Jakarta, 2014), h. 129-10

dengan Islam dan budaya lokal di sebuah negara dan ada pula yang tidak, maka cara yang terbaik adalah melakukan adaptasi dan kontekstualisasi terhadap demokrasi dengan cara ¹² menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal di negara yang akan menerapkannya sehingga demokrasi tidak menjadi nilai-nilai asing yang diadopsi begitu saja.

BAB V
PERBANDINGAN PKS DAN AKP
SEBAGAI FENOMENA POS-ISLAMISME

Bagian ini akan menganalisis berbagai data dan fakta tentang PKS dan AKP, yang diletakkan dalam konteks pos-Islamisme. Membandingkan beberapa aspek penting dari kedua partai tersebut, baik yang terkait dengan sejarah dan bangunan ideologi politik, maupun struktur organisasi dan kepemimpinan serta aksi serta berbagai kebijakan politik yang mempengaruhi eksistensi kedua partai tersebut dalam dinamika politik lokal di Indonesia dan Turki. Pada bagian akhir ditunjukkan bagaimana konsolidasi kedua partai tersebut dalam pemilu, terutama pada beberapa momentum pemilu terakhir.

A. PKS dan AKP; Serupa Tetapi Berbeda

Kehadiran PKS dan AKP beserta berbagai usaha transformasi ideologis dan kebijakan politik yang dijalankan di Indonesia dan Turki lebih dari dua dekade terakhir, memberikan gambaran tentang bagaimana kedua partai mampu mengembangkan suatu visi ideologi politik Islam yang lebih terbuka, dan akomodatif hingga diterima oleh berbagai kalangan. Meskipun harus diakui bahwa berbagai faktor internal maupun eksternal turut mempengaruhi proses tersebut sehingga tidak berjalan dengan mudah. Faktanya terdapat dinamika yang berbeda bagi PKS di Indonesia dan AKP di Turki, PKS tampak belum mengalami transformasi pos-Islamisme secara konsisten dan berkelanjutan dan masih terus mengalami perdebatan internal tentang upaya mengimplementasikan syariah, dan upaya untuk memperluas dukungan suara. Hal ini ditambah dengan inkonsistensi PKS dalam menjaga kredibilitas partai sebagai partai Islam yang bersih dari isu-isu Korupsi para

pimpinannya yang terus menggerus daya ledak partai ini. Pergantian pemimpin yang sering terjadi tanpa adanya tokoh kharismatis, juga telah menimbulkan problem konsistensi dalam penguatan post-Islamisme.

Sedangkan AKP di Turki justru tampil sebagai gerakan politik post-Islamis paling terkemuka. Kepemimpinan politik yang kuat dan kharismatis dalam diri Presiden Recep Tayeb Erdogan telah menciptakan suatu transformasi yang sukses, dan mendorong stabilitas ideologis dalam setiap momentum pemilu. Sementara itu berbagai kebijakan Populis Erdogan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur telah meyakinkan para pemilih di Turki tentang kredibilitas Partai ini dalam mengemban amanah rakyat Turki. Alhasil AKP bukan saja berhasil meraih suara mayoritas, dan tampil sebagai partai yang memerintah Turki selama satu dekade terakhir. Tetapi juga AKP menerima respek militer Turki, yang hingga saat ini masih berdiri dengan “tertib” di belakang pemerintahan Erdogan.

Meskipun keduanya (PKS dan AKP) memiliki kisah sukses yang berbeda, peran partai politik keduanya menjadi sangat penting dianalisis sebagai salah satu unsur yang dapat menguatkan demokrasi. Ada beberapa persamaan antara PKS dan AKP, yakni sama-sama disebut Asef Bayat sebagai partai-partai politik yang berideologi Pos-Islamis yakni partai politik yang berasal dari gerakan dakwah Islam dan saat ini bertujuan mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Baik PKS maupun AKP memiliki basis massa utama yang sama yaitu *middle class* atau *urban educated* yakni Muslim terdidik yang konservatif dan tinggal di perkotaan. Kedua partai ini juga menggunakan strategi yang sama yakni *vernacular politic* yakni strategi berbasis lokal yang mensinergikan gerak horizontal kader melalui dakwah dan LSM sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi serta mobilitas vertikal

melalui kader-kadernya yang menjadi pejabat-pejabat publik di tingkat daerah.

Namun tentu saja ada pula perbedaan-perbedaan di antara kedua partai politik tersebut. AKP telah memiliki akar historis dan pengalaman politis sejak awal 1970-an yakni berasal dari gerakan dakwah *Milli Görüş* yang didirikan oleh Necmettin Erbakan di tahun 1969 dan tak lama kemudian berturut-turut sejak tahun 1970-an mendirikan MNP (*Milli Nizam Partisi*) atau Partai Keteraturan Bangsa dan MSP (*Millî Selâmet Partisi*) atau Partai Keselamatan Bangsa. Kemudian di 1980-an dilanjutkan dengan keberhasilan *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan dan di awal tahun 2000, *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan yang akhirnya bercabang dua. Nurman Kurtulmus di bawah bimbingan Erbakan membentuk *Saadet Partisi* atau Partai Kebahagiaan sedangkan Recep Tayyip Erdogan tanpa direstui gurunya yakni Erbakan, mendirikan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan) bersama kader-kader Erbakan lainnya seperti Abdullah Gul dan Huseyin Kansı.

Sementara PKS berasal dari gerakan Tarbiyah di bulan Januari 1980 yang baru memiliki pengalaman politik 18 tahun kemudian yakni ketika Partai Keadilan (PK) didirikan di tahun 1998. Selain perbedaan dari segi umur pertumbuhannya, PKS juga berbeda dari AKP dalam tahapan eksistensinya. PKS baru pada tahapan penguatan eksistensi sejak berdiri di tahun 1998 dan juga baru merupakan *the survival party* yang menjadi bagian dari *mainstream*, sementara AKP sudah *leading* dan menjadi *the ruling party*. Perbedaan lainnya adalah dalam hal aplikasi ideologi Pos-Islamis yang sudah lebih mapan di AKP dan masih terus berproses di PKS. Demikian pula halnya dengan bentuk organisasi dan model sistem rekrutmennya ada perbedaan antara PKS dan AKP.

Terlepas dari adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara PKS di Indonesia dan AKP di Turki serta perbedaan dalam optimalisasi aspek-aspek internal yang diperbandingkan serta perbedaan aspek-aspek eksternal yang melingkupinya, faktanya ada kesenjangan dalam perolehan suara PKS dan AKP di beberapa Pemilu yang diikutinya. AKP berdiri pada tahun 2001 dan langsung mengikuti pemilihan umum legislatif pada 3 November 2002 serta keluar sebagai pemenang mengalahkan partai-partai lama dengan perolehan suara sebesar 34%. AKP kemudian menjadi partai berkuasa yang mengakhiri era pemerintahan koalisi yang sudah berlangsung sejak 1991. Kemenangan AKP berlanjut di Pemilu 2007 dengan perolehan sebesar 47%.

Sementara perolehan suara PKS sejak masih berupa Partai Keadilan (PK) di Pemilu 1999 hingga menjadi PKS di Pemilu 2004 dan 2009, mengalami peningkatan namun tidak signifikan terutama dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, PK memperoleh suara 1,4 %, tidak lolos *electoral threshold* 2% dan hanya mendapatkan 7 kursi di DPR pusat. Kemudian pada pemilu 2004 PK yang telah menjadi PKS mengalami kenaikan cukup besar yakni memperoleh 7,3% suara atau setara dengan 45 kursi (8%) dan pada Pemilu 2009, PKS hanya mengalami kenaikan kecil yakni 7,88 % perolehan suara dan setara dengan 57 kursi (10,3%). Walaupun hasil tersebut membuat PKS menjadi *the survival party* yang dapat meningkatkan representasinya di parlemen dari Pemilu ke Pemilu selama rentang waktu 1999-2009, tetap ada kesenjangan perolehan suara yang sangat besar dengan AKP yang memperoleh 34% suara di Pemilu 2002 dan kemudian meningkat menjadi 47% suara di Pemilu 2007 sehingga menjadi *the ruling party*.

Dengan demikian, PKS dan AKP merupakan partai politik yang memiliki kesamaan-kesamaan sekaligus sejumlah perbedaan yang

menentukan perjalanan kedua partai tersebut. Hal ini bisa dilihat pada proses transformasi ideologis, model kepemimpinan, model kepengurusan organisasi politik hingga hasil-hasil yang telah diraih. Keduanya merepresentasi fenomena partai yang bergerak dari dari spectrum Islamism ke Pos-islamis, sebagaimana yang telah dibahas oleh Asif Bayat.

B. Transformasi Ideologi; dari Islamis Menuju Pos-Islamis

Terinspirasi oleh Gerakan Islam arus utama Ikhwanul Muslimin sehingga memperjuangkan cita-citanya melalui jalur politik, telah menjadikan PKS sebagai salah satu kelompok Islamis yang mentransformasi dirinya menjadi Pos-Islamis.¹⁸¹ Greg Fealy pun kemudian membenarkan bahwa PKS sedang mengalami transisi dari partai Islamis ke partai Pos-Islamis dengan menjadi partai terbuka semakin inklusif dan heterogen walaupun hanya sampai batas tertentu.¹⁸² PKS di tahun 2008 di Mukernas PKS di Bali mulai mewacanakan nilai-nilai kebangsaan dan menyebut dirinya sebagai partai Islam terbuka sebagai upaya menjadikan PKS lebih inklusif dan toleran terhadap pluralitas masyarakat. Dengan menggelar acara Mukernas di Bali yang notabene berpenduduk mayoritas Hindu, merupakan langkah awal bersikap lebih toleran terhadap non-muslim.¹⁸³ Walaupun proses transisi ideologi Islamis menuju pos-Islamis sempat memunculkan konflik internal di antara para pemimpin PKS, dengan tradisi ilmiah yang kuat di PKS persoalan tersebut relatif terselesaikan.

Perubahan yang nampak pada PKS dari sebelumnya PK sering dipahami orang bahwa PKS telah mengalami perubahan dalam hal ideologi.

¹⁸¹ Asef Bayat. *The Post-Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab World Mean* (April 26, 2011 for free weekly updates from ForeignAffairs.com)

¹⁸² Greg Fealy dalam bedah buku: *PKS dan kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. (Bedah buku ini diselenggarakan di FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012).

¹⁸³ Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 232

Hal tersebut terbantah dari pernyataan *founding father* PK, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS yang menegaskan bahwa sejak awal bentuk ideal yang diperjuangkan oleh PKS bukan *Islamic state* atau model teokrasi seperti negara Islam Iran misalnya melainkan masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan Islam yang bersifat universal.¹⁸⁴ Dalam arahannya kepada para kader pimpinan PKS dari seluruh Indonesia, Hilmi Aminuddin juga menegaskan bahwa ada lima prinsip yang harus diperhatikan PKS dalam aktivitas politiknya. Kelima prinsip tersebut pertama adalah *ruhul wihdah*, jiwa persatuan dan kedua adalah *ruhud dimokratiah* atau semangat berdemokrasi. Selanjutnya prinsip ketiga adalah pengakuan pada pluralitas (*ta'adudiyah*) karena pluralitas adalah *fitrah* dan *fitrah* adalah *sunnatullah*. Berikutnya prinsip keempat yakni *al wasathiyah* atau sikap moderat yang juga merupakan prinsip ajaran Islam dan akhirnya prinsip kelima adalah *ruhul muwathonah*, semangat hidup berbangsa dan bernegara.¹⁸⁵ Fakta adanya pergeseran dinamis karakter PKS yang Islamis ke arah Pos-Islamisme bukan hanya pernyataan Hilmi Aminuddin selaku pendiri PKS karena beberapa dokumen terutama sejak PK menjadi PKS telah menunjukkan adanya proses transformasi tersebut. misalnya Anggaran dasar dan Manifesto PKS yang tidak menyebutkan keinginan mendirikan negara Islam melainkan masyarakat madani.¹⁸⁶

Daniel Pipes, Martin Kramer dan Barry Rubin dari Amerika Serikat menulis Islamisme dengan pandangan negatif dan mengatakan bahwa Islamisme merupakan antitesa Demokrasi sehingga tidak mungkin kompatibel. Sedangkan yang secara khusus menulis kelompok Islamis di

¹⁸⁴ Lihat hasil wawancara dengan dengan *founding father* PKS, Hilmi Aminuddin, dalam Sitaresimi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia (1999-2009) dan Adalet ve Kalkinma (AKP) di Turki 2002-2007*, h. 233

¹⁸⁵ Hilmi Aminuddin, *Dokumen Khitob Qiyadi (Arahan Pemimpin)* (Mukernas PKS di Yogyakarta, 25 Februari 2011)

¹⁸⁶ DPP. PKS, *Manifesto Partai Keadilan Sejahtera*. (Jakarta: DPP. PKS, 2004) h. 1

Indonesia termasuk PKS adalah Zachary Abuza, Bilveer Singh dan Sadanand Dhume. PKS bahkan dianggap Sadanand Dhume lebih berbahaya dari jaringan teroris Jama'ah Islamiyah.¹⁸⁷ Namun sebaliknya para akademisi yang mempercayai ada kompatibilitas antara Islamisme dengan Demokrasi pada umumnya mengajukan contoh AKP di Turki, PKS di Indonesia dan PAS di Malaysia dengan melihat bukti kompromi-kompromi partai-partai Islamis tersebut yang mau bekerja sama dalam sistem politik demokrasi.

Bahkan beberapa sarjana seperti Vali Nasr, Greg Fealy, Asef Bayat dan Peter Mandaville melihat bahwa banyak partai Islamis yang masuk ke dalam sistem demokrasi akhirnya beradaptasi dan mengenyampingkan cita-cita ideologis berupa pendirian negara Islam atau teokrasi dan pemberlakuan syariat Islam secara formal melalui instrumen negara. Serta kini lebih menekankan nilai-nilai substantif Islam dengan mengedepankan agenda yang universal terkait isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi dan terobsesi dengan pertumbuhan ekonomi. Para intelektual tersebut meyakini adanya transformasi dari partai-partai Islami ke pos-Islamis membawa transformasi politik. Para elit partai, juga membantah berbagai opini yang masih tetap mencurigai agenda terselubung dari partai Islamis yang bertransformasi dalam sistem demokrasi. Sebagaimana dikatakan mantan Sekjen PKS Anis Matta yang menjelaskan bahwa pergeseran aplikasi ideologi PKS merupakan cerminan ekspresi PKS dalam perjuangannya di ranah politik dan bukan sebuah strategi karena menyembunyikan jati diri dan agenda terselubung. Keterbukaan dan menghargai keberagaman di dunia yang semakin terjadi hibridisasi adalah merupakan karakter asli ajaran Islam yang menjadi ideologi PKS.¹⁸⁸

¹⁸⁷ Kata Pengantar Greg Fealy dalam Burhanuddin Muhtadi. *Dilema PKS, Suara dan Syariah*. (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia) h: xv-xvi.

¹⁸⁸ Lihat Kata Pengantar Anis Matta, dalam Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS*, h. xxiii.

Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur menyatakan bahwa Partai Keadilan di Pemilu 1999 di provinsi Kaltim sempat dianggap oleh masyarakat sebagai partai yang berideologi Islam garis keras yang eksklusif, sementara di daerah itu juga ada penduduk Kristen atau suku Dayak yang animis. Namun kesan itu berubah ketika PKS di Pemilu 2004 sudah nampak lebih cair, mau berkomunikasi dan mengurangi kesan eksklusifnya serta aktif menunjukkan kepeduliannya dengan aksi pelayanan sosial. Bahkan di tahun 2009 menurut Hadi Mulyadi PKS lebih dikenal sebagai partai terbuka yang religius nasionalis dan jauh dari kesan eksklusif sehingga membuat PKS semakin diterima di masyarakat Kaltim.¹⁸⁹

Transisi ideologi PKS dari Islamis ke Pos-Islamis mempengaruhi beberapa kebijakan. Ideologi Pos-Islamis yang menunjukkan keterbukaan dan toleransi pada perbedaan sesuai dengan perkembangan tantangan bagi PKS di lapangan. Menurut Aidil, Wakil Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur (Intim), di Papua, di beberapa kabupaten yang benar-benar hampir 100% Kristen, PKS memiliki total 10 anggota legislatif. Kabupaten-kabupaten tersebut keseluruhannya ada di Papua, seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo, Lany Jaya, Nduga, Jayawijaya, Paniai dan Intan Jaya.¹⁹⁰ Demikian juga di Maluku, terutama di beberapa wilayah di Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya yang saat ini banyak kader yang beragama Kristen dan Katolik.¹⁹¹ Para kader tersebut berhasil meraih suara yang menempatkan mereka dalam keanggotaan legislatif.

Kondisi tersebut bermula dari fakta di lapangan karena banyak orang-orang Kristen di kabupaten-kabupaten yang mayoritas Kristen yang menuntut diizinkan membentuk DPC PKS dan ingin memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya melalui PKS, sementara AD/ART PKS mencantumkan anggota

¹⁸⁹ Sitaesmi S, Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 234

¹⁹⁰ Sitaesmi S, Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 235

¹⁹¹ Wawancara dengan Azis Sangkala (Ketua PKS Wilayah Maluku), 26 September 2018

PKS adalah WNI yang beragama Islam, maka dengan berbagai pembahasan di Dewan Syariah Pusat dan Majelis Syuro maka pada tahun 2005 terjadi amandemen AD/ART PKS di pasal 6 ayat 1 yang terkait syarat keanggotaan PKS. Sehingga kini, anggota PKS adalah setiap Warga Negara RI dapat menjadi anggota PKS. Perubahan AD/ART yang kemudian berdampak pada perubahan kebijakan pendirian struktur organisasi PKS di daerah-daerah Kristen di Papua yang dengan sendirinya diisi oleh orang-orang Kristen dan juga mengajukan caleg-caleg Kristen di tingkat kabupaten ternyata meningkatkan perolehan suara dan kursi PKS di Papua, sehingga di daerah-daerah Kristen pun PKS memiliki wakil-wakilnya yang juga beragama Kristen namun menjalankan kebijakan partai terkait dengan peraturan tidak boleh korupsi dan berjuang menyejahterakan rakyat.¹⁹²

Dari semua uraian di atas nampak bahwa selain mempengaruhi kader untuk bergerak, aplikasi ideologi Pos-Islamis yang tercermin pada perilaku kadernya yang lebih terbuka dan inklusif serta kebijakan partai yang juga lebih akomodatif terhadap perbedaan seperti ditunjukkan dalam kasus di Papua dan Maluku, yang ditunjukkan antara lain dengan adanya indikator-indikator kuantitatif berupa peningkatan perolehan kursi di daerah-daerah yang secara ideologis merupakan basis PKS seperti di Sumatera Barat misalnya dan relatif stagnan atau di daerah-daerah yang yang secara ideologis bukan basis PKS seperti Bali, NTT dan Papua. Hanya saja sebagaimana diungkapkan Nurcholish Madjid bahwa di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat lebih melihat substansi dari pada simbol, maka penulis beranggapan bila PKS tidak

¹⁹² Perubahan AD/ART PKS merupakan salah satu perkembangan yang sangat pesat dalam upaya memperluas jaringan dan dukungan suara Partai di seluruh Indonesia. Sebuah proses yang tidak mudah namun mutlak harus dilakukan untuk beradaptasi dengan perkembangan politik kontemporer. Burhanudin Muhtadi menyebut fenomena ini sebagai dilemma PKS, dari syariah ke suara. Lihat tulisan Burhanudin Muhtadi, *Dilemma PKS, Suara dan Syariah*, (Jakarta: 2012, KPG)

mampu mengartikulasikan ideologi Pos-Islamis dalam perspektif kepentingan masyarakat luas akan sulit untuk menjadi kekuatan utama di Indonesia.

Oleh karena itu PKS masih harus terus melakukan adaptasi dalam hal aplikasi ideologisnya dengan cara mengemas nilai-nilai Islam dengan bahasa yang lebih memasyarakat dan mudah dicerna rakyat Indonesia. Selain itu ideologi Pos-Islamis masih harus terus dibuktikan dan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program-program yang universal dan menyentuh semua komponen bangsa seperti program-program yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Hal itu masih merupakan kelemahan PKS yang harus diatasi oleh para pejabat publiknya karena belum menunjukkan keunggulan kerja dan kinerjanya sebagai bentuk aplikasi ideologi Islam.

Sementara AKP di Turki dinilai Greg Fealy sebagai contoh gerakan Islam yang paling mempengaruhi gerakan Islam lainnya di seluruh dunia. AKP memiliki identitas sebagai partai politik berhaluan Islam yang moderat dan terbuka karena orang bisa melihat sebagai partai politik berhaluan Islam dari aktivitas dakwahnya, para tokohnya dan basis massanya.¹⁹³ Hamid Al Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin bahkan menyatakan “Kemenangan AKP adalah kemenangan Islam moderat”. Gerakan Islam dianggap sukses mentransformasikan Islam dalam wacana modernisme dan demokrasi. Peran itu tidak terlepas dari kontribusi pemikiran Ikhwanul Muslimin yang mengembalikan relasi agama, politik dan negara ini.¹⁹⁴ Tak heran seorang Kolonel di Turki masih sangat meyakini bahwa AKP adalah partai politik berorientasi Islam atau dengan kata lain Ikhwanul Muslimin dalam kemasan yang lebih baik. AKP secara ideologis tetap dianggap memiliki akar

¹⁹³ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah* (edisi Bahasa Indonesia). Mizan, 2005. h: 64.

¹⁹⁴ Ahmad Dzakirin. *Transformasi Politik dan Demokrasi Kalangan Islamis: Potret Gerakan Islam di 2009*. (Jakarta: INSURE, 2009), h.1

keislaman dari partai pendahulunya yakni *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan dan *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan sehingga dianggap partai berhaluan Islam.¹⁹⁵ Namun menurut Huseyin Kansu, salah seorang pendiri AKP, para pengamat Barat mengklasifikasikan AKP sebagai partai Islam, karena keseluruhan elit AKP mempraktekkan cara hidup Islami, mereka tidak minum alkohol, mereka memakai hijab, mereka mempraktekkan cara hidup Islami maka partainya pun dikatakan partai Islam.

Banyak pengamat politik seperti Ihsan Dagi, Jenny White, Asef Bayat maupun Greg Fealy pada awalnya menggolongkan AKP ke dalam kelompok Islam politik atau Islamis yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan masuk ke dalam sistem politik dan menganggap demokrasi sebagai alat untuk mencapai agenda sesungguhnya. Dalam perjalanannya perjuangan kelompok Islamis tersebut dianggap oleh Olivier Roy telah gagal yang ditandai dengan pembekuan beberapa partai kelompok Islamis seperti *Refah Partisi* di Turki dan FIS di Aljazair. Kegagalan kelompok Islamis tersebut menurut Roy menyebabkannya mengalami kemunduran dari Islamis ke Neo-fundamentalis yakni paham Salafy yang sepenuhnya menolak nilai-nilai Barat, menekankan pemberlakuan syariah Islam dan kurang memperhatikan aspek sosial, politik dan ekonomi.¹⁹⁶ Namun fenomena kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh AKP dari Pemilu 2002 dan 2007 serta fakta bahwa selama 8 tahun berkuasa, menurut Ihsan Dagi tidak menunjukkan bahwa AKP memiliki karakter Neo-fundamentalis yang kemudian

¹⁹⁵ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. (New York: Free Press, 2009) h. 249.

¹⁹⁶ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik*. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996) h. 98-99.

menggantikan sistem demokrasi menjadi represif atau mengganti konstitusi sekuler dengan teokrasi.¹⁹⁷

Menurut Ihsan Dagi kepemimpinan AKP memang tumbuh dari kader-kader organisasi politik kelompok Islamis di Turki yakni *Milli Görüş* yang didirikan oleh Erbakan dan Islamisme adalah aktivisme politik yang bertujuan membentuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menginginkan pembentukan negara Islam melalui peran negara. Di Turki sejatinya tarik menarik dalam proses transformasi dari karakteristik Islamis menuju Pos-Islamis sudah lama berlangsung. Dahulu baik Erbakan maupun Erdoğan menyebut Uni Eropa sebagai *Christian Club* sehingga Erbakan lebih memilih mengembangkan hubungan dengan negara-negara Muslim yang tergabung dalam *Developing Eights* (D-8) seperti Suriah, Libya, Arab Saudi dan lain-lain. Bahkan Erdoğan Pada tahun 1997 ketika menjadi Walikota Istanbul membacakan puisi yang dianggap bernuansa Islam: “Masjid adalah barak kami. Kubah-kubahnya adalah helm kami, Menara-menaranya adalah pedang kami dan keimanan adalah tentara kami.” Erdoğan dituntut karena menyitir kalimat “an Army of jihad” (tentara jihad) dan menyebut demokrasi dengan sistem *thagut* (*jahiliyah* karena bukan berasal dari Islam). Erdoğan divonis 10 bulan penjara yang dijalaninya setelah tidak lagi menjadi walikota di bulan Maret 1999, tetapi setelah 4 bulan ia dibebaskan.¹⁹⁸

Erol Erdoğan salah seorang pemimpin *Saadet Partisi* di Istanbul yang pernah diwawancarai Sitaresmi menyatakan bahwa sahabat-sahabat mereka di *Fazilet Partisi* memisahkan diri dan mendirikan AKP yang tidak setia lagi dengan ideologi Islam yang pernah ada di masa *Ottoman Empire*.

¹⁹⁷ Ihsan Dagi, “Turkey Between Democracy and Militarism: Post-Kemalist Perspectives.” dalam *Journal of Democracy* Volume 19, Number 3 July 2008© 2008 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

¹⁹⁸ Alfan Al-Fian, *Militer dan Politik di Turki*, *op.cit.* h. 73

Sebenarnya yang terjadi pada AKP yang disebut *Saadet Partisi* sebagai keluar dari ideologi Islamis menurut Asef Bayat dan Greg Fealy adalah sebuah transformasi Islamis menjadi Pos-Islamis yang merupakan proses panjang lebih dari 30 tahun sejak 1970 hingga terjadi di tahun 2001. Sebagian kader Islamis yang bergabung di *Milli Görüş* seperti Recep Tayyip Erdoğan dan Abdullah Gul melihat hampir mustahil memaksakan paham Islamis di negeri yang militer serta elit Kemalisnya sangat teguh dalam mengawal konstitusi negara yakni sekulerisme.¹⁹⁹

Peristiwa 28 Februari 1996 berupa kudeta terhadap *Refah Partisi* menyisakan trauma karena kelompok-kelompok Islam seperti LSM-LSM dan jaringan-jaringan ekonomi yang berafiliasi ke *Refah Partisi* ikut dibekukan dan disita asetnya sehingga mereka menarik dukungannya pada aktivitas politik *Refah Partisi*.²⁰⁰ Oleh karena itu Recep Tayyip Erdoğan dan Abdullah Gul mulai mempertanyakan keabsahan cara perjuangan Islamis *Milli Görüş*. Erdoğan, mengajukan pada *murabbinya* atau mentor politiknya, Erbakan agar memperhalus metode perjuangan politiknya dengan menerima demokrasi, tidak menonjolkan nilai-nilai dan simbol Islam, merangkul kubu militer dan sekuler serta mengajukan kembali proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa. Namun usulan Erdoğan tersebut tidak diterima oleh Erbakan, yang saat itu sedang dipenjara, maka kemudian terjadi perpecahan kader-kader *Milli Görüş* dan masing-masing mendirikan partai politik baru di 2001 yang akan mengikuti Pemilu di 2002. *Saadet Partisi* yang menjaga

¹⁹⁹ <http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-Erdoğan.htm>, diakses, 2 Oktober 2018

²⁰⁰ Kefin Boyle, *Human Rights, Religion, and Democracy*, dalam *Essex Human Right Review Volume 1, Nomo 1*, h. 1-15, diakses melalui <http://projects.essex.ac.uk/ejrr/V1N1/Boyle.pdf>, 16 September 2018.

ciri Islamisnya dibentuk oleh kader-kader Islamis tradisional pada waktu itu dan Erdoğan yang mewakili kelompok Islamis moderat membentuk AKP.²⁰¹

Saat ini dilihat dari pernyataan-pernyataan publik AKP, basis massa, program dan sikap serta aktivitasnya setelah menjadi partai pemerintah di Turki lebih dari 10 tahun terakhir, AKP bukan lagi dikategorikan sebagai partai Islamis namun lebih sebagai partai konservatif yang di dalam tradisi politik Turki dikenal sebagai partai politik kanan-tengah. Itulah mengapa Asef Bayat dengan yakin menyebut AKP di Turki sebagai salah satu kelompok Islamis yang telah mentransformasi dirinya menjadi kelompok Pos-Islamis. Demikian pula menurut Greg Fealy, AKP sejak 2001 telah bertransformasi menjadi kelompok Pos-Islamis sebagai hasil interaksi mereka dengan kekuatan-kekuatan lain di dalam proses demokrasi. Berkembangnya gerakan demokratis di Timur Tengah menurut Bayat mendorong wacana Islamis menuju wacana Pos-Islamis.²⁰²

Sementara di masyarakat Turki sendiri juga sedang terjadi perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Huseyin Kansu bahwa dewasa ini telah terjadi perubahan cara pandang ideologis di Turki sehingga rakyat lebih fleksibel dalam memandang ideologi dan tidak memiliki afiliasi ideologi yang kaku dengan partai politik tertentu. Mereka lebih realistis dan rasional dalam memilih sebuah partai politik sehingga hanya akan memilih partai politik yang dianggap mampu mengatasi pengangguran, memperbaiki perekonomian, memberikan rasa aman dan kesejahteraan serta jaminan hari tua. Selain itu era informasi turut mempengaruhi keinginan rakyat Turki agar

²⁰¹<http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-Erdoğan.htm>, diakses 2 Oktober 2018

²⁰² Lihat kembali Asef Bayat. *The Post-Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab World Mean* (April 26, 2011 for free weekly updates from ForeignAffairs.com)

negaranya menerapkan wacana global seperti demokrasi, penegakan HAM dan kebebasan.²⁰³

Mustafa Ozkaya, bahkan meyakini bahwa pertimbangan rasional pragmatis berdasarkan kepentingan perbaikan ekonomi justru menjadi alasan utama rakyat Turki memilih AKP berturut-turut dalam Pemilu 2002 dan 2007 memilih AKP yang dinilainya mampu membaca keinginan rakyat Turki. Prof Ozer Sencar, Ketua Pusat Riset Sosial dan Strategi Metropoll di Ankara membenarkan telah terjadi perubahan poros ideologi. Bila sebelumnya ada dikotomi ideologi antara ideologi kiri (komunis atau sosialis) dan ideologi kanan (liberalis) yang kemudian berubah menjadi polarisasi antara sekulerisme dan anti-sekulerisme, maka kini polarisasinya adalah antara yang mendukung AKP dan yang tidak, atau antara yang mempercayai Erdoğan dan yang tidak.²⁰⁴

Bila disimpulkan memang AKP sejak awal berdirinya yakni 2001 telah mendeklarasikan diri bukan partai Islam dan para pendirinya di antaranya Huseyin Kansu menyebut AKP sebagai partai konservatif demokrat, tetap saja pengamat dan kelompok militer cenderung meyakini AKP tetap merupakan partai Islamis sebagaimana *Fazilet Partisi*. Namun tidak ada alasan yang cukup bagi militer untuk membekukan AKP, selain itu AKP dengan keberhasilan pembangunan ekonominya telah berhasil menghilangkan resistensi pada partai Islamis sehingga banyak pula kelompok sekuler di Turki yang memberikan suaranya ke AKP. Seiring sejalan dengan itu AKP juga mengalami pergeseran dari Islamis ke Pos-Islamis seraya dengan cerdas melakukan uji coba kesiapan rakyat dan terutama juga militer dalam menerima nilai-nilai Islam misalnya ketika pemerintahan AKP hendak membatasi peredaran minuman keras (miras) di

²⁰³ Lihat wawancara Huseyin Kansu, dalam Sitaresmi Soenkanto, *op.cit.*, 239

²⁰⁴ Professor Özer Sencar (Head of the Ankara-based MetroPOLL Strategic and Social Research Center). *Social Polarization*. Sumber: www.sundayszaman.com. 12 Januari 2010.

daerah-daerah wisata dan mendapat kecaman sangat keras maka kemudian dikoreksi dan ditunda lebih dulu kebijakannya. Demikian juga ketika pada tahun 2008, parlemen sepakat untuk mencabut larangan berjilbab di kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintah, keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD Turki yang sekuler. Pemerintahan AKP pun menerimanya dan perjuangan menghapuskan larangan berjilbab pun tetap dilanjutkan atas nama perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh *civil society* berupa LSM-LSM Islam yang berafiliasi ke AKP.²⁰⁵

Ternyata usaha penghapusan larangan berjilbab di tahun 2008 itu menimbulkan kemarahan militer yang kemudian melakukan usaha kudeta militer di tahun 2008 itu juga namun berhasil digagalkan. Hal yang menguntungkan bagi pemerintahan AKP adalah dukungan dari negara-negara Uni Eropa yang walaupun belum mengabulkan proposal bergabungnya secara penuh Turki ke Uni Eropa telah memberikan peringatan keras kepada militer Turki bahwa bila terjadi kudeta militer maka proses masuknya Turki ke Uni Eropa akan semakin sulit. Penegakan demokrasi dengan posisi militer berada di bawah kendali pemerintahan sipil memang merupakan syarat yang masih harus terus dipenuhi Turki selain aspek kesejahteraan ekonomi. Sementara militer Turki di sisi lain mengetahui besarnya keinginan rakyat Turki untuk bergabung ke Uni Eropa, sehingga mau tak mau harus berusaha lebih menahan diri.

Oleh karena itu tidak heran Asef Bayat menilai AKP adalah partai Pos-Islamis yakni secara formal tidak menyebut dirinya partai Islam namun secara substantif nilai-nilai Islam tercermin dalam banyak pernyataan dan kebijakannya. Suatu model ideologis yang menurut Bahtair Eefendi, lebih

²⁰⁵ ² Sitaresmi S, Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*, h. 240

mengedepankan isi dari pada kulit.²⁰⁶ Pidato Erdogan bahwa melayani rakyat berarti juga melayani Tuhan adalah intisari hadits Nabi SAW: “*sayyidul qaumi khadimuhum*” yakni pemimpin suatu negeri adalah pelayan bagi rakyatnya. Aplikasi ideologi Islam pemerintahan AKP yang membuatnya terkategori ke dalam partai Pos-Islamis memberi pengaruh positif bagi kemenangan AKP. Ciri Pos-Islamis AKP menurut Asef Bayat dan Greg Fealy adalah Islam sosial yang memiliki cita-cita masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam dan bukannya memaksakan mendirikan *Islamic State*, yang selama diyakini akan mudah dipatahkan sebagai penyebab keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

Ketika AKP sejak 2001 sudah dikategorikan sebagai partai politik yang Pos-Islamis, PKS masih tampil sebagai partai Islamis. Selanjutnya pada saat PKS mulai mentransformasi dirinya menjadi Pos-Islamis di 2008, AKP sudah berkuasa selama 6 tahun lamanya dan bahkan telah memenangkan Pemilu 2 kali. Demikian pula dalam hal pengalaman di Pemilu atau sebagai pejabat publik, pada saat saat 7 orang kader PKS menjadi anggota legislatif Pusat di parlemen pada tahun 1999, di Pemilu 1995 AKP ketika masih berupa *Refah Partisi* sudah memperoleh kursi sebesar 158 sehingga memimpin koalisi dan Erbakan menjadi PM walaupun setahun kemudian *Refah Partisi* dibekukan oleh MK. *Fazilet Partisi* yang merupakan pengganti *Refah Partisi* pada Pemilu 1999 masih memperoleh 111 kursi walaupun dua tahun kemudian kembali dibekukan yakni pada tahun 2001.

Pada saat kader mudanya yakni Erdoğan di usia ke 40 memimpin kota Istanbul sebagai Walikota (2004-2008) dan sangat berprestasi karena menyelesaikan sebagian besar persoalan kronis kota Istanbul seperti pengadaan air bersih, pengurangan polusi udara, kemacetan dan pengelolaan sampah. Erdogan juga membangun berbagai infrastruktur kota untuk

²⁰⁶ Bahtiar Efendi, *Islam dan Negara*, h. 13

mendukung mobilitas masyarakat di kota Istanbul.²⁰⁷ kader PKS, Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PK baru pada tahun 2005 menjadi Walikota Depok di usia 45 tahun. Namun berbeda halnya dengan Erdoğan, Nur Mahmudi seperti halnya beberapa Kepala Daerah lainnya yang dari PKS lebih fokus dengan konsep moralitas. Nur Mahmudi misalnya lebih sibuk dengan isu-isu kurang penting, seperti slogan makan pakai tangan kanan atau para pejabat di Pemerintah Kota harus pandai membaca Al Qur'an. Sementara persoalan buruknya infra struktur, pengelolaan sampah dan kemacetan belum terselesaikan. Ditambah lagi masalah pemberantasan korupsi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan masyarakat. Bahkan terakhir Nur Mahmudi sendiri ditetapkannya menjadi tersangka korupsi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) Karen menyalahgunakan proyek pembangunan infrastruktur di Kota Depok.²⁰⁸

Selama lebih kurang 10 tahun yakni sejak berdirinya Partai Keadilan pada 1998 hingga Mukernas di Bali 2008, PKS menampilkan ideologi Islam dan wacana keagamaan dalam komunikasi publik. Baru di Musyawarah Kerja Nasional di Denpasar, Bali pada tahun 2008 PKS mulai mengemukakan wacana kebangsaan dan bahkan mempromosikan isu-isu pluralitas kebangsaan.²⁰⁹ Walaupun sebenarnya hal itu bukan hal baru bagi kader PKS, karena secara ideologis PKS menganggap kecintaan pada tanah air dan bangsa adalah hal yang fitrah, sehingga doktrin kecintaan pada tanah air dan bangsa telah ditanamkan sejak masa *tamhidiyah* atau masa pembinaan kader pemula. Sejatinya ideologi Islam yang dianut PKS tidaklah berubah karena secara substantif tetap, namun yang mengalami perubahan

²⁰⁷ Lihat berita Kumparan "Nur Mahmudi: Dari Gerakan Makan Pakai Tangan Kanan hingga Korupsi" diakses melalui <https://kumparan.com/@kumparannews/nur-mahmudi-dari-gerakan-makan-pakai-tangan-kanan-hingga-korupsi-1536213034877307781>, 7 Oktober 2008

²⁰⁸ Harian Kompas, 4 Februari 2008.

²⁰⁹ Lihat Nurjaya dkk., *Dinamika Partai Keadilan Sejahtera di Denpasar Tahun 1998-2014*, Jurnal Humanis Fak. Ilmu Budaya UNUD, Vol. 18, 2 Februari 2017, h. 75-80

atau pergeseran adalah dalam aspek pemahaman dan aplikasinya, karena memang kelompok Islamis senantiasa berkembang pemahamannya. Pendapat George William Liddle dan Syaiful Mujani yang mengatakan politik aliran tidak relevan lagi karena sudah digantikan dengan pragmatisme tampaknya perlu dikoreksi.²¹⁰

Sikap partai politik yang dianggap menjadi pragmatis seperti halnya AKP maupun PKS sebenarnya juga merupakan aplikasi teori Alan Ware yang mengatakan bahwa partai melakukan adaptasi ideologi karena sistem demokrasi memberikan tekanan yang kuat bagi partai-partai politik untuk beradaptasi atau mengkompromikan ideologinya dengan perkembangan. Terkait dengan kompetisi dalam Pemilu di sistem demokrasi maka yang diadaptasikan sebenarnya adalah cara mengimplementasikan ideologi dalam bentuk kebijakan-kebijakan.²¹¹ Namun wacana kebangsaan dan pengakuan akan pluralitas bangsa yang merupakan ciri Pos-Islamis kemudian memicu perbedaan dalam cara memahami dan mengaplikasikan ideologi Islam. Perbedaan tersebut memunculkan kelompok FKP (Forum Kader Peduli) di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi salah satu sebab menurunnya perolehan suara PKS di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perbedaan pandangan tersebut tidak menjadi arus utama yang memecah PKS tetapi mengakibatkan dikeluarkannya beberapa orang yang tidak menyetujui langkah perubahan PKS seperti Tizar Zein, Mashadi, Daud Rasyid Sitorus dan Fathuddin Ja'far.²¹² Sementara kader-kader di daerah-daerah nyaris tidak terimbas isu perbedaan pandangan tersebut sehingga mengalami peningkatan perolehan

²¹⁰ Dr. Lili Romli, M.Si, *Tren Suara Parpol di Pemilu 2009*. Seminar Politik INSURE (Institute of Sustainable Reform), Rabu 27 Juli 2009. Pengamat politik LIPI ini tidak sependapat dengan George William Liddle dan Syaiful Mujani yang mengatakan politik aliran telah r

²¹¹ Alan Ware. *Political Parties and Party System*. (New York: Oxford University Press, 1999), h. 90.

²¹² Sitaesmi S. Soekanton, *Pemenangan Partai Keadilan Sejahtera...h*.

suara yang cukup signifikan seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan.

Sebenarnya bukan hanya PKS yang mengalami turbulensi terkait dengan pergeseran dari Islamis ke Pos-Islamis, karena sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa AKP sejak tahun 2001 juga sudah lebih dulu mengalami hal tersebut yang bahkan ditandai dengan perpecahan menjadi 2 partai politik yang berbeda yakni AKP dan *Saadet Partisi*. AKP tidak henti-hentinya di satu sisi dituduh oleh Erbakan dan *Saadet Partisi* sebagai partai yang murtad dari Islam namun disisi lain tidak henti-hentinya dituduh Islamis yang anti sekulerisme sehingga hampir dikudeta pada tahun 2007 dan hampir pula dibekukan oleh MK pada tahun 2008, akan tetapi para pimpinan dan kader AKP memiliki mental yang tangguh serta mampu tetap berprestasi di bawah tekanan yang kemudian berhasil pula dikomunikasikan secara baik ke masyarakat.

Oleh karena itu pada saat PKS masih disibukkan dengan perbedaan pemahaman dan cara mengaplikasikan ideologi Islam, perbedaan penafsiran soal aplikasi ideologi di AKP sudah selesai sejak memilih berpisah dari teman-temannya di *Fazilet Partisi*, yang setelah dibekukan MK mendirikan *Saadet Partisi* yang melanjutkan ideologi Islamis *Milli Görüş*. *Saadet Partisi* yang didirikan Erbakan serta Kurtulmus di dua Pemilu (2002 dan 2007) tidak lolos *parliamentary threshold* 10%, sementara AKP berturut-turut keluar sebagai pemenang Pemilu di 2002, 2007, 2011 hingga terakhir 2016. Walaupun tokoh-tokoh *Saadet Partisi* mengatakan AKP tidak berideologi Islam, namun seperti dikatakan Greg Fealy, White dan Hwang meyakini AKP adalah partai Islam yang mengemas ideologinya dalam nilai-nilai universal dan kerja nyata memperbaiki ekonomi dan menyejahterakan rakyat.

Jullie Hwang melihat perbedaan nyata antara PKS dan AKP adalah bahwa AKP sejak awal sudah melepaskan diri dari gerakan Islam: *Milli Görüş* serta langsung mendeklarasikan sebagai partai konservatif-demokrat, sementara PKS tidak pernah melepaskan dirinya dari Jama'ah Tarbiyah yang melahirkannya. Bahkan menurut Hwang di PKS dikenal prinsip “Al Hizbu huwal Jama'ah wal Jama'ah hiyal Hizb” yakni Jama'ah (gerakan Tarbiyah) adalah partai dan partai adalah Jama'ah, sesuatu yang menurutnya membatasi langkah PKS untuk memoderasi dirinya. Sebab, lanjut Hwang, ada perbedaan mendasar antara jama'ah yang merupakan gerakan keagamaan dengan pakem-pakem yang baku dan partai politik yang menuntut adanya fleksibilitas.²¹³ Akibatnya proses adaptasi terhadap transformasi ideologis di tahun 2009 masih belum selesai di tubuh PKS dan sempat terjadi diskusi berkepanjangan yang kontraproduktif bagi kemenangan pemilu di 2009.²¹⁴ AKP memperoleh keberhasilan lebih karena kemampuannya mengaplikasikan ideologi dalam performa nyata dengan memperbaiki perekonomian Turki. Sehingga pada saat PKS baru dalam tahapan mewacanakan ideologi Islam terbuka atau Pos-Islamis, AKP sudah lebih dulu melaksanakannya. Di sisi lain kader-kader kunci PKS banyak yang terjerembab dalam skandal korupsi yang muruntuhkan popularitas PKS di hadapan pemilu Indoensia.

C. Perbandingan Sistem Organisasi dan Pergerakan

Meskipun banyak pengamat telah melihat keadiran PKS dan AKP sebagai representasi partai Post-Islamisme, namun secara umum keduanya memiliki konteks yang berbeda dalam artikulasi kebijakan di masing-

²¹³Wawancara dengan Julie Hwang dalam disertasi Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Partai Kedilan Sejahtera*, h. 244

²¹⁴ Lihat pemberitan pasca munas, *Segala Cita-Cita PKS Berakhir di Ritz Carlton*, dalam <https://duniapii.wordpress.com/category/wawasan/page/5/>, diakses 2 Oktober 2018

masing negara. AKP di Turki lebih awal bertransformasi menjadi partai Post-Islamis dan berhasil meraih kemenangan dalam pemilu, sehingga berkesempatan mewujudkan berbagai agenda politik dan kebijakan yang dicita-citakan. Sementara PKS di Indonesia hingga pemilu terakhir tahun 2014, belum berhasil meraih suara signifikan sehingga tidak mendapat kesempatan penuh untuk mewujudkan cita-cita politik yang diyakini.²¹⁵ Namun demikian melalui sejumlah kader yang saat ini menempati sejumlah jabatan public, baik di legislatif maupun dieksekutif, dapat dilihat bagaimana sebuah partai bisa merawat ideologi politik melalui representasi kader dan kebijakan-kebijakannya.

Duverger (1984) membagi elemen-elemen dasar struktur organisasi partai politik ke dalam 4 tipologi yakni *caucus* yang merupakan struktur organisasi berbasis elit politik. Kemudian *branch* yang bila dikategorisasikan berdasarkan keanggotaannya disebut juga partai massa yang merekrut anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya di setiap bagian dan bukan pengelompokan elit politik lokal. Selanjutnya model *cell* (sel) yang awalnya merupakan temuan partai komunis dan berbeda dengan partai *branch*, partai *cell* lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya dan sangat sentralistik karena diarahkan oleh pusat. Akhirnya bentuk *militia*, yaitu bentuk organisasi partai yang awalnya dimiliki oleh kaum fasis dan partai sayap kanan ekstrim dalam fase Perang Dunia serta dirancang untuk menghasilkan gugus-gugus tugas yang bekerja di luar jalur politik elektoral yang konvensional.²¹⁶ Terbentuknya struktur organisasi di tingkat Dewan Pengurus Ranting (DPRa), Dewan Pengurus Kecamatan

²¹⁵ Pada Pemilu 2014, suara PKS hanya mencapai 8.480.204 suara (6,79%), PKS menempati urutan ke-7 persis di bawah partai amanat Nasional. Lihat berita, “KPU Sahkan Hasil Pemilu 2014, PDIP Nomor Satu”, dalam https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140509_rekapitulasi_kpu, diakses 7 Oktober 2018

²¹⁶ Maurice Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (edisi terjemahan). Editor: Afan Gaffar, (Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984), h. 10.

(DPC), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berawal dari terbentuknya kelompok-kelompok pembinaan berupa *usrah* (untuk kader inti) dan *halaqah* (untuk kader pendukung). Sehingga struktur organisasinya memang dimulai dari sebuah pembinaan model sistem sel (*cell system*). Organisasi PKS adalah organisasi berbasis kader yang berbentuk seperti sel. Organisasi PKS Model organisasi PKS, bila dianalisis dengan tipologi organisasi Duverger²¹⁷ adalah model organisasi “cell”.

Struktur organisasi PKS pada Pemilu 1999 karena pada umumnya diisi oleh kader-kader terbaiknya yang umumnya adalah para *murabbi* maka berfungsi sangat efektif sebagai mesin partai. Berbagai program dikerjakan dengan efektif dan efisien melalui jalur komando struktural. Selain itu organisasi saat itu juga menjadi sarana pembinaan dan magang para kader dalam memimpin serta menggerakkan roda organisasi partai. Akibatnya walaupun belum lolos ET 2%, Partai Keadilan (PK) yang hanya memiliki kader sejumlah 30 ribu orang mampu memperoleh suara sebesar 1,4 juta. Setelah Pemilu 1999 yakni tepatnya tahun 2000 dilakukan konsolidasi struktural dan kader, kemudian tahun 2001 dijadikan tahun rekrutmen besar-besaran dan organisasi berbentuk sel ini menjadi jalur komando yang efektif untuk menginstruksikan kader melakukan rekrutmen. Pada saat itu kader-kader yang berada di struktur umumnya juga adalah para kader senior yang menjadi para instruktur atau Murabbi dan Naqib. Maka selama masa 4 tahun setelah 1999 terjadi lonjakan jumlah kader menjadi sebesar 372.746 orang dan kader inti 21.444 orang (394.190). Di Pemilu 2004 PKS memperoleh pula lonjakan suara 7 kali lipat menjadi 7,2% dan dari 7 kursi anggota DPR RI menjadi 45 kursi, demikian pula di DPR Provinsi dan kota/kabupaten dari hanya 186 menjadi 1112. Namun pada pemilu 2014, suara PKS secara nasional berhenti pada posisi 6,79 suara. Pada hal pada saat itu PKS telah

²¹⁷ Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, *ibid.*, h. 234

mengembangkan konsep partai terbuka dan moderat, yang diletakkan dalam Musyawarah Majelis Syura PKS 2004 dan dituangkan dalam platform partai. Bahkan pada tahun 2008, Majelis Syura PKS telah menegaskan tidak ada lagi persoalan polarisasi antara nasionalisme dan Islam serta tak adanya perdebatan antara Islam dan Pancasila dalam tubuh PKS.²¹⁸

Namun mobilitas vertikal berupa berpindahnya kader-kader terbaik di struktur organisasi partai terjadi secara besar-besaran sehingga menimbulkan kekosongan di struktur organisasi baik pusat maupun daerah. Walaupun sebagian masih melakukan rangkap jabatan antara posisinya di struktur lembaga tinggi Negara dan di struktur partai, jelas sangat tidak optimal karena keterbatasan waktu. Sementara regenerasi untuk menduduki jabatan struktural organisasi kurang dipersiapkan dengan baik. Dampaknya secara nyata segera terlihat sejak 2004 hingga 2014, boleh dibilang struktur organisasi kehilangan wibawa untuk menjalankan fungsi komandonya menggerakkan mesin organisasi. Ketaatan kepada Murabbi dan Naqib relatif masih terpelihara, namun ketaatan terhadap struktur berkurang drastis. Struktur Partai di level pusat dinilai tidak mampu memperjuangkan aspirasi pengurus partai pada level dibawahnya, sehingga sampai tahun 2018 banyak kader PKS di beberapa wilayah yang mendeklarasikan pengunduran diri secara masal, seperti fenomena pengunduran diri masal yang terjadi dengan kader-kader PKS di Bali.²¹⁹

Kader-kader yang duduk di struktur organisasi baik pusat maupun daerah banyak yang masih baru atau masih muda usia tarbiyah atau pembinaannya sehingga sedikit pula pengalamannya dalam mengelola

²¹⁸ Lihat penjelasan salah satu tokoh PKS Mahfud Sidiq, "PKS Didorong Inklusif," dalam Kompas.com, <https://lifestyle.kompas.com/read/2010/06/14/04583284/pks.didorong.inklusif>. diakses, 7 Oktober 2018

²¹⁹ Lihat berita detik.com, "Geger Kader PKS di Bali Mundur Massal" diakses melalui <https://news.detik.com/berita/4235241/geger-kader-pks-di-bali-mundur-massal>, 10 Oktober 2018

struktur organisasi. Akibatnya sulit memunculkan kewibawaan struktur, sementara bentuk organisasi *cel* yang bersifat sentralistik membutuhkan kewibawaan struktur. Lain halnya bila berbentuk *branch* yang desentralistik dan otonom, maka yang menonjol adalah kompetensi profesionalitas dan kapasitas tanpa harus ada beban menunjukkan kewibawaan. Selanjutnya struktur sel di 2004-2009 tidak menjadi sarana rekrutmen yang efektif karena kewibawaannya yang menurun. Di sisi lain, bentuk struktur yang terbatas dan cukup ketat aturannya untuk menjadi pengurus didalamnya membuatnya juga tidak cukup luas untuk menjadi sarana pembelajaran bagi para kader yang baru terekrut. Ada begitu banyak persyaratan bagi seseorang untuk menempati pos di struktur organisasi. Oleh karena itu pada tahun 2009, walaupun ada peningkatan jumlah yakni menjadi 532.803 orang terdiri dari 496.782 kader pendukung dan 36.021 kader inti, tetap tidak sebesar pertumbuhan jumlah kader dari 1999 ke 2004.⁴⁴ Demikian pula halnya dengan hasil perolehan suara di Pemilu 2009 yang mengecewakan karena jauh di bawah target 20% . Hal itu tidak mengherankan mengingat struktur organisasi sebagai mesin partai jauh berkurang lebih efektifitasnya.

Faktor kelengkapan struktur organisasi sekaligus soliditasnya diakui oleh Chairul Anwar, Ketua Wilda Sumatera memiliki pengaruh pada keberhasilan perolehan suara di wilayah Sumatera baik untuk tingkat Pusat (DPR-RI), Provinsi dan Kota Kabupaten/Kokab. Misalnya dibandingkan di Pemilu 1999 Partai Keadilan hanya memperoleh 2 kursi pusat dari seluruh wilayah Sumatera dari 10 DPW hanya Sumatera Barat dan Lampung, karena saat itu boleh di bilang kelengkapan struktur organisasinya masih minim. Sementara di 2004 wilayah Sumatera mengirim 11 kadernya ke Pusat (DPR-RI) dan meningkat lagi menjadi 15 di Pemilu 2009. Sedangkan kursi di tingkat Provinsi pada tahun 2004 berjumlah 53 menjadi 58 di tahun 2009, sedangkan kursi di tingkat Kokab sejumlah 321 menjadi 322. Chairul

menambahkan daerah yang sudah lengkap kepengurusan strukturalnya, umumnya bisa meningkatkan perolehan.²²⁰

Sementara menurut Ahmad Dzakirin, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) aspek struktur organisasi belum terlalu berpengaruh di Jawa Tengah karena misalnya kelengkapan struktur DPC pada 2009 baru 75%. Kemudian mengenai sifat sentralistik struktur organisasi model sel yang dimiliki PKS menurut Dzakirin juga sempat menuai protes dari DPW Jawa Tengah terkait penentuan Anggota legislatif DPR-RI yang ditentukan oleh Pusat padahal bukan kader atau belum dikenal karena belum berinteraksi dengan para kader. Di Pemilu 2009, 3 dari 6 anggota legislatif pusat adalah dari tokoh eksternal atau bukan kader, sementara anggota legislatif di tingkat provinsi dan daerah adalah para kader dan memberikan kontribusi perolehan suara yang signifikan.²²¹

Sementara bentuk organisasi AKP berfungsi sebagai mesin partai yang efektif. Soliditas dan kerapian organisasi di *Fazilet Partisi* diwarisi oleh AKP karena para pendiri AKP sebelumnya adalah para kader aktivis di *Milli Gorus*. Bedanya kini bila dilihat dengan teori Duverger, AKP memperbesar dan mengubah bentuk organisasi *cell* *Fazilet Partisi* menjadi model *branch* yakni dengan memberi keleluasaan dan otonomi serta independensi pada struktur organisasi misalnya di DPW Istanbul, Omer Faruq Kalaychi mengatakan bahwa pemilihan Ketua DPW berlangsung demokratis dengan syarat seorang calon memiliki dukungan basis massa dengan jumlah dukungan minimal yang disepakati. Semua proses tersebut berlangsung tanpa diintervensi oleh struktur pusat atau DPP AKP. Otonomi yang tetap dalam koordinasi serta arahan secara normatif telah memberikan kesempatan

²²⁰ Sitaresmi S. Soekanto. *Pengembangan Budaya 'Knowledge Sharing' Melalui Pengadaan 5 'Enabler Nonaka' Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. (Depok: Pesis Pascasarjana Psikologi UI, 2006)

²²¹ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*... h. 232

kepada struktur-struktur organisasi cabang untuk berinovasi demi kemajuan partai.²²²

Hal tersebut secara internal berpengaruh positif bagi para kader AKP. Demikian pula bentuk *Youth Branch* dan *Woman Branch* yang independen namun tetap terkoordinasi dengan Ketua Umum partai yakni Erdogan memberikan pengaruh yang positif pula. Kemudian pengaruh positifnya kepada eksternal adalah berupa layanannya ketika organisasi AKP yang lengkap termasuk Badan Humas yang bertugas selama 24 jam menerima masukan, keluhan permintaan tolong maupun kritikan dan kecaman terhadap pemerintahan AKP. Demikian pula dengan Lembaga yang melayani para Lansia atau warga lanjut usia dan lembaga yang membantu orang cacat. Lembaga-lembaga tersebut telah memberikan kesempatan bagi banyak relawan yang terekrut untuk terlibat dalam pengelolaan organisasi partai. Sedangkan masyarakat yang sangat terbantu dengan pelayanan dan advokasi badan-badan organisasi maupun para anggota legislatifnya menjadi terpengaruh secara positif untuk memberikan dukungannya pada AKP. Sehingga bila disimpulkan pengaruh organisasi yang positif bagi kemenangan Pemilu AKP di Pemilu 2002, 2007, 2011, hingga 2018 adalah dengan independensinya yang melahirkan inovasi-inovasi kerja serta kapasitasnya yang besar sebagai mesin partai, sarana rekrutmen dan berperannya para relawan dan anggota yang baru bergabung serta pelayanan yang diberikan struktur organisasi partai kepada masyarakat. Kenyataan di atas juga membantah asumsi bahwa partai yang memiliki tokoh besar cenderung mengabaikan faktor lainnya karena mengandalkan kemenangan Pemilunya hanya pada daya tarik pemimpinnya.

Struktur organisasi AKP terdiri dari beberapa lembaga. Lembaga pertama yang tertinggi adalah *General Assembly* berupa lembaga

²²² Sitaesmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*...h. 235

pengawasan dan pengambilan keputusan tertinggi di partai yang para anggotanya terdiri dari dewan pendiri dan perwakilan yang dipilih oleh pengurus provinsi.²²³ Lembaga ini mirip dengan Majelis Syuro di PKS yang beranggotakan 99 orang yang juga merupakan representasi tokoh di seluruh DPW PKS di Indonesia. Lembaga kedua yakni *The Central Decision-Making and Administrative Committee* (CDAC) yakni Komite Pusat Adminstratif dan Pengambilan Keputusan yang merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi kedua juga mirip dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di PKS yang merupakan badan pengurus harian Majelis Syuro yang terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekjen PKS, Bendahara Umum PKS, Ketua MPP dan Ketua DSP.

Selanjutnya lembaga ketiga di AKP *Central Executive Committee* atau CEC (Komite Pimpinan Pusat)²²⁴ bila diperbandingkan dengan di PKS adalah DPP atau Badan Eksekutif. CEC juga merupakan badan eksekutif tertinggi di AKP, terdiri dari Ketua Umum partai, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan kelompok pembantu Presiden CDAC beserta wakil-wakilnya yang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit sepekan sekali dan asalkan sudah memenuhi kuorum maka sudah bisa mengambil keputusan. Para pembantu Ketua Umum AKP atau Presiden CDAC disebut sebagai *Deputy Chairman of Departmens* terdiri dari Ketua 11 Departemen dan seorang Sekretaris Jendral yang bila dibandingkan dengan PKS adalah Ketua Bidang dan Badan, hanya saja di AKP lebih sederhana dengan 11 Ketua Bidang yakni Bidang Politik dan Hukum, Bidang Organisasi, Bidang Pemilu, Bidang Publisitas dan Media, Bidang Hubungan Luar negeri dan Kantor Perwakilan Luar Negeri, Bidang Sosial, Bidang Administrasi internal

²²³ Arda Can Kumbaracibasi, *Turkish Politic and the Rise of AKP, Dilemmas of Isntitutionalization and Leadershi Strategy*, (London and Newyork: Roudledge, 2009), h. 125

²²⁴ Arda Can Kumbaracibasi, *Turkish Politic and the Rise of AKP*, h. 132

Partai, Bidang Ekonomi, Bidang Hubungan Kemasyarakatan (Humas), Bidang Keuangan dan Administrasi dan Bidang Penelitian dan Pengembangan/Litbang serta Sekretaris Jendral. Serta dua Badan yakni *Referee Board for Democracy within the Party* (Badan Penengah Demokrasi di dalam Partai) dan *Party Disciplinary Boards* (Badan Penegakan Disiplin Partai). Sementara di DPP PKS lebih gemuk organisasinya dengan 13 Bidang-Badan serta 6 wakil Sekjen yakni Bidang Kaderisasi, Bidang Pembangunan Keumatan, Bidang Kebijakan Publik, Bidang Kepanduan dan Olahraga, Bidang Generasi Muda dan Profesi, Bidang Perempuan, Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Bidang Pengembangan Kepemimpinan, Badan Hubungan Luar Negeri, Bidang Wilayah Dakwah, Bidang Pengembangan Ekonomi, Bidang Kelembagaan Sosial, Badan Penegak Disiplin dan Organisasi.²²⁵

Hal lain yang berbeda antara AKP dengan PKS adalah bahwa di AKP ada dua struktur yang terpisah dan relatif independen dari struktur utama yakni *Women's Branch* (Cabang Perempuan) dan *Youth Branch* (Cabang Pemuda). AKP memiliki kelengkapan dan keragaman struktur organisasi yang menjalankan fungsinya masing-masing baik di pusat maupun di 81 provinsi dan di distrik-distrik. Setiap provinsi jumlah distrik yang berbeda-beda tergantung luas kotanya, misalnya di Istanbul ada 39 distrik dan di setiap distrik juga terdiri dari 3 bagian struktur yakni *main board* (struktur utama) *youth branch* (struktur sayap pemuda) dan *woman branch* (struktur sayap perempuan) yang di masing-masing struktur tersebut terdiri dari 50 orang.²²⁶ Terkait dengan jumlah kepengurusan struktural di organisasi pusat AKP yang memiliki 3 pilar yakni *Main Board*, *Youth Branch* dan *Woman Branch* maka di *il* (provinsi) Skarya misalnya ada 29 distrik (*ilce*) dan

²²⁵ Sitaesmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*... h. 239

²²⁶ Sitaesmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*... h. 240

5 masing-masing distrik memiliki 30 pengurus untuk *Main Board* di tingkat distrik, 30 orang untuk *Youth Branch*, 30 untuk *Woman Branch*. Setiap distrik (*ilce*) terbagi atas beberapa *neighborhood (mahalle)* atau Kelurahan bila di Indonesia dan di 39 distrik yang ada di Istanbul bila digabungkan memiliki lebih dari 1000 *mahalle* dengan di setiap *mahalle* terdapat 10 orang pengurus *Main board, Youth Branch dan Woman Branch*.²²⁷

Komposisi minimal kepengurusan di organisasi AKP tersebut membuat partai ini memiliki ribuan orang yang akan bekerja di garda terdepan partai, karena untuk menjaga *box* atau gerai informasi AKP tentu saja diperlukan para *member* (anggota) dan *volunteer* (relawan). AKP juga menganggap pemuda dan wanita adalah segmen penting untuk mengkapitalisasi suara sehingga memberikan ruang berkiprah yang luas, keleluasaan dan independensi bagi segmen ini melalui *Youth Branch* dan *Women Branch*, yang bila dilihat terlihat dari strukturnya sejajar dengan wakil ketua namun tidak terpisah dari struktur umum AKP.²²⁸ Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Bilal Erdoğan, putra Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan berani menyebutkan bahwa selain faktor pemimpin kharismatis yang dimiliki AKP maka faktor organisasi AKP yang kuat dan lengkap serta terorganisir baik turut menjadi penyebab kemenangan AKP dalam setiap pemilu di Turki sejak 2002.²²⁹

Selain itu hal yang tidak dimiliki oleh PKS dan yang membuat AKP lebih mudah menjangkau masyarakat dan membuktikan kepedulian dan pelayanannya adalah dimilikinya *AK Party Communications Center (AKİM)* yang merupakan saluran resmi dan profesional di partai yang

²²⁷ Wawancara dengan Mustafa Abdullah, Sakarya Turki 27 Agustus 2018

²²⁸ Charlotte Joppien, *Municipal Politics in Turkey: Local Government and Party Organisation*, (Rouledge Studies in Middle East Eastern Politics, 2017), diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=zuI2DwAAQBAJ&pg=PT138&dq=Youth+Branch+and+Women+Branch>

²²⁹ M. Sya'roni Rofii, *Partai AKP dan Ideologi Islam Di Turki Modern* (Yogyakarta: Skripsi di Fakultas Syraiah UIN Sunan Gunung Kalijaga, 2008)

5 menghubungkan rakyat dengan pengurus partai. AKİM mencatat semua permintaan, keluhan dan pendapat tentang partai yang melalui telepon, sms dan menyampaikannya ke departemen atau organisasi partai yang terkait dengan masukan tersebut. Lembaga ini juga menjaga hubungan yang interaktif dengan masyarakat dan merespon setiap masukan dengan segera. Bertindak sebagai Kantor Pusat Humas AKP, AKİM menyediakan layanan 24 jam non-stop di 81 provinsi di seluruh Turki. Tujuan sistem ini adalah untuk mendengarkan aspirasi baik berupa permintaan, tuntutan maupun keluhan setiap rakyat. Kemudian ada lembaga 5 *Coordination Center for the Handicapped* (ÖKM/(Özürlüler Koordinasyon Merkezi) atau Pusat Koordinasi Bantuan untuk Penyandang Cacat di AKP yang berusaha melayani setiap komponen masyarakat termasuk penyandang cacat. Lembaga ini memiliki misi untuk mendeteksi hambatan yang dialami penyandang cacat dan berusaha memecahkannya. Lembaga di pusat berkoordinasi dengan pengurus di wilayah dan berkoordinasi dengan lembaga sosial di seluruh Turki. Lembaga pelayanan lainnya adalah 5 *Coordination Center for the Elderly* (YKM/ *Yaşlılar Koordinasyon Merkezleri*) 5 atau Pusat Koordinasi Pelayanan Orang Lanjut Usia (Lansia). Lembaga ini mengusahakan kontak langsung dengan para lansia 65 tahun ke atas, menciptakan peluang aktivitas bagi kelompok usia lanjut ini serta merancang program-program yang akan dapat memecahkan persoalan mereka. Lembaga ini melayani di 16 provinsi terbesar dan akan mengembangkan aktivitasnya hingga ke seluruh perwakilan wilayah AKP di Turki.²³⁰

Melihat komparasi organisasi PKS dan AKP di atas nampak bahwa organisasi dan manajemen PKS belum mampu menjangkau ke seluruh

2
²³⁰ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera...*h. 251. Baca juga Charlotte Joppien, *Municipal Politics in Turkey: Local Government and Party Organisation*, h.

pelosok wilayah Indonesia yang luas. Sementara AKP terkategori murni 'branch' yang bersifat desentralistik sehingga memberikan keleluasaan dan independensi. Kelebihan AKP lainnya yang tidak dimiliki oleh PKS adalah dimilikinya dua cabang struktur yang otonom berperan signifikan dalam kemenangan Pemilu yakni *Youth Branch* dan *Women Branch*, sementara Pemuda dan Perempuan di PKS hanya sebatas berupa Bidang dan tidak memiliki keleluasaan yang cukup untuk melakukan manuver-manuver. Terakhir, kelebihan AKP yang sekaligus menjadi kelemahan PKS adalah keberadaan lembaga-lembaga yang bekerja secara profesional dan menjangkau seluruh komponen masyarakat di seluruh Turki berupa lembaga Humas yang berfungsi 24 jam melayani aspirasi masyarakat, lembaga untuk Lansia (Lanjut Usia) dan lembaga bagi penyandang cacat. Ketiga lembaga ini tidak dimiliki oleh PKS yang menyebabkan kurang terasanya pelayanan PKS di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya faktor organisasi AKP merupakan faktor yang berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

⁷ Soliditas struktur organisasi PKS selama tiga Pemilu (1999, 2004 dan 2009) merupakan mesin partai yang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu PKS. Namun manajemen organisasi termasuk manajemen SDM, kaderisasi, informasi yang belum rapi dan profesional kesemuanya menyebabkan faktor organisasi berpengaruh secara signifikan hanya di Pemilu PKS di 2004 dan 2018, sementara di Pemilu 1999 belum berpengaruh karena tidak memiliki kelengkapan struktur. Sedangkan di Pemilu 2009 dan Pemilu 2014, kurangnya kemampuan pengendalian struktur organisasi yang membesar menyebabkan pemanfaatan yang kurang optimal terutama di struktur terdepan yakni DPRa sehingga kurang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu. Bentuk organisasi PKS berbasis kekaderan yang bila dilihat dari kategorisasi Duverger disebut *cell* dan bersifat sentralistik menyebabkan

kurang adanya independensi dan keleluasaan untuk bermanuver atau berimprovisasi. Selain itu keterbatasan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan organisasi di PKS sebagai sarana pembelajaran para kader dan juga sarana pelayanan masyarakat.

D. Perbedaan Basis Massa; *Middle Class* versus *Middle Class Plus*

Faktor basis massa ikut berperan dalam penguatan kemenangan partai politik. Ilmuwan politik Lipset menguraikan tentang karakteristik kelas menengah (*middle class*) memiliki indikator berasal dari masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan cukup tinggi. Sedangkan Daniel Lerner menemukan hubungan erat antara urbanisasi, *literasi* (melek huruf), pendidikan dengan tingkat pemberian suara.²³¹ Demikian juga Samuel Huntington yang meyakini perkembangan ekonomi telah mendorong meningkatnya jumlah kelas menengah dengan terjadinya mobilitas vertikal karena meningkatnya strata pendidikan dan taraf hidup yang kemudian berusaha memajukan kepentingan-kepentingannya melalui politik.²³² Pendapat Huntington tersebut sejalan dengan kesimpulan Vali Nasr bahwa kebangkitan Islam politik diawali dengan kemajuan di bidang pemikiran dan ekonomi yang memunculkan *new muslim middle class* atau kelompok Muslim kelas menengah yang kemudian mendirikan partai-partai politik Islam.²³³

Basis massa utama PKS yang bila dianalisis dari teori Lipset, Lerner dan Huntington adalah kelas menengah yang kemudian dibenarkan oleh Hefner, Rachel Ricardo dan Saiful Mujani memiliki keuntungan dan sekaligus kerugian untuk daerah-daerah yang berbeda. Basis massa kelas

²³¹ Franz Urban Pappi dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 255-256.

²³² Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997), h. 81

²³³ Vali Nasr. *Forces of Fortune*, h. 249.

menengah ini menurut teori Franz Urban Pappi pada umumnya menentukan pilihan atas sebuah partai politik berdasarkan mazhab *rational choice* sehingga cenderung pragmatis dan tidak loyal. Di daerah-daerah tertentu seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur karakteristik tersebut menguntungkan bagi PKS karena bisa membidik masyarakat kelas menengah Muslim abangan yang terdidik serta pada umumnya merupakan *swing voter* dan menurut Gus Pur, di Yogyakarta jauh lebih sulit untuk menarik basis massa Muslim santri berlatar belakang NU.

Basis massa utama PKS berasal dari kalangan perkotaan, sekolah dan kampus dan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik kelas menengah (*middle class*) yang diuraikan Lipset yang juga diyakini menjadi agen perubahan. Bila disimpulkan segmen basis massa PKS terbatas hanya kelas menengah Muslim konservatif di perkotaan dan masih sedikit yang berasal dari kelompok Muslim tradisional ataupun Muslim sekuler di perkotaan dan jauh lebih sedikit lagi yang dari kelompok minoritas Kristen. Sitaresmi Soekanto menulis, “para kader umumnya berpendapat bahwa untuk menyasar kelas bawah di perkotaan dan kelas bawah di pedesaan membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Sedangkan bila menyasar ke kelas menengah sekuler ada kekhawatiran tidak dapat membinanya.”²³⁴ Oleh karena itu keterbatasan basis massa PKS memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem rekrutmen PKS yang sebenarnya tertutup dan sangat rumit, akibatnya disadari atau tidak disadari ada upaya menahan laju perluasan basis massa karena masalah keterbatasan pendanaan untuk merawat basis massa serta keterbatasan kapasitas rekrutmen dan pembinaan kader. Keterbatasan basis massa PKS di kelas menengah Muslim konservatif di perkotaan membuat perolehan suara PKS pun terbanyak hanya di daerah kota-kota besar di pulau Jawa, yang nilai kursinya karena dihitung

²³⁴ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*...h. 133

berdasarkan proporsi kepadatan penduduk merupakan kursi mahal. Padahal hasil Pemilu 2009 bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 sudah memperlihatkan bahwa ketika PKS juga mendapatkan dukungan dari kelas bawah di pedesaan atau Muslim abangan di berbagai daerah selain daerah basis kader PKS yakni Banjabar maka terdapat peningkatan perolehan kursi karena kursi murah. Akibatnya aspek basis massa tidak besar pengaruhnya bagi kemenangan Pemilu PKS di 1999, 2004 namun sedikit meningkat pengaruhnya di 2009.

Sementara AKP di Turki yang berasal dari gerakan *Milli Görüş* dan partai-partai Islam sebelumnya (MSP, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi*) sama halnya dengan PKS merupakan partai politik yang didirikan oleh kelas menengah berpendidikan. Partai ini memiliki basis massa utama dari kelas menengah yang terus bertambah seiring dengan membaiknya perekonomian dan meningkatnya taraf pendidikan sejak awal 1970-an. Hal tersebut sesuai dengan teori Lipset bahwa salah satu indikator kelompok *middle class* adalah meningkatnya lama masa studi rata-rata di sebuah negara.

Namun kemampuan AKP memperluas basis massa membuatnya juga memperoleh dukungan suara dari kelas bawah di perkotaan dan di pedesaan serta dari kantong-kantong Muslim sekuler di Izmir dan Ankara, selain Istanbul yang memang merupakan basis utama AKP. Oleh karena itu secara keseluruhan di 81 Provinsi di Turki, AKP memperoleh dukungan yang merata dan berpengaruh positif di Pemilu 2002 ketika AKP memenangkan Pemilu dengan 34%. Jumlah ini semakin meningkat hingga beberapa pemilu berikutnya, sebagaimana terlihat dalam peta kemenangan AKP di bawah ini.

Gambar. 2
Peta Kemenangan AKP di Pemilu Turki



Sumber: <http://www.geocurrents.info>

Selanjutnya keberhasilan pemerintahan AKP memimpin selama 2002 hingga 2007 juga berpengaruh positif kepada AKP di Pemilu 2007 mendapatkan dukungan pula dari Muslim sekuler yang sebelumnya mendukung CHP dan MHP serta kelompok minoritas Nasrani dan Yahudi yang berjumlah 1% dari 74 juta penduduk Turki. AKP menurut Julie Hwang memiliki kemampuan merangkul semua lapisan masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah dan religius atau sekuler dan luasnya dukungan basis massa yang dimiliki oleh AKP berpengaruh signifikan pada kemenangan pemilu AKP. AKP bahkan didukung oleh kaum minoritas Kristen dan Yahudi yang hanya berjumlah 1% di Turki, karena menganggap AKP dan Erdoğan inklusif dan tidak diskriminatif serta mampu menciptakan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi.²³⁵ Sebagaimana diungkap oleh salah satu informan dari AKP

Menurut Ufuq Usalan keberadaan basis utama AKP tetap penting karena dapat menjadi penengah antara kelompok kelas menengah atas dan

²³⁵ Wawancara dengan Tuan Ufuq Usalan di Ankara, 2 September 2018.

kelas atas yakni elit Kemalis sekuler dengan kelompok tradisional konservatif, yang merupakan *urban religiosity* atau masyarakat perkotaan, kelas menengah berpendidikan yang taat beragama, toleran dan inklusif yang menjadi mediator untuk mengatasi konflik antara militer dan kelompok Islamis tradisional. Kelompok ini adalah kelas menengah dengan karakteristik yang disebutkan oleh Martin Lipset dan Daniel Lerner namun memiliki tambahan karakteristik yakni religius seperti diungkapkan oleh Vali Nasr, Esposito, Asef Bayat dan Mehmet Altan sehingga berbeda dengan teori Huntington bahwa kelas menengah anti agama. Kelompok basis massa utama AKP menjadi *vote getter* yang menjadi penghubung sekaligus penarik *floating mass*. AKP benar-benar berusaha menjangkau konstituennya sampai ke *grass root* dan menjadi faktor kelebihan AKP dibanding PKS yang kurang berakar. Hal ini bisa disaksikan di basis-basis AKP yang ada di desa-desa yang sangat solid mendukung AKP, seperti yang terjadi di Propinsi Sakarya, Konya dan beberapa provinsi yang memiliki basis masa yang religious.²³⁶

Bila PKS ingin memperbesar perolehan suaranya di Pemilu mendatang dan mengikuti jejak keberhasilan AKP, PKS harus mampu membangun dan memperluas sendiri basis massanya yang loyal. Sehingga upaya menahan laju ekspansi basis massa karena kekhawatiran tidak mampu membinanya dalam sistem kaderisasi partai tidak perlu terjadi. PKS perlu mempelajari dan mengikuti keberhasilan AKP merangkul berbagai segmen. Basis massa utama PKS yakni kelas menengah perkotaan dan terdidik menjadi modal awal yang baik buat PKS, tetapi kalangan tersebut sangat rasional dalam perilaku memilihnya sehingga sulit untuk loyal bila dirasakan

²³⁶ Lihat juga tulisan Arda Can Kumbaracıbaşı, *An Aggregate Analysis Of The AKP Vote And Electoral Continuities in The Turkish Party System*, Journal Turkish Studies Volume 17, 2016, Issue 2. Diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14683849.2015.1135062>, 12 Agustus 2018

sudah tidak menguntungkan. Sementara basis massa *grass root* bisa lebih loyal karena alasan-alasan sosiologis yakni kedekatan kekerabatan atau pertemanan ataukah psikologis seperti karena tokoh tertentu, namun PKS belum berhasil berakar dan memperluas *grass root* basis massa di kelas bawah dan masyarakat pedesaan. Seperti basis masa di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang selama ini menjadi lumbung suara nasional yang menjadi rebutan partai politi.²³⁷

Fokus PKS yang lebih terarah ke dalam yakni ke sistem pembinaan anggota membuat potensi memperluas basis dukungan kurang dioptimalkan dan belum cukup pula menjadikannya sebagai faktor yang berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu PKS. Sehingga PKS masih lebih nampak sebagai partai kader (*cadre party*) yang eksklusif dan belum menjadi partai massa (*mass membership party*) yang memiliki basis massa berbagai kalangan masyarakat, sementara basis massa yang loyal justru dari kalangan kelas menengah bawah. Oleh karena itu bila faktor penguasaan basis massa menjadi faktor yang berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu AKP, namun tidak demikian halnya dengan PKS karena belum optimal memperluas jumlah basis massa yang mendukungnya.²³⁸

AKP yang berasal dari gerakan *Milli Görüş* dan partai-partai Islam selain memiliki basis massa utama yang juga berasal dari kelas menengah mampu merangkul hingga ke *grass root* atau *lower class* (kelas bawah). Selain itu AKP juga mampu meraih dukungan dari jaringan lembaga-lembaga Islam dan tarekat-tarekat Islam, sehingga jamaah yang besar seperti Said Nursi yang kini terwujud dalam *Fetullah Gulen* ataupun *Hayrat Foundation* juga menjadi pendukung utama AKP. Kelebihan AKP lainnya

²³⁷ Lihat sebaran suara dalam *Statistik Politik*, (Jakarta: BPS, 2016). Sebagai perbandingan bisa dilihat survey Lembaga Survey Indonesia tentang Pemilu 2019, yang menyebut PDIP masih menguasai Pulau Jawa, “Dominasi PDIP di Jawa Belum Tergoyahkan”, [INDO cews.com](https://www.indocews.com), 12 Juni 2018

²³⁸ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*... h. 26

dari segi basis massa adalah bahkan mendapatkan limpahan suara ⁵ dari basis massa nasional-sekuler yang sebelumnya konstituen CHP dan MHP serta kaum minoritas Kristen dan Yahudi yang hanya berjumlah 1% di Turki karena keberhasilan AKP memperbaiki perekonomian Turki.

Sementara dalam konteks hubungan dengan 2 ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU, PKS baru sampai pada tahapan menjalin hubungan untuk menghilangkan resistensi dan antipati kedua ormas Islam tersebut pada PKS dan belum pada tahapan menjadikan mereka sebagai pendukung PKS. Sementara AKP benar-benar menjangkau konstituennya sampai ke *grass root* dan menjadi faktor kelebihan AKP dibanding PKS yang kurang berakar. Bila PKS ingin memperbesar perolehan suaranya di Pemilu mendatang dan mengikuti jejak keberhasilan AKP, PKS harus membangun dan memperluas sendiri basis massanya.

Sehingga upaya menahan laju ekspansi basis massa karena kekhawatiran tidak mampu membinanya dalam sistem kaderisasi partai tidak perlu terjadi. PKS perlu mempelajari dan mengikuti keberhasilan AKP merangkul berbagai segmen. Basis massa utama PKS yakni kelas menengah perkotaan dan terdidik menjadi modal awal yang baik buat PKS, tetapi kalangan tersebut sangat rasional dalam perilaku memilihnya sehingga menjadi *swing voters*. Sementara basis massa *grass root* bisa menjadi basis massa tetap karena alasan-alasan sosiologis yakni kedekatan kekerabatan atau pertemanan atautah psikologis seperti karena tokoh Habib, namun sayangnya PKS belum berhasil berakar dan memperluas *grass root* basis massa di kelas bawah dan masyarakat pedesaan.

E. Aspek Kepemimpinan; Kolektifitas versus Kharismatik

Hal lain yang menarik dalam melihat fenomena AKP dan PKS adalah soal bagaimana profil kepemimpinan dibentuk dijalankan dalam organisasi

partai. Mengikuti Max Weber yang membahas tentang tipe kepemimpinan didasarkan sumber legitimasi atau otoritas yang dimilikinya. Kepemimpinan disebut kharismatis jika pengabsahannya tersebut berasal dari kekuatan supra natural yang diyakini para penganutnya. Kemudian kepemimpinan yang berotoritas tradisional terjadi manakala memperoleh pengakuan dari para leluhurnya dan masyarakatnya. Lalu, kepemimpinan yang berotoritas legal formal, pengabsahannya berasal dari pengakuan di depan hukum dan karena dipilih oleh mereka yang memiliki hak memilih melalui koridor aturan yang sudah dibakukan. Sedangkan Pareto (1848-1923) meyakini bahwa setiap masyarakat dipimpin oleh sekelompok kecil orang terbaik yang dikenal sebagai elit yang berhasil menduduki jabatan tinggi di masyarakat.²³⁹ Baik Pareto maupun Mosca meyakini pendidikan dan latar belakang kelas dsb berpengaruh bagi seseorang untuk memimpin. Namun di Indonesia tidak mudah pelaksanaannya karena mayoritas Indonesia lebih melihat faktor popularitas seorang tokoh dibandingkan aspek kapasitas dan lebih melihat aspek citra dibandingkan reputasi.²⁴⁰

Partai Keadilan (PK) memang memiliki tokoh kharismatis yang menjadi unsur perekat yakni Hilmi Aminuddin pendiri gerakan Tarbiyah yang melahirkan PK. Namun tokoh ini kurang begitu populer bagi masyarakat Indonesia, selain juga beliau lebih menempatkan diri lebih sebagai *King-maker* dan berada di belakang layar, sehingga sejak Pemilu 1999 yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh muda seperti Hidayat Nurwahid (38 tahun) sebagai ketua MPP, Nur Mahmudi Ismail (38 tahun) sebagai Presiden PK, Anis Matta (30 tahun), hingga Sohibul Imam. Tidak ada satupun dari ketiga tokoh PK tersebut yang sudah dikenal publik, apalagi memiliki reputasi nasional, sehingga kesan yang malah muncul dan identik

²³⁹ SP. Varma. *Teori Politik Modern*. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1995) h. 202.

²⁴⁰ SP. Varma. *Teori Politik Modern*, h. 203

dengan PK saat itu adalah partainya anak-anak muda terpelajar. Di periode 1998-2000, di masa kepemimpinan presiden PK Nur Mahmudi Ismail yang memberi pengaruh positif kepada perolehan suara PK pada pemilu 1999 adalah justru ketokohan lokal para kader yang menjadi juru dakwah di daerahnya masing-masing. Selain itu yang menonjol pula adalah ketokohan kader perempuan yang sejak awal berada di garda terdepan PK dalam berinteraksi dan merebut hati masyarakat, terutama pemilih perempuan melalui layanan-layanan sosial seperti baksos, khitanan massal dan layanan kesehatan gratis. Gerakan social PKS diakui sebagai instrument politik penting yang menentukan keberhasilan kemenangan PKS ketika itu.

Kebijakan PKS yang menekankan *collective leadership* di satu sisi menguntungkan secara internal PKS karena setiap kader punya kesempatan menjadi pemimpin, Akan tetapi kelemahannya adalah tidak ada tokoh PKS yang populer, sangat dikenal di masyarakat untuk tingkat nasional. Padahal dalam dinamika politik Indonesia yang komunal, kepemimpinan merupakan aspek penting pemenangan Pemilu sebuah partai politik, namun kurang dioptimalkan oleh PKS sehingga tidak signifikan perannya dalam kemenangan PKS. Tidak bisa dipungkiri PKS berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih melihat tokoh pemimpinnya bila akan memilih sebuah partai politik.²⁴¹ Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid, Partai Keadilan Sejahtera berhasil melipatgandakan suaranya pada Pemilu 2004 sebesar 600% dari perolehan suara 1,4% suara

²⁴¹ sebagaimana yang terjadi dengan Gys Dur di Partai Kebangkitan Bangsa, Amien Rais di Partai Amanat Nasional, Megawati Sukarno Putri di PDIP, Susilo Bambang Yudoyono di Partai Demokrat dan Prabowo Subianto di Partai Gerindra. Hal ini misalnya ditemukan dalam survey yang dilakukan oleh Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), yang menyebutkan faktor figure dan ketokohan para pemimpin partai sangat menentukan raihan suara partai. Lihat [Tribunnews.com “SMRC: Kemenangan di Pilkada, Pengaruh Figur Tokoh Lebih Utama Dibandingkan Parpol,”](http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/03/smrc-kemenangan-di-pilkada-pengaruh-figur-tokoh-lebih-utama-dibandingkan-parpol) <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/07/03/smrc-kemenangan-di-pilkada-pengaruh-figur-tokoh-lebih-utama-dibandingkan-parpol>, diakses 12 Oktober 2018

nasional di pemilu 1999 menjadi meraih 7,34% pada pemilu 2004. Untuk sebuah partai yang baru dideklarasikan pada tahun 2003, menurut Saiful Mujani perolehan tersebut merupakan prestasi yang mengesankan. Lompatan suara PKS itulah yang akhirnya mengantarkan Hidayat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga semakin dikenal luas sebagai tokoh yang sederhana dan *tokoh* anti KKN. Menurut Azyumardi Azra fenomena kemunculan Hidayat dan kiprah PKS tersebut merupakan proses *mainstreaming of Islamic politics*, pengarusutamaan politik Islam.²⁴²

Bila disimpulkan di periode kepemimpinan Hidayat Nur Wahid (2000-2005), ada tiga aspek yang berpengaruh dalam peningkatan perolehan suara PKS pada tahun 2004, yakni aspek ketokohan lokal para kader di daerah, ketokohan perempuan dan ditambah dengan ketokohan nasional Hidayat Nur Wahid. Jika perolehan suara PK di Pemilu 1999 dipengaruhi oleh ketokohan lokal para kader yang menjadi juru dakwah dan ketokohan kader perempuannya, maka di periode Hidayat Nur Wahid perolehan suara menjadi lebih masif karena kedua faktor tersebut diperkuat dengan faktor ketokohan nasional Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. Kesemua aspek kepemimpinan tersebut memiliki pengaruh pada lonjakan keberhasilan PKS di Pemilu 2004 yang memperoleh 7,2% dari sebelumnya 1,3% di Pemilu 1999.²⁴³

Sedangkan di Pemilu 2009 dan 2014, aspek kepemimpinan di tingkat nasional malah menurun pengaruh positifnya bagi kemenangan Pemilu PKS. Kemunculan Tifatul Sembiring di berbagai media sebenarnya cukup memadai seiring dengan peningkatan kemampuan pendanaan partai, namun gaya komunikasinya dinilai sering kontroversial seperti misalnya pernyataannya tentang Presiden RI harus Balita (Bawah Lima Puluh Tahun)

²⁴² <http://www.dakwatuna.com/2011/03/11469/sketsa-biografi-hidayat-nur-ahid/#> diakses, 2 Agustus 2018

²⁴³ Sitaresmi S. Soekanto, *Pemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera*... h. 240

dianggap menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati. Akibatnya kader yang bergerak di masyarakat secara langsung yang harus sibuk memberikan penjelasan-penjelasan dan menurut mereka malah menimbulkan pengaruh negatif bagi kemenangan Pemilu PKS. Bahkan para kader PKS yang terpilih menjadi Kepala Daerah sejak 2005, 2006 dan 2008 seperti di Depok, kabupaten Bekasi, Kabupaten Halmahera Selatan, Wakil Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Barat juga tidak memberi pengaruh yang berarti pada kemenangan Pemilu 2009 dan 2014 karena umumnya kurang siap dan kurang berani mengambil langkah-langkah dan belum menunjukkan performa yang baik dalam kerjanya. Ketokohan lokal dan faktor ketokohan perempuan kembali memberi pengaruh positif pada perolehan suara PKS di Pemilu 2009 dan 2014, namun karena tidak ada pengaruh positif dari aspek kepemimpinan nasional maka perolehan suara PKS di 2009 dan 2014 relatif stagnan yakni 7,88% dan jauh dari target yang dicanangkan DPP PKS sebesar 20%.

Olivier Roy mengkritik partai-partai Islamis yang mengalami kegagalan ketika masuk ke dalam tahapan mengelola pemerintahan karena memilih pemimpin lebih atas dasar kesalehan dan bukannya kapasitas dan profesionalitas.²⁴⁴ Kritik tersebut relevan bila digunakan untuk membedah model rekrutmen kepemimpinan di PKS karena seringkali pertimbangan jenjang keanggotaan dan lamanya masa tarbiyah seorang kader lebih diutamakan dari kapasitas. Bila ada pilihan seseorang dengan jenjang keanggotaan tinggi namun kurang kapasitas sedangkan ada kader yang lebih kapasitasnya namun jenjang keanggotaannya lebih rendah, maka masih lebih sering kader yang lebih senior yang diutamakan. Sementara *stressing* pembinaan atau tarbiyah di masa awal gerakan Tarbiyah memang

²⁴⁴ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik*, h. 67

mengutamakan peningkatan kesalehan dan ketaatan, bahkan kadang kala ada *taqwim*, pengujian apakah seseorang mau meninggalkan kewajibannya di kantor untuk ikut demonstrasi di hari kerja. Bila kader tersebut tidak mau mangkir dari kantor maka ia akan dinilai tidak taat kepada murabbi dan lebih mementingkan urusan duniawi.

Bila PKS dengan bangga menyebut dirinya sebagai *cadre based party* yakni bahwa kaderlah yang dianggap faktor paling penting dalam pemenangan Pemilu sehingga tidak ada tokoh PKS yang menonjol dan dikenal luas oleh masyarakat. Sebaliknya AKP di Turki, dengan bangga menyatakan AKP adalah *leader based party*, bagi AKP sebagus apapun organisasi dan strategi sebuah partai politik jika tidak memiliki tokoh yang hebat maka sulit untuk menang dalam pemilu. Aspek kepemimpinan menurut sejumlah aktifis AKP yang berhasil diwawancarai seperti Ufuq Usalan, Rukiye Ozmeir, Mustafa Abdullah masih sangat menentukan di Turki dan AKP memiliki tokoh kharismatis Erdogan.

Sementara partai-partai lainnya di Turki seperti CHP dan MHP tidak lagi memiliki tokoh-tokoh populer, selain Deniz Baykal dan David Bahçelli yang sudah belasan tahun memimpin CHP dan MHP. Pengaruh faktor kepemimpinan pada elektabilitas sebuah partai politik juga nampak dalam kasus MHP yang menurun perolehan suaranya ketika mencuat berita tentang skandal seks beberapa anggota dewannya dan Ketua David Bahçelli tetap memimpin. Sedangkan CHP walaupun Ketua Umumnya Deniz Baykal terlibat skandal seks dan perselingkuhannya diunggah di internet serta beredar luas, perolehan suaranya tetap meningkat karena CHP segera mengganti Baykal dengan Kemal Kılıçdaroğlu dan membuat slogan: *yeni CHP, yeni Lider* (CHP baru, pemimpin baru).²⁴⁵

²⁴⁵ [http:// www. today's zaman Istanbul./](http://www.today's zaman Istanbul/) Baykal and Kılıçdaroğlu to testify in harassment case. 2011-03-16. Lihat juga Sitaresmi Soekanton, *op.cit.*, h. 268

7
Saat ini Erdoğan tidak saja menjadi tokoh AKP melainkan juga bagi Turki, bahkan sebagian rakyat Turki memanggilnya dengan Papa Tayyip setelah sebelumnya hanya Mustafa Kemal yang mendapat julukan *Ataturk* (Bapak Turki).²⁴⁶ Di banyak tempat dan di berbagai kesempatan foto Erdoğan diletakkan setelah foto Mustafa Kemal, *founding father* Republik Turki, sehingga Erdoğan dianggap sebagai pemimpin Islam pertama yang setara dengan Mustafa Kemal. Setiap kali Erdoğan muncul di tengah-tengah rakyat Turki mereka acapkali meneriakkan namanya secara lengkap dengan: “Recep Tayyip Erdoğan..... Recep Tayyip Erdoğan” atau meneriakkan: *Turkiye Seninle Gurur Duyuyor* (Turki bangga padamu). Bahkan oleh berbagai pihak Erdoğan juga sering dihamburkan sebagai Shalahuddin Al Ayyubi abad ke-21 karena ketegasan sikapnya pada Israel.²⁴⁷

Bila disimpulkan dengan teori Max Weber, maka aspek kepemimpinan Erdoğan memenuhi semua jenis otoritas kepemimpinan yang disebutkan Weber yakni kepemimpinan kharismatik yang juga diterima secara tradisional oleh masyarakat dan juga secara legal formal di mata undang-undang. Semua informan yang diwawancarai menyebut Erdoğan adalah salah satu daya tarik utama dan kunci kemenangan AKP sebagai partai Pos-Islamis. Kepribadiannya yang kuat dan tegas, berani membela Turki dan berkemauan keras menyejahterakan rakyat Turki membuatnya bahkan menjadi pemimpin dunia Islam yang bukan hanya dikenal di Turki melainkan juga di kawasan dan di dunia internasional. Oleh karena itu

²⁴⁶ Lihat tulisan Peter Beaumont di The Guardian 5 Juni 2011, *Recep Tayyip Erdogan: Is 'Papa' Still a Father Figure to Turks?*, diakses melalui <https://www.theguardian.com/theobserver/2011/jun/05/observer-profile-recep-erdogan-turkey>, 12 Oktober 2018

²⁴⁷ Lihat Tulisan Mayang Sari Lubis, *Engkaukah Shalahuddin Al-Ayyubi Zaman Now "Erdogan"*, dalam <http://harian.analisadaily.com/mimbar-islam/news/engkaukah-shalahuddin-al-ayyubi-zaman-now-erdogan/477071/2017/12/29>, diakses 12 Oktober 2018

kepemimpinan Erdogan berpengaruh paling dominan dalam kemenangan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

Namun bukan berarti Erdogan tidak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya kalangan pers dengan dipenjarakannya beberapa wartawan karena dianggap terus mendiskreditkan pemerintahan. Demikian juga kritik para penggiat HAM tentang penangkapan sejumlah orang yang dituduh terlibat dalam Kudeta gagal di tahun 2016.²⁴⁸ Kemudian kalangan sekuler mengkritik bahwa Erdogan terus menerus melakukan pembangunan fisik dalam berbagai mega proyek namun mengabaikan hal-hal yang manusiawi sehingga menurut mereka kurang memberikan kesempatan bernafas bagi rakyat. Bila partai-partai sekuler terus mencurigai bahwa suatu saat pemerintahan AKP akan merealisasikan agenda islamisasi, maka sebaliknya partai berhaluan Islam seperti *Saadet Partisi* menulis daftar “dosa” AKP dan Erdogan yang dianggap mengkhianati perjuangan kelompok Islamis *Milli Gorus*. Selain itu juga ada kelompok pencinta dan pelestari ‘Turkish Heritage’ yang mengkritik bahwa pembangunan besar-besaran pemerintahan Erdogan acapkali mengabaikan pelestarian bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan terdesak oleh pembangunan mall atau pertokoan. Dengan kata lain pengaruh positif sosok kharismatis Erdogan tetap paling dominan berpengaruh bagi kemenangan AKP di hampir setiap Pemilu, namun kiranya Erdogan harus merencanakan dengan matang kapan kiranya saat yang tepat baginya untuk mengundurkan diri yakni di puncak kejayaannya dan meletakkan tongkat estafeta kepemimpinan di AKP dan di Turki kepada penerusnya, sehingga ia akan tetap dikenang sebagai tokoh fenomenal atau bahkan Shalahuddin di abad ke-21.

²⁴⁸ Seperti tulisan Kolumnus Simon Tisdal di Guardian, 19 April 2018, “Recep Tayyip Erdoğan: A Dictator In All But Name Seeks Complete Control” , dikases melalui <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/19/recep-tayyip-erdogan-turkey-president-election-dictator-seeks-total-control>, 12 Oktober 2018

F. Fenomena PKS dan AKP dalam Pemilu

Analisis perbandingan tentang faktor-faktor ideologis PKS dan AKP secara tidak terlekkakan turut mempengaruhi hasil yang telah dicapai kedua partai tersebut, sepanjang keikutsertaan keduanya dalam pemilu di Indonesia dan Turki. Hal ini sekaligus menunjukkan kemampuan kedua partai untuk mengembangkan gagasan ideologi post-Islamisme yang telah dipilihnya dan menjabarkannya kedalam pilihan-pilihan strategi kontestasi, hingga kebijakan politik praktis.

PKS misalnya masih terus mengalami kesulitan untuk meningkatkan perolehan suaranya dalam pemilu, sehingga secara kuantitatif, perolehan suara PKS sejak pemilu pertama di tahun 1999 (waktu masih bernama PK), hingga pemilu terakhir di tahun 2014 hanya menempatkan PKS pada papan tengah, dibawah partai-partai yang mengusung ideologi nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindara), Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Meski mendaku sebagai partai kader, dalam beberapa tahun terakhir PKS mengalami kesulitan untuk mempromosikan kader-kadernya untuk terlibat dalam kontestasi politik di level lokal. Di beberapa daerah, PKS justru harus mendukung kader partai lain, untuk sekedar turut terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan untuk beberapa kasus, PKS memiliki sejumlah calon kepala daerah yang sebagian di antaranya terlibat korupsi. Sebuah tantangan internal yang tidak mudah, karena hingga saat ini masih sulit untuk dicarikan jalan keluarnya, karena beberapa alasan. *Pertama*, tampak bahwa PKS kehilangan ⁴inovasi politik yang biasanya berhasil ditampilkan oleh kader PKS di masa lalu. Dahulu, ⁴di Senayan, kader-kader PKS cukup banyak yang vokal, menjadi “koboi” Senayan yang disegani serta diburu oleh banyak wartawan karena menjadi inisiator sejumlah

kebijakan penting. Saat ini kader PKS justru menginisiasi beberapa kebijakan yang mengundang antipasti public. Misalnya keterlibatan para kader PKS yang mendorong hak angket terhadap Komisi Pemverantasan Korupsi yang dianggap sebagai serangan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

⁴
Kedua, tampaknya PKS tidak memiliki strategi jangka panjang untuk menjaga basis pemilihnya di sejumlah provinsi yang secara perlahan mulai menyusut. PKS mulai ⁴kehilangan sejumlah kursi di beberapa daerah yang menjadi basis politik PKS pada pemilu 2009. Sebagai contoh dapat dilihat dari empat provinsi di bawah ini. Yakni, di DPRD DKI Jakarta, kursi PKS menurun dari 18 kursi (Pemilu 2009) menjadi 11 kursi (Pemilu 2014); Sumatera Utara turun dari 11 kursi menjadi 9 kursi dan Jawa Barat dari 13 menjadi 12 kursi. Di Banten, kursi PKS turun dari 11 kursi menjadi 8 kursi. *Ketiga*, PKS kehilangan momentum politik untuk mengajukan kader internal dalam putaran Pilkada serentak sejak 2015 dan 2018, terutama di basis-basis partai. Padahal pada Pilkada sebelumnya calon-calon dari PKS hampir selalu diperhitungkan partai politik atau koalisi partai. Beberapa daerah itu misalnya Sumatera Utara, Banten, dan DKI Jakarta.²⁴⁹

Pada Pilkada 2013, kader PKS Gatot Pujo Nugroho yang berpasangan dengan Teuku Erry Nuradi di Sumatera Utara berhasil menang dengan perolehan suara 32.05%. Namun pada Pilkada 2018, PKS tidak mampu mencalonkan kader internal di Sumatera Utara. Di DKI Jakarta, sejak Pilkada 2007, PKS selalu menjadi kontestan. Pada Pilkada 2007, PKS yang mengusung Adang Daradjatun yang berhasil mendapatkan suara 42,13%, meskipun kalah dengan Fauzi Bowo yang mendapatkan suara

²⁴⁹ Lihat Tribun News, “Inilah Peta Lumbung Pemenangan Suara Nasional PKS”, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/16/inilah-lumbung-pemenangan-suara-nasional-pks>, 16 September 2018

⁴ sebesar 57,87%. Pada Pilkada DKI 2012, meskipun kalah, PKS tetap menjadi kontestan dengan mendukung Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Pada Pilkada DKI Jakarta, lalu, PKS harus menerima tawaran Gerindra dengan mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Di Pilkada Banten 2006, PKS mendukung Zulkieflimansyah-Marissa Haque dan pada Pilkada 2011 mendukung Jazuli Juwaini-Makmun Muzzaki. Di Pilkada Banten 2017, PKS bahkan tidak lagi memunculkan kadernya. Suatu kondisi yang menandakan kader PKS tidak lagi diperhitungkan dalam pencalonan Pilkada. Sementara di Jawa Barat, meskipun Ahmad Heryawan, elite PKS yang berhasil menjadi Gubernur petahana dalam 2 periode, namun calon yang diusung PKS (Sudrajat-Saikhu) pada Pilkada 27 Juni 2018, kalah dari Calon Gubernur Ridwan Kamil.

Keempat, PKS kehilangan isu dan *brand* sebagai instrument yang menjadi daya tarik dalam pemilu. Hal ini bisa dilihat dalam tiga tahun terakhir, dimana ada isu kuat yang berhasil disuarakan oleh PKS. Padahal, dalam tiga pemilu sebelumnya, isu berbasis program dan kebijakan, seperti isu antikorupsi dan pemerintahan bersih yang disuarakan PKS, berhasil menarik perhatian pemilih. Sekarang nyaris tidak ada isu berbasis program yang muncul dari internal PKS. Menjelang pemilu 2019, PKS menggunakan isu *#2019GantiPresiden* yang diusung Mardani Ali Sera sebagai salah satu kader inti PKS. Namun pihak yang mendapat keuntungan dari tagar tersebut justru Partai Gerindra dan Capres Prabowo Subianti yang juga berasal dari partai yang sama. PKS dianggap gagal meraih *effect ekor Jas*²⁵⁰ yang

²⁵⁰ Efek ekor jas (*coat-tail effect*) adalah salah satu istilah yang digunakan para sarjana politik menjelaskan pengaruh elektoral calon presiden terhadap partai pengusungnya. Karena pada dasarnya pengusung calon presiden merupakan gabungan koalisi sejumlah partai, maka pengaruh elektoral yang dibawa seorang calon presiden diharapkan beribas kepada partai pendukungnya. Jika ada kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara elektoral kepada partai yang

biasanya diperoleh para partai pengusung calon tertentu. Hal ini terjadi karena tokoh seperti Prabowo sulit untuk dipersonifikasi dengan karakter PKS sebagai partai Islami.

Dari sisi brand, pada tiga pemilu sebelumnya, PKS selalu menampilkan *brand image* sebagai partainya anak muda, perkotaan dan intelektual. Hal ini menggambarkan basis masa dan pemilih utama PKS. Maka secara akumulatif PKS meraih suara signifikan di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dan Makassar. Namun sekarang brand tersebut tampaknya tidak berhasil lagi dipertahankan dengan baik. Bahkan dalam beberapa survey terakhir yang dilakukan sejumlah lembaga Survey, terutama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi PKS akan kesulitan mempertahankan konsistensi suaranya di pemilu 2019. Bahkan suara PKS diprediksi akan turun dibawah angka 4%, atau batas *parlementery threshold* yang berarti bahwa PKS mungkin akan keluar dari palemen.²⁵¹

Beberapa pengamat menilai, PKS mulai kehilangan idealisme yang diperjuangkan sejak awal berdiri partai ini, yakni integritas dan moralitas politik yang melekat dalam ideologi politik PKS. Dua hal ini yang menjelaskan kenaikan suara PKS sejak pemilu 1999 sampai 2009. Publik mengapresiasi PKS yang menampilkan diri sebagai partai Islam yang bersih dan progresif. Namun pandangan ini tampaknya mulai berubah, ketika satu demi satu tokoh-tokoh PKS terlibat dalam berbagai skandal korupsi yang

mengusungnya sebagai calon. Sebaliknya, seorang calon presiden atau presiden yang tidak populer dengan tingkat elektabilitas yang rendah akan memberikan dampak negatif kepada perolehan suara partai yang mengajukan dia sebagai calon presiden. Hal ini yang terjadi dengan PKS dalam kampanye Pilpres 2019, dimana PKS memutuskan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan beberapa partai pendukung tetapi PKS dianggap tidak menerima effect ekor jas itu.

²⁵¹ Lihat hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Survei LIPI Prediksi Hanya 6 Partai Bakal Masuk DPR”, dalam <https://www.liputan6.com/pileg/read/3594020/survei-lipi-prediksi-hanya-6-partai-bakal-masuk-dpr> yang dipublish, diakses 21 Oktober 201.

menjadi musuh public. Kasus yang paling menyita perhatian adalah skandal korupsi impor daging Sapi di Kementerian Pertanian yang melibatkan Ketua PKS Lutfi Hasan Ishak pada tahun 2013. Maka bila ingin bertahan, PKS harus menerjemahkan nilai integritas dan moralitas para tokoh dan kader partai serta dalam program dan kebijakan partai secara nasional. Hal ini yang terjadi pada awal pendirian PKS dahulu, saat sumberdaya dan logistik politik PKS masih sangat terbatas, PKS berhasil mendapatkan suara yang cukup signifikan. Sekarang setelah kader bertambah, dan PKS memiliki kemampuan dalam mengakses sumber-sumber pendanaan politik baru, PKS justru kesulitan menjaga integritas politik.²⁵² Sejumlah kasus korupsi—seperti yang menimpa Luthfi Hasan Ishaq, mantan Presiden PKS dan Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara.

PKS juga mulai digoyang oleh friksi internal yang tampaknya belum mampu dikelola dengan baik. Hal ini menyebabkan PKS kesulitan menghadapi manuver beberapa tokoh partai seperti Fahri Hamzah (Wakil ketua DPR RI dan salah satu pendiri PKS) dan beberapa lainnya yang kritisi terhadap elit PKS yang sedang berkuasa. Hal ini membuat PKS harus membuang banyak energi dengan harus menghadapi gugatan hukum para kadernya yang dianggap tidak sejalan.²⁵³ Konflik antar-kader tak seharusnya berlarut-larut bila PKS berhasil mencari jalan tengah yang terbaik. Jalur negosiasi, musyawarah dan islah harus ditempuh. Harus ada pihak yang mengalah, baik Fahri maupun elite struktural PKS.

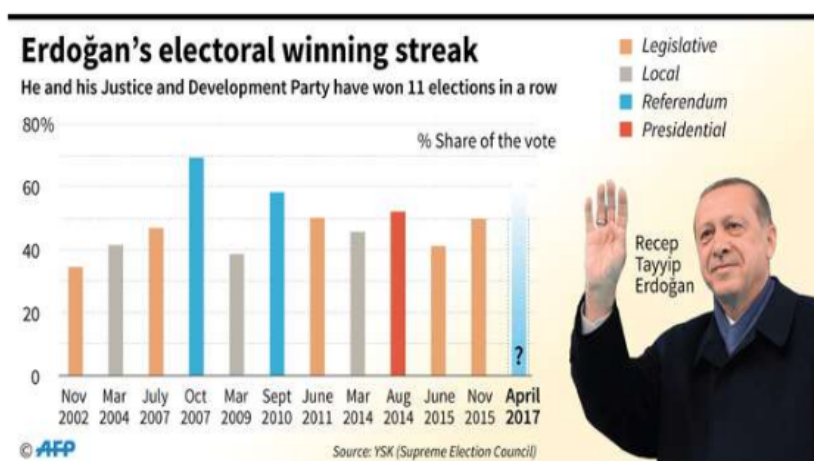
²⁵² Arya Fernandes, *Strategi Bertahan Partai Keadilan Sejahtera*, dalam <https://kumparan.com/arya-fernandes/strategi-bertahan-partai-keadilan-sejahtera>. diakses 10 Oktober 2018

²⁵³ 4 paya DPP PKS untuk mendongkel kadernya yang membangkan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR, sekaligus memecatnya dari keanggotaan partai, digagalkan oleh Pengadilan banding. Majelis hakim banding pada 7 November 2017 memutuskan pemecatan Fahri tidak sah, dan PKS didenda membayar sebesar Rp 30 miliar.

Sedangkan AKP di Turki terus mencapai hasil maksimal dalam setiap pemilu, dan perolehan suara AKP sulit ditandingi oleh parta-partai pesainnya hingga pemilu terakhir tahun 2018. Pada keikutsertaan AKP pada pemilu pertamanya di tahun 2002, AKP langsung memperoleh suara sebanyak 10.848.704, jumlah ini meningkat pada tahun 2004 dengan menjadi pemenang dan perolehan suara sebanyak 13.447.287. pada pemilu tahun 2007 AKP kembali dimenangkan suara sebanyak 16.327.291, lalu pada tahun 2009 hanya turun sedikit menjadi 15.353.553 suara. Di tahun 2011 AKP memperoleh suara yang sangat signifikan sebanyak 21.346.876 suara, dan di tahun 2014 kembali mempertahankan kemenangan dalam pemilu dengan 20.519.134 suara. Sementara itu pada pemilu ulang akibat tidak terbentuknya pemerintahan pada pemilu 7 Juni, Erdogan dan partainya memperoleh 23.669.933 suara pada awal November kemarin dan menghantarkan Erdogan sebagai presiden Turki yang paling legitimate dengan suara dengan 52,65% suara.

Gambar. 3

Kemenangan AKP dan Erdogan pada Pemilu Turki



Sumber: Digital Journal, April 2017

Bahkan pada momentum pemilu terakhir pada bulan Juni 2018 AKP memenangkan 42,47% suara untuk memantapkan posisi dalam parlemen dan menghantarkan kemenangan Presiden Recep Tayyip Erdogan dari AKP sebagai Presiden dengan dukungan yang sangat meyakinkan 52,65 %. Ada 11 partai politik peserta Pemilu Parlemen Turki 2018, mereka adalah Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), Partai Rakyat Republik (CHP), Partai Gerakan Nasionalis (MHP), Partai Rakyat Demokratik (HDP), Partai Kebahagiaan (Saadet), Partai Persatuan Raya (BBP), Partai Buruh Independen (BTP), Partai Demokrat (DP), Partai Patriotik (Vatan), Partai Huda-Par, dan Partai Baik (IYI). Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) memperoleh suara signifikan 20.889.082 atau 42,4% suara, sedangkan saingan terdekatnya Partai Rakyat Republik (CHP) hanya memperoleh 11.194.136 atau 22,7% suara.

Beberapa pengamat di Turki menilai kemenangan AKP dari berbagai sudut pandang. *Pertama*, kemenangan AKP dilihat sebagai bukti ketidakpercayaan masyarakat Turki terhadap partai-partai oposisi baik Partai Rakyat Republik atau Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) maupun Partai Gerakan Nasionalis atau Milliyet Hareket Partisi (MHP). Hasil pemilu lokal Turki 2014 menunjukkan CHP memperoleh suara sebanyak 27,8 persen sementara MHP mendapat suara sebesar 15,2 persen, demikian juga pada pemilu 2018 dimana CHP hanya memperoleh 22,7% suara. Padahal CHP adalah partai yang memerintah Turki sebelum AKP, selama hampir 80 tahun dan memiliki kedekatan ideologi sekuler dengan militer Turki. Namun selama kepemimpinan CHP di Turki, tidak tampak perubahan politik, ekonomi dan social yang patut dicatat.

Kedua, kebijakan AKP selama memimpin Turki dianggap berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Turki. Selama lebih dari satu dekade memimpin Turki, perubahan dapat dirasakan masyarakat. Hal berbeda ketika

ketika CHP memimpin Turki pendapatan perkapita hanya sebesar 3.000 dolar AS, sementara sejak AKP memimpin pada 2002 sampai saat ini meningkat pesat menjadi 11.000 dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Turki rata-rata pertahun mencapai di atas 6 persen lebih. Dengan begitu peningkatan ekonomi ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Turki. Kemenangan AKP dalam setiap pemilu Turki, mengabarkan pesan bahwa para pemilih Turki menginginkan adanya stabilitas ekonomi dan politik yang selama ini telah berhasil dicapai oleh AKP.

Ketiga, kultur Islam yang melekat pada AKP. Meskipun Turki negara yang menganut ideologi sekulerisme, namun mayoritas penduduknya atau 99 % adalah Muslim. Masyarakat Turki rindu akan kultur Islam yang memang sudah melekat sejak beberapa abad lalu ketika kerajaan Seljuk dan Kesultanan Turki Usmani menjadi penguasa di semenanjung Anatolia.²⁵⁴ Hal ini terlihat dari hasil referendum perubahan konstitusi pada 2010 lalu yang menghasilkan 58 persen rakyat Turki menginginkan perubahan. Dengan begitu, larangan penggunaan kerudung di tempat publik dicabut oleh pemerintah. Saat ini kita bisa menemukan dengan mudah perempuan Turki dengan penuh percaya diri menggunakan kerudung di tempat-tempat public, bahkan juga di kantor-kantor pemerintah, suatu fenomena yang sangat terlarang masa lalu. Meskipun rezim militer dan para pendukung sekularisme Turki tetap menekan populisme Islam yang ditawarkan AKP, namun hal itu mendapat dukungan dari masyarakat luas yang selama ini menganggap Islam sebagai identitas dan jati diri orang Turki.

²⁵⁴ Meskipun selama beberapa dekade Turki hidup dalam alam politik sekuler yang dikampanyekan elit politik Turki sejak era Kemal Attaturk, namun di berbagai tempat terutama di wilayah-wilayah tradisional seperti di kawasan Anatolia, berbagai tareka Sufi tetap diamalkan dan berkembang. Itulah mengapa Islam, muslim religious voters tetap menjadi bagian penting dalam setiap pemilu di Turki. Lihat Istar Gozaydin, *Religion, Politics and the Politics of Religion in Turkey*, (Berlin: Libelalaral Institute, 2013),

Gambar. 4
Pemilu Presiden dan Parlemen 2018



Sumber: Dakwatuna 25/06/2018

Bahkan pada kudeta berdarah yang dilakukan militer terhadap pemerintahan Presiden Erdogan pada tahun 2016, tidak mampu menumbangkan AKP dan Erdogan. Kegagalan kudeta terhadap Erdogan kali ini dapat dilacak dari beberapa alasan. *Pertama*, kekagagalan kudeta menunjukkan posisi Erdogan sebagai pemimpin yang terpilih melalui demokrasi dan AK Parti memenangkan mayoritas penuh suara. Reaksi kecintaan terhadap Erdogan diantara mayoritas rakyat Turki sangatlah luar biasa. Bahkan dalam kasus kudeta tersebut, bukan saja pengikut AKP dan Erdogan yang keluar ke jalan-jalan untuk melakukan perlawanan kepada militer tetapi partai oposisi yang selama ini bersebrangan dengan Erdogan. Bagi para pemimpin oposisi kudeta terhadap Erdogan adalah perbuatan yang tidak boleh dibiarkan karena menyerang nilai-nilai demokrasi yang telah membentuk “Turki Baru”. Maka masa rakyat yang terdiri dari para islamis, sekularis, kelas menengah kota, hingga masa yang berasal dari kota-kota kecil berusaha untuk melawan kudeta. Arsy Yircali dan Sabiha Senyucel,

sebagaimana dikutip Trias Kuncahyono (2018) menulis tentang suasana perlawanan ketika itu,

“Determinasi dan persatuan para pemimpin partai, partai-partai politik, anggota parlemen, organisasi kemasyarakatan sipil, media social dan arus utama, personil keamanan dan para perwira tinggi militer, semuanya berjuang untuk menghentikan kudeta. Masa diserang oleh pesawat temur F-16 dan helicopter tempur, dan pengeboman. Namun semua itu tidak membuat massa rakyat ketakutan dan meninggalkan gelanggang, meninggalkan jalan-jalan. Gedung Majelis Nasional diserang berkali-kali, tetapi para anggota parlemen tetap tinggal di dalam gedung. Markas kepolisian juga menjadi sasaran serangan, tetapi para polisi tidak melarikan diri dari markasnya.”²⁵⁵

Pengalaman peneliti selama berada di Istanbul, memperlihatkan bahwa mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, hingga orang tua yang duduk di kedai kopi pinggiran Istanbul masih memuji Erdogan. Faktanya Erdogan dinilai membawa kestabilan ekonomi dan politik, menciptakan iklim sehat bagi kemajuan iptek serta menjadi simbol perlindungan atas tradisi keislaman negeri para sultan ini. Tidak heran seruan Erdogan untuk melawan kudeta militer pada dijawab oleh massa dengan turun ke jalan-jalan menghadapi faksi militer yang melancarkan kudeta.

Kedua, selama memimpin, Erdogan tidak secara langsung melabrak sekularisme Turki melainkan menginterpretasi ulang model sekularisme yang diterapkan Kemal Ataturk dari model yang ekstrim, membawa agama ke model yang ramah dan mendukung ritual keagamaan di ruang publik. Menariknya, oposisi di Turki tidak merasa terancam. Tidak heran dalam situasi kudeta pun pemimpin oposisi ini tetap menyerukan dukungan atas pemerintahan Erdogan atas dasar demokrasi. Berbagai faktor tersebut

²⁵⁵ Arsyee Yircali dan Sabiha Senyucel, “Coup Attempt in Turkey: Many Failures, Many Prospect,” *PODEM (Public Policy and Democracy Studies Association)*, dapat dibaca dalam Trias Kuncahyono, *Turki Revolusi Tak Pernah Henti* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), h. 14.

ditambah dengan muaknya masyarakat dan pemimpin Turki terhadap tradisi kudeta yang berulang dalam sejarah modern Republik Turki menjadikan aksi kudeta kali ini menemui keagalannya. Erdogan dan masyarakat Turki dalam hal ini telah menciptakan sejarah baru bagi negeri para sultan ini dan mengajarkan bagi masyarakat dunia Islam yang beberapa tahun ini digemparkan oleh kudeta terhadap presiden terpilih secara demokratis Mohammad Mursi di Mesir

BAB VI

PENUTUP

Pembahasan dalam laporan penelitian ini menunjukkan bahwa secara historis PKS dan AKP adalah dua partai Islamis yang memiliki koneksi ideologis dengan gerakan Islam internasional, terutama gerakan Ihwanul Muslimin yang dikembangkan oleh Hasan Al-Bana di Mesir. Pengaruh Islamisme di bawah ke Indonesia oleh tokoh-tokoh kunci dari ideolog atau pendiri partai. Namun dalam perkembangannya kedua partai tersebut menampilkan wajah ideologi Islam yang lebih moderat, bahkan berbeda dengan Islamisme. Suatu model ideologi politik yang belakang disebut Asef Bayat (2016) sebagai Post-Islamisme.

Konstruksi ideologi politik PKS berawal dari ide-ide Islamisme yang dikembangkan melalui basis-basis gerakan Tarbiyah di berbagai universitas di Indonesia, kemudian mengalami proses demokratisasi bersamaan dengan kesediaan gerakan ini masuk kedalam sistem politik sebagai partai politik. Namun dalam perjalanannya PKS harus melakukan transformasi ideologi untuk beradaptasi dengan perkembangan kontemporer di Indonesia. Ideologi Islam (Islamisme) yang keras yang senantiasa memandang penting formalisasi syariat mulai perlahan ditinggalkan, sebaliknya PKS semakin mendorong kehidupan politik bernegara yang demokratis yang diwarnai nilai-nilai substansial Islam, atau dalam bahasa AD/ART PKS disebut masyarakat madani. Bahkan dalam konteks yang lebih nyata, PKS merevisi AD/ART Partai untuk membuka ruang yang lebih inklusif, bagi partisipasi agama lain di PKS. Maka sejak tahun 2008 mulai ada pengurus PKS di berbagai daerah yang berasal dari latar belakang agama yang beragam, terutama di daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim.

Adapun AKP, pada awalnya merupakan pecahan ideologi Islamisme *Milli Görüş* (gerakan Islam Turki) yang diusung tokoh Islamis Nechmetin Erbakan. Namun AKP secara perlahan melepaskan diri dari ideologi Islamisme dan mengembangkan corak ideologi yang lebih terbuka. Tekanan politik militer yang masih setia pada sekularisme Kemalisme, mendorong AKP secara resmi tidak mencantumkan Islam sebagai ideologi Partai, namun dalam berbagai kebijakannya AKP senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai dasar Islam yang universal. Hasilnya bukan saja pada perkembangan politik yang lebih Islami di Turki, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional Islam dalam kehidupan masyarakat Turki. Rakyat Turki memberikan dukungan penuh kepada AKP dalam pemilu, dan memberi mandate kepada Erdogan untuk terus menajadi Presiden hingga saat ini.

Penelitian ini juga mencatat beberapa analisis *comparative*, tentang mengapa aksentuasi politik PKS dan AKP berbeda, PKS hanya bisa menjadi partai menengah dalam dinamika politik Indonesia, sedangkan AKP bisa meraih suara mayoritas Rakyat Turki dan memimpin Turki selama dua periode terakhir. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa dicatat, *pertama*, meskipun kedua partai ini berasal dari gerakan Islamis, tetapi AKP lebih dahulu menampilkan diri sebagai partai dengan visi ideologi post-Islamis. Pilihan ini membuat AKP dijauhi oleh beberapa kekuatan Islamis di Turki, namun pada saat yang sama membuat AKP menjadi lebih terbuka, diterima oleh berbagai kekuatan politik di Turki, termasuk juga oleh Militer Turki yang selama beberapa dekade, sangat disiplin menjaga ideologi sekularisme negara. Dibawah kepemimpinan AKP Turki tetap menjadi negara sekuler, tetapi memperhatikan secara seksama spiritualitas Islam yang semakin hidup dalam masyarakat. Rezim Erdogan tampil sebagai kekuatan politik yang terus mendapat kepercayaan rakyat Turki, sekaligus menjadi pemimpin dunia Islam yang disegani. Berbeda dengan PKS, yang baru mulai mengembangkan

pandangan-pandangan Post-Islamis beberapa tahun terakhir atau setelah Pemilu 2009, tetapi hal ini dilakukan dengan keragu-raguan sehingga banyak pihak masih menaruh curiga atas agenda terselubung PKS dalam mengembangkan Islamisme ketika berkuasa nanti, seperti mengganti ideologi negara dan formalisasi syariat Islam dalam kehidupan publik.

Kedua, dalam konteks Pos-Islamisme, AKP dan PKS sama-sama menjadikan kelas menengah Muslim sebagai basis dukungan dalam pemilu. Namun AKP jauh lebih progresif dengan meraih dukungan dari masa *grass root*. Keberhasilan kepemimpinan AKP adalah kombinasi antara liberalisme ekonomi yang berorientasi pasar, dengan populisme Islam yang memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hal ini membuat rakyat Turki mulai dari kota hingga desa-desa mendukung penuh AKP dan Erdogan pada setiap moment pemilu. Berbeda dengan PKS yang hanya mampu meraih dukungan kelas menengah Muslim perkotaan, namun sejauh ini masih gagal menembus kekuatan masa lapis bawah, yang biasanya berada di desa-desa atau kelas buruh. *Ketiga*, sistem kepemimpinan AKP yang kharismatis dengan sepiritualitas keislaman yang dikagumi sebagaimana melekat pada Erdogan, merupakan pertimbangan lain dari dukungan rakyat. Selama kepemimpinan Erdogan dan Abdullah Gull, perekonomian Turki tumbuh dengan pesat dan sistem pemerintahan mampu dijalankan dengan sangat baik. Terutama pada beberapa tahun lalu, dimana korupsi dihabisi dan pembangunan infrastruktur terus dikembangkan. Hal ini berbanding terbalik dengan PKS yang para elit politiknya terjerebab dalam kubangan skandal korupsi yang secara langsung menurunkan kepercayaan rakyat pada partai ini. Artinya nilai-nilai Islam tentang integritas moral yang selama ini menjadi spirit PKS, tidak mampu dipertahankan dalam tantangan politik pembangunan. Di sisi yang lain, kepemimpinan kolegial PKS kurang berhasil melahirkan tokoh kharismatis yang menjadi panutan karena memiliki sepiritualitas yang baik,

namun juga tetap bersih ketika diberi amanat dalam jabatan politik dan pemerintahan.

Dengan kata lain, meskipun penelitian ini telah mencatat bahwa kedua partai ini (PKS dan AKP) berusaha untuk melakukan transformasi ideologi ke arah Post-Islamisme, namun faktor-faktor lain seperti kepemimpinan, keteladanan, perluasan basis masa pendukung hingga progresifitas kebijakan dalam mendorong perekonomian negara menjadi faktor-faktor pembeda yang menentukan perjalanan PKS dan AKP dalam pemilu. Hal paling menarik dari AKP di Turki adalah konsistensi ideologi dan transformasi ekonomi yang secara nyata membawa Turki pada kemajuan ekonomi dan politik yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Catatan lain yang penting adalah tentang peluang partai Islam yang berasal dari kelompok Islamis untuk memperoleh kemenangan dan menjadi partai *mainstream* atau *the ruling party* seperti dalam kasus AKP di Turki, atau berhasil menjadi *the survival party* dalam kasus PKS di Indonesia dengan berevolusi menjadi partai politik yang berideologi Pos-Islamis. Sebab karakteristik Pos-Islamis yang toleran, fleksibel, terbuka dan inklusif menghilangkan resistensi kepada kedua partai Islam. Namun karakteristik Pos-Islamis juga harus didukung oleh sistem dan perangkat serta lingkungan internal maupun eksternal yang sesuai atau kompatibel dengan pilihan ideologi tersebut. Misalnya transformasi ideologi AKP di Turki yang diikuti pula dengan model organisasi, sistem rekrutmen dan kepemimpinan serta ragam basis massa dan jenis strategi yang berbeda dengan partai-partai berhaluan Islam yang dilahirkan *Milli Gorus* seperti *Refah Parti* dan *Fazilet Partisi*. Sebaliknya di PKS, evolusi ideologi PKS dari Islamis menjadi Pos-Islamis tidak segera diikuti pula dengan perubahan dari model organisasi *cell* menjadi *branch* sehingga tidak leluasa bergerak melayani konstituennya. Demikian pula belum sepenuhnya terjadi perluasan basis massa dari kelas

menengah perkotaan yang terdidik dan religius menjadi basis massa yang beragam. Basis massa PKS belum berakar hingga ke *grass root* serta hanya sedikit memperoleh dukungan dari kelas menengah sekuler ataupun dari kelompok minoritas.

Melalui pembahasan-pembahasan dalam laporan penelitian ini, penulis berupaya menyajikan berbagai analisis tentang perkembangan PKS dan AKP dalam konteks perpolitikan di Indonesia dan Turki. Maka ada beberapa hal yang penting bisa dijadikan sebagai catatan, saran dan rekomendasi dalam pengembangan partai politik Islam yang kuat di Era Pos-Islamis ini.

Pertama, Partai Islam di era modern ini harus mampu mengembangkan pemikiran ideologi politik yang sesuai dengan semangat zaman. Islamisme yang selama beberapa dekade yang lalu, menjadi ide utama, perlu ditafsirkan ulang dalam semangat zaman yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, perubahan tersebut dapat dilakukan untuk memastikan ideologi politik Islam bisa terus memberikan sumbangsih pada penguatan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, adil dan makmur. Meskipun konteks dan dinamika politik di Indonesia dan Turki, memiliki beberapa perbedaan substansial, namun hal ini tidak mesti menjadi hambatan bagi partai-partai politik Islam di Indonesia untuk belajar pada kesuksesan AKP dalam memajukan politik Islam di Turki.

Kedua, belajar dari fenomena keberhasilan AKP dalam dinamika politik di Turki, maka partai Islam di Indonesia harus mampu menjaga secara konsistens pandangan keislaman, spiritualitas, sekaligus kemampuan kepemimpinan yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good and clear government* yang menjadi tuntutan pemerintahan modern. Para pemimpin Islam harus meminimalisir praktik-praktik penyimpangan kekuasaan, korupsi dan kolusi yang secara nyata-nyata menggerus dukungan rakyat.

Sebagaimana yang terjadi dengan PKS dan partai-partai politik Islam di Indonesia.

Ketiga, bersamaan dengan itu para pemimpin partai Islam juga harus mampu menyusun agenda dan aksi-aksi politik yang tepat dalam mendorong kemajuan bangsa. Kelebihan AKP di Turki adalah kemampuan para pemimpinnya merumuskan agenda aksi yang tepat, yang dikerjakan dengan konsistensi dan berkelanjutan hingga akhirnya menuai apresiasi dan dukungan public di setiap pemilu. Misalnya usaha AKP untuk mendorong Turki agar masuk dan menjadi bagian dari Uni-Eropa yang mempersyaratkan perkembangan demokrasi yang stabil, telah menghabat secara perlahan syahwat militer Turki untuk melakukan intervensi pada kehidupan politik demokratis. Hal ini secara nyata bisa dilihat pada peristiwa kudeta militer yang gagal di Turki pada tahun 2016 yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku

- Abdillah, Masykuri. 1997. *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy 1966-1993*, (Hamburg: Abera Verlag)
- Ali, Lihah Mukti. 1996. *Islam dan Sekularisme di Turki Moderen*. (Jakarta: Djambatan,
- Alfian Alfian, 2014. *Politik dan Militer di Turki* (Jakarta: 2013)
- Al-USairy, Ahmad. 2003. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana)
- Al-Raziq, Ali 'Abd. 2002. *Al-Islam wa Ushulul al-Hukm*, terj. M. Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela)
- Arkoun, Mohammad. 1994 "The Concept of Authority in Islamic Thought," dalam T.W. Arnold (ed.), *The Preaching of Islam: A History of Propagation of The Muslim Faith*, (New York: AMS Press)
- Azmi, Rafiullah. 2002. "The Rise of the AKP: A Challenge before Turki", dalam *Islam and The Moderen Age*. Vol. 33 (April 2002)
- Barton, Greg. 2002. *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: LKS)
- Basyaib, Hamid dan Hamid Abidin. 1999. Mengapa Partai Islam, Mengapa Kalah (Catatan Editor), dalam Deliar Noer, (et.al) *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alvabet)
- Bayat, Asif. 2013. *Post-Islamism: The Changin Faces of Political Islam*. (New York: Oxford University Press.)
- 2007. *Making Islam Democratic; Social Movements and the Post-Islamist Turn*. (Stanford Yniversity Press)
- Bell, Daniel. 2001. *The End of Ideology: On The Exhaustion of Political Ideas in The Fifties*, (USA; The Free Press)
- Bellah, Robert N. 1991. "Islamic Tradition and Problem of Modernization," dalam Robert N. Bellah, *Beyond Beliafe: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*, (Barkeley and Los Angeles: University of California Press)
- Benda, Harry J. 1958. *The Crecent and the Rising Sun: Indonesian Islam Under the Japanese Occupation 1942-1945* (The Hague and Bandung: W. Van Holve, Ltd)
- Bubalo, Anthony , dkk. 2014. "Zealous Democrat, Islamism and Democratic in Egypt, Indonesia and Turkey", dalam M. Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, (Jakarta: PT. Penjuru Ilmu Sejati)

- Burdah, Ibnu. 2008. *Konflik Timur Tengah: Aktor, Isu dan Dimensi Konflik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana).
- Chilcote, Ronald H. 2003. *Teori Perbandingan Politik: Penelurusan Paradigma*, (Jakarta: Grafindo Persada)
- Collier, Kit. 2006. "The Philippines", dalam Greg Fealy and Virginia Hooker (ed.), *Voice of Islam in Southeast Asia A Contemporary Sourcebook*. (Singapore: Insatitute of Southeast Asian Studies)
- DPP PKS. 2008. *Draft Kronologi Sejarah PKS*. (Jakarta, 2008)
- DPP. PKS. 2004. *Manifesto Partai Keadilan Sejahtera*. (Jakarta: DPP. PKS)
- Dzakirin, Ahmad. 2009. *Transformasi Politik dan Demokrasi Kalangan Islamis: Potret Gerakan Islam di 2009*. (Jakarta: INSURE)
- Duverger, Maurice. 1984. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (Yogyakarta: PT. Bina Aksara)
- Effendi, Bachttiar. 1996. *Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta; Paramadina)
-2003. *Islam and The State in Indonesia* (Singapore: ISEAS)
- Eligur, Banu. 2010. *The Mobilization of Political Islam in Turkey*, (Candbrige: Candbridge University Press)
- Esposito, John L. 1996. "Islam dan Barat: Konflik atau Benturan Peradaban?" dalam buku *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?* (Bandung: Mizan)
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Itcha: Cornel University)
-1962 *The Indonesian Eelection 1955* (Itacha: Cornel University)
- Fukuyama, Francis. 2006. *The End of History and The Last Man*, (New York: Free Pres)
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia Transisi Menuju Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Gertz, Cleefort, *Agama Jawa (terj.)* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1996)
- Goodin, Robert E. and Hans-Dieter Klingemann (ed.). 1996. *A New Handbook of Political Science*. Oxford Univesity Press, New York)
- Gozaydin, Istar. 2013. *Religion, Politics and the Politics of Religion in Turkey*, (Berlin: Libelalar Institute)
- Greg Fealy dan Anthony Bubalo. 2005. *Jejak Kafilah* (Bandung: Mizan)
- Hafiz, Kai (edit.). 2000. *The Islamic Worl and the West: an Introduction to Political Cultures and*, (Leiden: Brill)
- Hefner, Robert W. 2001. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001).
- Huntington, Samueul. 2002. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia* (Yogyakarta: Penerbit Qalam)
- Islam Syed Serajul. 2005. *The Politics of Islamic Identity in Southeast Asia* (Singapore: Thomson Learning)

- Joppien, Charlotte. 2017. *Municipal Politics in Turkey: Local Government and Party Organisation*, (Routledge Studies in Middle East Eastern Politics)
- Kafoury, Assaf . 1997. "Hizb Allah and Lebanese State", dalam Joel Beinin and Joe Stork (ed.), *Political Islam Essays From Middle East Report*. (New York: I.B. Taurus Publisher)
- Kanra, Bora. 2016. *Islam, Democracy and Dialogue in Turkey; Deliberation in Divided Society* (New York: Routledge)
- Karim, Syahru dan Samsu Udabi. 2012. Mamat, *Islamisme dan Demokratisasi di Indonesia Pasca-Reformasi: Analisis Sosio Politik*, Jurnal Sulesana Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012.
- Kuncahyono, Trias. 2008. *Turki Revolusi Tak Pernah Henti* (Jakarta: Kompas Media Nusantara)
- Kumbaracibasi, Arda Can. 2009. *Turkish Politic and the Rise of AKP, Dilemmas of Institutionalization and Leadershi Strategy*, (London and New York: Routledge)
- Kuru, Ahmed, dan Alferd Stepan. 2012. *Democracy, Islam, and Secularism in Turkey* (New York: Columbia University Press)
- Maarif, Ahmad Syafii, 1983. *Islam as the Basis of State: A Study of Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia*, (Disertasi Doktor di Universitas Chicago)
- Madjid, Nurkholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam di Era Reformasi (Cet I)*. (Jakarta: Paramadina)
- 1987. Nurcholis Madjid, *Islam, Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan)
- 1970. "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat," dalam Nurcholis Madjid (et.all), *Pembaharuan Pemikiran Islam*, (Jakarta: Islamic Research Center)
- Mardin, Serif. 1989. *Religion and Social Change in Modern Turkey, The Case of Bediuzzaman Said Nursi* (New York: New York Press)
- Maranci, Gabriella (edit.). 2010. *Muslim Society and The Chalange of Secularization*, (New York: Springer).
- Milan, Francesco F. 2016. *Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Attempt*, (The RUSI Journal, 161:4, 2016, 28-32, <http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2016.1228291>, diakses tanggal 4 Oktober 2017)
- Muhtadi, Burhanudin. 2012. *Dilema PKS, Suara dan Syariah*, (Jakarta: KPG)
- Muhammad, Imarah. 1997. *Al-Islam wa al-Sultah al-Diniyah*, (Kairo: Dar al-Thaqifah al-Jadidah)

- Mutalib, Hussin and Taj ul-Islam Hashmi (Ed.). 1996. *Islam, Muslims and the Modern State. Case-Studies of Muslims in Thirteen Countries.* (Basingstoke and London: Macmillan Press LTD)
- Nasiwan. 2003. *Geliat Islam dalam Pentas Politik Indonesia Kontemporer, Kalimantan Barat:Lembaga Pengembangan Sosial Ekonomi Rakyat* (Jakarta: LPSEK)
- Nasr, Vali. 2009. *Forces of Fortune: The Rise of The New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World* (New York: Free Press)
- Noor, Firman. 2006. *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998-2005. A sub-thesis submitted for the degree of Master of Arts (Asian Studies) of the Australian National University* (The Australian National University, Faculty of Asian Studies)
- Nor, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (LP3ES, Jakarta)
-1999. (et.al) *Mengapa Partai Islam Kalah?* (Jakarta: Alvabet)
- Qodir, Zuly. 2010. *Islam Liberal*, (Yogyakarta : PT.LkiS Printing Cemerlang)
- Rabasa Anggel dan Stephen Larrabee, *The Rise of Political Islam in Turkey.* (USA: RANDS Cooperation, 2008)
- Rahmat,M. Imdadun, 2008. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen.* (Yogyakarta: LKiS)
- Rahman, Fazlur. 1998. "Islam", dalam Bahtiar Eefendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina)
- Romli, Lili. 2006. *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- *Tren Suara Parpol di Pemilu 2009.* Seminar Politik INSURE (Jakarta Institute of Sustainable)
- Rosta, Gergely. *Secularization or Desecularization in the Work of Peter Berger, and the Changing Religiosity of Europe*, dalam <http://www.crvp.org/book/Series07/VII-26/chapter-14.htm>.
- Roy, Oliver 1996. *Gagalnya Islam Politik* (Terj.). (Jakarta: Seram Ilmu Semesta)
- Sevea, Iqbal Singh. *The Political Philosophy of Muhammad Iqbal; Islam and Nationalism in Late Colonial India.* (Cambridge University Pres)
- Sevindi, Neval. 2008. *Contemporary Islamic Conversation; M. Fethullah Gulen in Turkey, Islam and The West* (New York: State University of New York Press)
- Simatupang, G.R. Lono Lastoro, 2006. *Metode, teori dan Teknik Penelitian*, (Sleman; Pustaka Widayatama)

- Syamsuddin, Din, 1993, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Ulumul Qura'an No. 2 Vol. IV.
- Tibi Bassam, 2012 *Islam dan Islamisme* (terj). (Bandung: Mizan).
- Varma, SP. 1995. *Teori Politik Modern*. (Jakarta: PT RajaGrafindo)
- Watt, W. Montgomer. 1990., *Islam Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press),
- Ward, Keneth E. 1974. *The 1971 Election in Indonesia; an East Java Case Study*, (Clayton Monash Papers on South East Asia No. 2, Monas University)
- Ware, Alan. 1999. *Political Parties and Party System*. (New York: Oxford University Press).
- Yavuz. M.Hakan. 20013. *Islamic Political Identity in Turkey* (New York: University Press)
- Yesialda, Birol dan Barry Rubin. 2012. *Islamization of Turki Under AKP Rule*. (New York: Routledge)
- Zamjani. Irsyad. 2009. *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif*. (Jakarta: Dian Rakyat)
- Zayar. 2003. *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan*nya (Ed. Terjemahan dari The Iranian Revolution: Past, Present and Future)

B. Referensi Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Abdullah, Masykuri. 2013. "Hubungan Agama Dan Negara Dalam Konteks Modernisasi Politik Di Era Reformasi," dalam *Ahkam, Jurnal Ilmu Syari'ah*, Volume 13 No. 2, Juli 2013, h. 247-25.
- Abdurrahman. 2013. *Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Umat Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional*, (Disertasi di Programa Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia)
- Azmi, Rafiullah "The Rise of the AKP: A Challenge before Turki", dalam *Islam and The Moderen Age*. Vol. 33 (April 2002)
- Aybey, Ali *Turkey and European Union Relation: A Historical Aessment*, Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, Cil. 4 No: 1 (Guz: 2004)
- Boyle, Kefin, *Human Rights, Religion, and Democracy*, dalam Essex Human Right Review Volume 1, Nomo 1, h. 1-15, diakses melalui <http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V1N1/Boyle.pdf>,
- Dagi, Ihsan. 2008. "Turkey Between Democracy and Militarism: Post-Kemalist Perspectives." dalam *Journal of Democracy* Volume 19, Number 3 July 2008© 2008 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

- Dewi, Siti Nurhayaty. 2009. *Muhammadiyah sebagai Civil Society dan Pengaruhnya terhadap. Demokratisasi Pasca Orde Baru (1998-2009)*. (Depok: Tesis Program Pascasarjana Ilmu Politik. FISIP UI, 2009).
- DPP PKS. 2007. *Draft Kronologi Sejarah PKS*. (Jakarta, 2007)
- Ernas, Saidin 2014. *Artikulasi Ideologi Politik Masyarakat Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Adallah Volume 17 Nomo 2, November 2014.
- Francesco F Milan, *Turkey: What Hides Behind a Failed Coup Attempt*, The RUSI Journal, 161:4, 2016, 28-32, <http://dx.doi.org/10.1080/03071847.2016.1228291>
- Hakim, Nur. 2006. "Pemaknaan Agama dalam Partai Politik dalam Kontestasi Reformasi Studi Perbandingan PPP, PKB dan PAN," dalam Jurnal *Humanity*, Volume 1 Nomor 1, September 2006
- Koni, Hakan *Regime Opposition as a Source of Party Policy Change: The Case of the Turk Religious Right*, dalam International Journal of Bussines and Social Science, Vol. 4 No. 4; April 2013
- Kumbaracıbaşı, [Arda Can](#), *An Aggregate Analysis Of The AKP Vote And Electoral Continuities in The Turkish Party System*, Journal Turkish Studies Volume 17, 2016,
- Nasih, Mohammad. 2013. *Dinamika Antara Islam dan Nasionalisme di Turki dan Indonesia*, (Jakarta; Disertasi Doktoral di Universitas Indonesia)
- Nurjaya dkk., *Dinamika Partai Keadilan Sejahtera di Denpasar Tahun 1998-2014*, Jurnal Humanis Fak. Ilmu Budaya UNUD, Vol. 18, 2 Februari 2017, h. 75-80
- Rofii, M, Sya'roni. 2008. *Partai AKP dan Ideologi Islam Di Turki Modern* (Yogyakarta: Skripsi di Fakultas Syraiah UIN Sunan Gunung Kalijaga)
- Syamsuddin, Din 1993, *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Pemikiran Politik Islam*, Jurnal Ulumul Qura'an No. 2 Vol. IV.
- Smith, Donald Eugen. 1970. *Religion and Political Development* (Boston: Little Brown and Company)
- Soekanto, [Sitaresmi Sulistyawati](#), 2012. *Strategi Pemenangan Pemilu: AKP di Turki dan PKS di Indonesia*. (Disertasi pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)
-2006. *Pengembangan Budaya 'Knowledge Sharing' Melalui Pengadaan 5 'Enabler Nonaka' Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. (Depok: Tesis Pascasarjana Psikologi UI)
- Stepan, Alfred. *The World's Religious Systems and Democracy: Crafting The "Twin Tolerations"*, dalam [https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken /Entw%C3%BCrfe/Project Manager - Constitution Process - Governance.EML/](https://mail2.mpil.de/exchange/mboecken/Entw%C3%BCrfe/Project Manager - Constitution Process - Governance.EML/), h. 6-7.

- Syazali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press)
- Triono. 2015. "Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam pada Pemilu 2014," dalam *Jurnal TAPIS, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015*, h. 93-106
- Yavuz, M.Hakan. 2003. *Islamic Political Identity in Turkey* (New York: University Press)
- Zaina, Nur Aliyah, "Analisis tentang Dekemalisasi di Turki Pasca Attaturk," dalam *Jurnal Politik Profetik Volume 4, No. 1 Tahun 2016*.
- Zayar. 2003. *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan* (Ed. Terjemahan dari *The Iranian Revolution: Past, Present and Future*. Senin, 15 Desember 2003). Lihat di www.marxist.com/iran-latar-belakang-sejarah.htm

C. Sumber Lainnya

- https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera#Perolehan_suara. Diakses 7 Oktober 2018.
- Turkiye Istatik Kurumu* (Badan Statistik Turki, 2014), <http://hizbuttahrir.or.id/2009/06130/demokrasi-sistem-kufur-menyalahi-orang-Yahudi-danNasrani-termasuk-prinsip-agama-kita>. Dan lihat pula di <http://koranMuslim.com/2011/jubir-salafi-mesir-demokrasi-paham-yang-berbahaya/>, diakses 1 Agustus 2018
- <http://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/28/cita-dasar-pergerakan-syarikat-islam/>, diakses 6 September 2018
- Majelis Syuro Muslimin Indonesia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyumi>, diakses, 16 September 2018
- http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama, diakses 16 September 2018
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Malari>, diakses 16 September 2018
- <http://www.igmg.de/verband/islamic-community-milli-goerues/what-does-milli-goerues-mean.html>
- Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*), *Introductory Brief About AKP* (Makalah 2008).
- Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*). Makalah: *Introductory Brief About AKP*. 2008) www.surrey.ac.uk/politics
- Fealy Greg, *PKS dan kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. (Makalah dalam bedah buku: FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012).
- Aminudin, Hilmi, 2011. *Dokumen Khitob Qiyadi (Arahan Pemimpin)* (Mukernas PKS di Yogyakarta, 25 Februari)

<http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-Erdoğan.htm>, diakses, 2 Oktober 2018
<http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-Erdoğan.htm>
<http://www.dakwatuna.com/2011/03/11469/sketsa-biografi-hidayat-nur-ahid/#> diakses, 12 Agustus 2018
[http://www.today's zaman Istanbul//](http://www.today's-zaman-Istanbul//) Baykal and Kılıçdaroğlu to testify in harassment case. 2011-03-16.
<http://www.tarbiyah.net/2018/06/hasil-pemilu-turki-2018.html>, diakses 10 Oktober 2018
<http://infokammi.blogspot.com/2011/12/sejarah-kammi.html>, 12 Oktober 2018
<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/22/07511951/pks-partai-kader-yang-tak-tergantung-pada-satu-sosok>. diakses 20 September 2018
<https://www.quora.com/Why-was-Adnan-Menderes-executed-How-is-that-decision-perceived-in-modern-Turkey>, diakses 17 September 2018
<http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/470-aboul-enein.pdf>, diakses 17 September 2018.
<http://www.igmg.de/verband/islamic-community-milli-goerues/what-does-milli-goerues-mean.html>, diakses 17 September 2017
<http://smallwarsjournal.com/blog/journal/docs-temp/470-aboul-enein.pdf>, 27 Agustus 201
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-246_en.htm, diakses 17 September 2018
<http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-Erdoğan.htm>, diakses, 2 Oktober 2018
<http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-Erdoğan.htm>, diakses 2 Oktober 2018
<http://www.dakwatuna.com/2011/03/11469/sketsa-biografi-hidayat-nur-ahid/#> diakses, 12 Agustus 2018
[http://www.today's zaman Istanbul//](http://www.today's-zaman-Istanbul//) Baykal and Kılıçdaroğlu to testify in harassment
<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/16/inilah-lambung-pemenangan-suara-nasional-pks>, 16 September 2018
<https://www.liputan6.com/pileg/read/3594020/survei-lipi-prediksi-hanya-6-partai-bakal-masuk-dpr-yang-dipublish>, diakses 21 Oktober 201.

Tentang Penulis



SAIDIN ERNAS, lahir di Tarui-Seram Bagian Timur, Propinsi Maluku. Menyelesaikan S1 dari Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung dengan skripsi berjudul; "*Gagasan Snouck Hurgronje tentang Islam di Indonesia dan Implikasinya terhadap Struktur dan Kekuasaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura 1882-1932*". Minatnya pada studi-studi politik, menghantarkannya sebagai mahasiswa magister (S2) Ilmu Politik di Fisip Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2006 dengan tesis berjudul "*Kebijakan*

Penyelesaian Konflik SARA di Indonesia; Studi terhadap Perjanjian Malino dan Penyelesaian Konflik Maluku".

Tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor (S3) pada Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saidin masih fokus pada kajian-kajian sosiologi politik dan agama dan menulis disertasi dengan judul; "*Integrasi Sosial Masyarakat Papua; Studi tentang Dinamika Perdamaian pada Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat*".

Semasa menjadi mahasiswa, Saidin adalah seorang aktifis yang berkecimpung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan dan pemuda. Pernah menjadi fungsionaris PB.HMI pada tahun 2003-2004 dan Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) tahun 2005-2006. Bersama sejumlah aktifis pemuda di Maluku mendirikan Olasaka Institute, LSM lokal yang turut mengkampanyekan gerakan anti korupsi. Sejak tahun 2008, Saidin bekerja sebagai dosen yang mengasuh mata kuliah Sosiologi Politik dan Ilmu Politik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Beberapa hasil penelitian dan artikel ilmiah-nya telah dipublikasikan, antara lain; *Agama dan Budaya dalam Integrasi Sosial; Belajar dari Masyarakat Fakfak di Propinsi Papua Barat*, dimuat Jurnal Harmoni Volume 13 Nomor 1 Januari-April 2014, Penerbit Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang Kementerian Agama RI; *Gagasan Snouck Hurgronje tentang Islam dan Implikasinya terhadap Praktik Hukum dan Politik di Indonesia*, dimuat dalam Jurnal Jabal Hikmah, Volume 2 No. 1 Tahun 2013, Penerbit STAIN Jayapura; *Policy Of Social Conflict Resolution: Implementation of The Malino Agreement In Maluku*, dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2 Agustus 2012, Penerbit FISIP Univ. Muhammadiyah Yogyakarta; *Agama dan Orientasi Politik Umat Islam*, dimuat dalam Jurnal Insan Cita Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Penerbit STAI Al-Mahdi Fakfak. *Bias Politik Pesantren; Dari Pragmatisme Transaksional hingga Resistensi Sosial*, dimuat dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 1 Februari 2011, Penerbit Jurusan ilmu Pemerintahan FISIPOL Univ. Muhammadiyah Yogyakarta.

Keterlibatan Pesantren dalam Politik; Kasus Pesantren di Yogyakarta, Jurnal KONTEKSTUALITA Vol. 25 No. 2, 2010, penerbit Pusat Penelitian IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Ia juga menjadi penulis dan editor buku; *Menjaga Tradisi dan Menggapai Pahala* (ed.), Penerbit The Inter Cultural Institute (TICI) Yogyakarta, 2013.

Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan seminar dan forum ilmiah yang membahas tentang isu-isu politik, agama dan sosial budaya. Salah satu kegiatan yang penting adalah keikutsertaannya dalam program Sandwich Luar Negeri di Universitas Leiden Belanda 2014-2015.



GEMAH PUTRA RUMALUTUR, adalah staf dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Seram Timur. Ia menyelesaikan studi Sarjana (S1) dari Universitas Hasanudin Makassar. Sedangkan studi Magister (S2) diselesaikan pada Program Magister Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Jakarta. Gema banyak membuat opini dan tulisan yang dipublikasi di media-media cetak, terutama yang terkait dengan masalah-masalah politik dan kesejahteraan social.

Saat ini Gema juga bekerja sebagai Staf Ahli di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pekerjaan ini memberi kesempatan untuk mengamatai dari dekat berbagai proses-proses politik dalam pengambilan kebijakan negara yang diakuinya penuh intrik dan kepentingan. Salah satu yang turut diamati adalah pembahasan RUU Provinsi Kepulauan yang kemudian dituangkan dalam buku ini.

E-Book_Post_Islamisme_1.pdf

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	doktor-politik-ui.net Internet Source	2%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	graduatenew.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
4	www.kaskus.co.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%
6	www.yumpu.com Internet Source	1%
7	agathapelangi.blogspot.com Internet Source	1%
8	repository.iainambon.ac.id Internet Source	1%
9	blognyamasbroaderahardjo.blogspot.com Internet Source	1%
10	bujangpolitik.blogspot.com Internet Source	1%

11

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1 %

12

seindah-akhlak-islam.blogspot.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On